

ISSN NO. 0853-5922

ekstensia

VOLUME 5 TAHUN IV, FEBRUARI 1997

SISTEM KERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Dilema dan Perspektif

ekstensia

majalah penyuluh pertanian

Diterbitkan berdasarkan
SK. Menteri Pertanian No. 755/Kpts/KP. 150/10/94

Pelindung *Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian*

Pengarah *H. Rochajat Harun*

Tim Penyunting
Ketua *Zahir Zachri*
Sekretaris *Agus Hariyadi*
Anggota *Godlim Panggabean*
Andi Sumarga
Ranny Mutiara
Basuki Setiabudi
Bram Joko Santoso
Ratna Andaya
Sri Hartati
Yulia Tri Sedyowati

Perwajahan *El Suherly*
Suparman
Suhermanto
Dwihayanti
A. Erniati

**Administrasi dan
Distribusi** *IG.K. Swastika*
Yaya Sofyan
Riza Fakhrihal
Asep Sukandar
Sarmidi

Alamat **Pusat Penyuluhan Pertanian**
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung A Lantai III, Jakarta 12550
Telp. 7804226, 7806131-34 ext. 2310
Fax. 7804226

Salam Ekstensia,

Pertama, melalui Volume No.V ini, *ekstensia* mengucapkan selamat Tahun Baru 1997, semoga pada tahun yang baru ini kita akan lebih produktif, kreatif serta memperoleh hal-hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kehadiran *ekstensia* Volume V ini, sekali lagi akan mengajak rekan penyuluh dan pembaca yang budiman untuk mencermati Petunjuk Pelaksanaan dari SKB Mendagri- Mentan 1996. Kehadiran Petunjuk Pelaksanaan SKB tersebut, sudah barang tentu diharapkan akan dapat lebih memperjelas langkah-langkah operasionalisasinya.

Tidak syak lagi, Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian dan atau Sistem Kerja Penyuluh Pertanian pada dasarnya merupakan tatanan jaringan kerja yang tersusun secara terukur untuk menghantar kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Petunjuk Pelaksanaan SKB Mendagri-Mentan 1996-pun berisi pula petunjuk penetapan sistem kerja penyuluh pertanian dan wilayah kerja penyuluhan pertanian pada Bab VI. Namun demikian petunjuk singkat ini ternyata masih mengandung hal-hal yang tersamar dan mengundang berbagai tanya yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Apakah itu ? Untuk menyibaknya kabut yang masih tersamar dan mencari jawab atas tanya yang mencuat, *ekstensia* menurunkan Zahir Zachri, Hardono Tedjokoesoemo, Godlim Panggabean dan Ranny Mutiara untuk membedahnya di dalam rubrik Jentera. Irisan tipis analisis dan proses buka-bukaan dari aspek falsafah dan metodologi terhadap Sistem Kerja LAKU, Metoda Sekolah Lapangan dan Pola P4K, diharapkan akan dapat dijadikan bahan informasi yang lugas dan tuntas serta dapat menjadi acuan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan sistem kerja penyuluhan pertanian di Daerah. Semoga !

Rubrik CAKRAWALA kita kali ini, menampilkan DR.Ir.Soemitro Arintadisastra, M.Ed. untuk mengupas masalah Pendekatan dan Metoda Penyuluhan Pertanian menurut visi penulis yang memang telah cukup lama berkecimpung di dunia penyuluhan pertanian. Hantaran tulisan ini akan melengkapi dan menambah wawasan bagi pembaca untuk lebih mengenal keanekaan pendapat di dalam dunia penyuluhan pertanian. Sedangkan Mudjijo Prodjosukardjo, Staf Pengajar Fak.Pertanian UGM mengajak para pembaca untuk mencermati Profil/ Performansi Kepemimpinan dan Kelembagaan Petani Nelayan di Era Agribisnis dan Globalisasi. Silahkan anda mencoba untuk mengakrabinya menurut visi akademis penulis.

Sedang Rubrik CENGERAMA mencoba meramu pengalaman para penyuluh dalam upaya mengentaskan masalah pemyarakatan penggunaan Urea Tablet yang sangat fantastik dan cukup dramatik itu. Analisis dan ungkapan pengalaman nyata para penyuluh sendiri yaitu Ohan Burhanudin (Subang, Jawa Barat) dan Sriatin (Mojokerto, Jawa Timur). Sudah barang tentu, akan merupakan pengalaman berharga yang berguna untuk rekan sesama, ya karena di rubrik inilah kita saling berbagi.

H.Oyon Tahyan, pendekar pertanian seorang petani pemimpin yang menjadi pemimpin petani yang telah lebih dari dua dekade ini malang melintang dalam jagat kepemimpinan petani, kali ini sengaja ditampilkan lewat rubrik CERMIN. Semangat kepemimpinannya, kecintaannya pada petani dan pertanian, kreatifitas dan daya juangnya yang mandiri, terukir dalam perjalanan panjang mengangkat harkat derajat petani-nelayan hingga menjadi anggota Dewan yang Terhormat, semuanya dicatat agar tidak terlewat, cermin bagi generasi yang terasa agak terlambat untuk siap menerima tongkat.

Banyak lagi tulisan menarik di lain rubrik, sayang sekali bila tidak dilirik.

Selamat membaca, dan selamat ber-*ekstensia*.

Redaksi

GAPURA 1

TITIK BALIK 4

JENTERA 5

DILEMA SISTEM KERJA PENYULUHAN PERTANIAN
Perspektif Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian dalam
Operasionalisasi SKB Mendagri-Mentan 1996 5

Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian 29

Herman Soewardi

**CAKRAWALA** 37

Pendekatan Penyuluhan Pertanian 37

Dr. Ir. Soemitro Arintadisastra, M.Ed.

Profil/Performansi Kepemimpinan dan Kelembagaan
Petani-Nelayan di Era Agribisnis dan Globalisasi 45

Mudjijo Prodjosuhardjo

**JENDELA** 55

DAFTAR ISI

59 CENGERAMA

59 Kearifan dalam Memasyarakatkan suatu Teknologi

63 Aplikator yang terlupakan

Ohan Burhanudin

69 Catatan Pengalaman Pemasyarakatan
Penerapan Teknologi Urea Tablet

Sriatin



77 CERMIN

77 *H. Oyon Tahyan*

Petani Pemimpin Pemimpin Petani



85 SSST.....

85 Rapat Penyuluhan Pertanian
Tingkat nasional

86 Visi Pertanian Tahun 2020



89 CELOTEH

89 Program Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian

90 Selamat Bekerja BIPP !

91 BIPP, Apa Lagi yang
Masih Kurang ?

92 Hidupkan Kembali BPP....!



93 WACANA

99 A...EKSTENSI

99 Resep Majudi Mengatasi Kebingungan

TITIK BALIK

Pada saat seseorang atau sekelompok orang menyebut pekerjaannya sebagai suatu profesi, maka akan ada sederet rambu-rambu, sejumlah rincian pekerjaan dan tentu saja standar hasil pekerjaannya yang mencirikan profesinya atau membedakan dirinya dengan profesi lainnya.

Pada saat penyuluh ditantang untuk menyebutkan ciri profesinya, maka pada saat itu paduan suara korps penyuluhpun bernyanyi dengan suara yang bermacam-macam, ada yang dengan nada suara tinggi menunjukkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan pertanian di persada ini, ada yang dengan nada rendah bernyanyi bahwa apa yang dikerjakannya tak lebih dari sekedar buih saja sebagai pendukung yang sulit diukur perannya karena rancu dengan peran-peran lainnya, tapi adapula yang berada diantara keduanya yang merasa bahwa apa yang dikerjakannya termasuk dalam kategori biasa-biasa saja bisa penting dan juga bisa tidak penting sama sekali. Tergantung situasi sajalah!

Aneh bukan?, pada kesatuan yang sama ada tiga suara yang berbeda, lantas apa yang membuatnya menjadi berbeda?

Ternyata perjalanan yang cukup panjang dan berliku dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini telah menjadikannya berbeda-beda, lalu bagaimana supaya suara itu menjadi satu dan tentunya menunjuk pada peran yang cukup berarti bukan sekedar menjadi penggembira saja?

Dari kacamata ilmu manajemen bila dalam satu kesatuan peran dari sekelompok orang atau masyarakat interaksinya yang terjadi ternyata menghasilkan output yang berbeda, maka yang mesti dilihat pertama kali adalah apakah sudah ada sistem kerja pada kesatuan peran tersebut yang menjamin interaksinya akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Hiruk pikuknya penyelenggaraan penyuluhan pertanianpun bila menurut pengertian tersebut mungkin saja terjadi karena penerapan sistem kerja yang tidak konsisten atau mungkin juga memang sistem kerjanya belum ada atau sedang dicari-cari mana yang paling tepat.

Telunjuk kita rasanya tak perlu menuding siapapun atau pihak manapun, yang diperlukan sekarang adalah membuka lembar demi lembar perjalanan yang pernah terlampaui, mencermatinya dengan penuh kearifan, menganalisisnya dengan mata penganalisaan setajam pisau, menggali daya inovatif dan kreatif serta merefleksikannya dengan berbagai tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lapang dada. Mungkin dengan begitu kita akan menemukan titik balik yang mengembalikan kita pada fungsi dan peranannya yang hakiki dan dari situlah kita bisa menelusuri sistem kerja yang sesuai dengan kondisi dan situasi kita sendiri.

Jawabannya bukan hanya berakhir pada sebetuk buku yang bertajuk pedoman tetapi pada nilai moral yang menempatkan diri kita ditengah sistem tersebut dan dari situlah awal langkah kita.

Ternyata masih banyak yang harus dibenahi...

ranny mutiara

diperlukan adanya Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian yang memberikan rambu-rambu bagi setiap penyelenggara penyuluhan pertanian dalam menjalankan tugasnya. Sistem kerja yang bagaimana yang tepat atau sesuai dengan misi yang diemban dengan kehadiran SKB Mendagri -Mentan 1996?

Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian, memang secara eksplisit tidak dimuat dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 meskipun rambu-rambu yang mengarah kesitu telah dicantumkan dengan adanya aturan dan pengertian tentang Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Pertanian beserta Rencana Kerja Penyuluhnya sampai pada kelembagaan, ketenagaan serta pembiayaan penyuluhan pertanian pada hakekatnya memberi gambaran bahwa rangkaian hal-hal tersebut akan saling berinteraksi dalam jalinan yang disebut sebagai Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian.

Penyuluhan Pertanian adalah proses kemasyarakatan yang dinamis yang berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat petaninya dalam arti orientasi penyuluhan pertanian harus selalu membangun ke masa datang yang lebih baik dari sekarang. Implikasinya ada kepentingan, harapan dan tantangan yang dihadapi oleh petani yang harus diupayakan penanggulangannya oleh petani sendiri melalui suatu proses belajar-mengajar yang wajar.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka penyuluhan pertanian sudah seharusnya menjabarkan kepentingan, harapan dan tantangan yang dihadapi oleh petaninya itu kedalam suatu tatanan yang komprehensif, sistematis, bertahap dan rasional tanpa meninggalkan prinsip dan filosofi penyuluhan pertanian sebagai suatu upaya untuk memandirikan petani.

Kondisi inilah yang menuntut adanya suatu **Sistem Kerja** yang dapat memberi jaminan akan

Melalui Sistem Kerja diharapkan proses belajar masyarakat petani dapat mempersiapkan sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas



Dilema Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian

PERSPEKTIF SISTEM KERJA PENYULUHAN PERTANIAN DALAM OPERASIONALISASI SKB MENDAGRI-MENTAN 1996

SKB Mendagri-Mentan 1996 telah digelar yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaannya Satu demi satu daerah mulai membenahi penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai warna yang diinginkan dalam SKB tersebut. Pada saat langkah pembenahan mencapai tahapan operasionalisasi, masihkah diperlukan adanya Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian?.

Entah apa gerangan yang ada dalam benak para penyuluh pertanian di tanah air tercinta, tatkala mendengar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian telah di tandatangani pada tanggal 10 April 1996. Sebagian mungkin gembira, sebagian barang-kali tersenyum simpul saja, sebagian lagi bukan tidak mungkin tersenyum kecut, atau barangkali ada juga yang acuh tak acuh alias kata remaja sekarang "cuek saja".

Apapun reaksi para penyuluh pertanian atau para penyelenggara penyuluhan pertanian, atau siapa saja yang menaruh minat pada perkembangan dan pengembangan penyuluhan pertanian di persada pertiwi ini, secara "de facto" dan "de jure" Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang baru telah diluncurkan. Suka-tidak suka, senang-tidak senang, pro atau kontra, rindu atau benci, berdasarkan

Pedoman yang baru digelar ini mau tidak mau penyuluhan pertanian harus diselenggarakan berdasarkan pedoman itu. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan Bersama itu dengan sendirinya perlu disesuaikan, diselaraskan dan diserasikan.

Pembenahan demi pembenahan telah mulai dilaksanakan di daerah meskipun kecepatan daerah dalam melakukan pembenahan itu tidaklah sama, tetapi dari apa yang telah dilakukan daerah sekarang ini seperti pembentukan lembaga BIPP lengkap dengan penunjukkan kepalanya, pengaturan satminkal para penyuluh menunjukkan niat baik dan keseriusannya dalam menangani penyuluhan pertanian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan rumah tangga daerah itu.

Pada saat pembenahan ini mulai mencapai tahapan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan, maka pada saat itu

efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan. Melalui Sistem Kerja yang berlaku inilah diharapkan proses belajar masyarakat petani beserta substansinya dapat saling berinteraksi sehingga secara komprehensif peran penyuluhan pertanian dalam mempersiapkan sumberdaya manusia petani akan lebih terukur dalam suatu supra sistem pembangunan pertanian.

Sejak kehadiran penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia tercinta ini, tentu saja setiap masa atau periode mempunyai suatu sistem kerja yang khas entah itu pada masa penjajahan, awal kemerdekaan, masa pengembangan intensifikasi sampai pada masa sebelum munculnya SKB Mendagri- Mentan 1996. Yang pasti keberhasilan pembangunan pertanian yang sekarang telah dinikmati tidak mungkin akan bisa tercapai tanpa adanya suatu jalinan kerja yang harmonis.

Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan(Laku), wahana interaksi transfer teknologi

Sistem kerja Latihan dan kunjungan(Laku) dalam penyuluhan pertanian diterapkan di Indonesia sejak tahun 1976 bersamaan dengan pengawalan program intensifikasi padi, keberhasilan pencapaian swa sembada beras pada tahun 1985 merupakan satu prestasi keberhasilan yang dicapai melalui sistem kerja Laku.

Istilah Laku sebagai suatu sistem kerja memang masih banyak yang

mempertanyakan, FAO sendiri mengartikan Laku sebagai **pendekatan penyuluhan pertanian** dalam pengertian pendekatan sebagai gaya kegiatan dari sistim penyuluhan pertanian, namun demikian dari beberapa hasil pengkajian atau studi seringkali menyebutkan Laku sebagai suatu sistem kerja bahkan dalam Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian di NTB, Juli 1996 dalam salah satu mata acaranya membahas Laku dengan nomenklatur sebagai sistem kerja.

Perkembangan terakhir perjalanan sistem kerja Latihan dan kunjungan(Laku) yang untuk selanjutnya disebut sebagai sistem kerja Laku, bak hanyut terbawa arus timbul tenggelam sehingga tidak jelas lagi apakah sistem kerja ini masih berlaku atau sudah tidak laku lagi. Sepengetahuan *ekstensia*, hingga sekarang belum ditemukan surat keputusan atau surat edaran dari pejabat yang berwenang di Departemen Pertanian yang merevisi ataupun juga mungkin menghapuskan sistem kerja Laku ini.

Sistem kerja Laku pada awalnya diterapkan untuk tanaman pangan khususnya padi, pada tahun 1981 sistem kerja ini diberlakukan pada komoditas sub sektor lain yaitu perkebunan, peternakan dan perikanan dengan pola yang sama seperti pada komoditas tanaman pangan.

Sistem kerja atau pendekatan Laku, merupakan suatu pendekatan yang memadukan antara pelatihan sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam pelaksanaan tugasnya dengan kunjungan pe-

nyuluh secara terjadwal kepada kelompok tani sebagai sistem interaksi penyuluh dengan petaninya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

Asumsi dasar penerapan sistem kerja Laku ini FAO(1988) menyebutkan antara lain bahwa penyuluh kurang sekali memperoleh pelatihan yang "*up to date*" sehingga berkecenderungan untuk jarang berkunjung atau berinteraksi dengan petaninya, dengan pendekatan ini diharapkan dapat mendisiplinkan penyuluh, meningkatkan kualitasnya melalui proses pelatihan, keteraturan mereka dalam mengunjungi petani secara rutin dan terjadwal dan juga diasumsikan bahwa melalui pendekatan ini mampu menjembatani keterkaitan antara penelitian dengan penyuluhan dan antara penyuluhan dengan petani sebagai sasaran akhir.

Penerapan sistem kerja Laku di Indonesia didasarkan pada prinsip pendekatan kelompok sebagai pendekatan utama dalam mengembangkan kemampuan petani pada program-program pembangunan pertanian dalam hal ini program peningkatan produksi khususnya produksi beras. Melalui sistem ini kunjungan periodik yang dilakukan penyuluh kepada kelompok tani merupakan suatu wahana untuk berinteraksi dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kenyataan yang secara faktual dihadapi oleh petani.

Melalui penerapan sistem kerja Laku, PPL dalam melaksanakan tugas penyuluhannya dialokasikan untuk membina 16 kelompok tani dalam satuan Wilayah Kerja

Penyuluhan Pertanian(WKPP), yang secara periodik harus dikunjungi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu mengunjungi setiap kelompok sekali dalam dua minggu.

Masalah faktual yang dihadapi oleh petani dalam setiap kali kunjungan merupakan bahan untuk pembahasan pada pertemuan berikutnya, untuk itu PPL harus siap dengan perbendaharaan iptek sehingga dengan demikian PPL harus terur menerus melengkapi dirinya dengan berbagai informasi dan iptek, karenanya setiap kali selesai mengunjungi semua kelompok tani di wilayah kerjanya, PPL berkumpul di BPP untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi petaninya, memperoleh masukkan informasi dan iptek dari unsur pembinanya dalam proses pelatihan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Pertanian Urusan Programa (PPUP) dengan penyelia Penyuluh Pertanian Spesialis(PPS) ataupun petugas Dinas di tingkat kabupaten.

Dengan proses tersebut maka tercermin adanya aliran teknologi yang ditransfer melalui dua tahapan komunikasi, dari sumber pembinanya kepada penyuluh lapangan dan dari penyuluh kepada petani dan juga sebaliknya masalah yang dihadapi oleh petani akan naik sebagai umpan balik yang selalu dibahas dalam setiap kali pertemuan di BPP.

Di sisi kepentingan petani, sistem kerja Laku mengembangkan satu tatanan nilai pada diri petani akan ketergantungannya terhadap peran penyuluh sebagai pengantar

informasi dan iptek yang berkaitan dengan pengembangan usahatani. Melalui kunjungan yang terjadwal, petani tidak perlu bersusah payah untuk mencari informasi iptek tentang usahatani, mereka cukup menunggu dengan keyakinan bahwa penyuluh pasti akan datang, berinteraksi dengan mereka dengan membawa sejumlah informasi iptek yang baru.

Kejayaan sistem kerja Laku sebagai suatu sistem kerja yang memberikan iklim kondusif bagi pelaksanaan tugas penyuluh pertanian terjadi pada saat gencargencarnya intensifikasi padi dilaksanakan melalui program Bimas. Pada saat itu Bimas dengan Catur Sarana Wilayah Pedesaannya (penyuluhan, sarana produksi, perkreditan dan pengolahan/pemasaran) mampu membangun suatu jalinan kesisteman antara penyuluhan, pengaturan dan pelayanan dalam satuan wilayah tertentu.

Pada era inilah sistem kerja penyuluhan pertanian sebagai piranti lunak secara terstruktur lengket dengan piranti keras, sehingga interaksi dari ke empat komponen ini mampu menghasilkan momentum perubahan perilaku petani secara berkelompok dari yang bersifat tradisional menjadi petani yang mampu mengelola bahkan membudayakan intensifikasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan usahatani khususnya padi.

Keberhasilan sistem kerja Laku yang menunjukkan hasil gemilang pada program intensifikasi padi

ternyata memicu sub sektor lainnya (peternakan, perikanan dan perkebunan) untuk mengadopsi sistem kerja ini dalam pencapaian target produksi komoditas unggulannya.

Replikasi penerapan sistem kerja Laku pada ke tiga sub sektor tersebut secara utuh mengikuti pola yang dilaksanakan pada tanaman pangan khususnya pada komoditas padi dengan membagi wilayah kerja penyuluh pertaniannya ke dalam 16 wilayah kelompok, kunjungan satu kali dua minggu ke kelompok tani dan latihan sehari di BPP. Pendeknya ke tiga sub sektor ini tak mau ketinggalan ikut menerapkan sistem kerja Laku tanpa kecuali.

Pemberlakuan sistem kerja Laku sebagai sistem kerja bagi penyuluh di semua sub sektor tanpa kecuali inilah awal dari munculnya berbagai eksek yang ujung-ujungnya malah menjadi bumerang bagi kredibilitas serta efektifitas kerja seorang penyuluh pertanian.

Pada saat ini muncul kelompok-kelompok tani yang ditumbuhkan sekedar hanya untuk memenuhi target yang mengharuskan si penyuluh membina 16 kelompok tani, pelatihan yang diselenggarakan di BPP menjadi terengah-engah bahkan mungkin mulai kehilangan nafas karena ternyata materi yang disajikan pada pertemuan di BPP tidak berbanding lurus dengan lajunya informasi dan teknologi yang berkembang, ironisnya lagi pada saat sistem kerja Laku mulai diberlakukan secara menyeluruh kondisi anggaran untuk penyuluhan justru mulai menurun.

Kondisi semakin parah lagi sejalan dengan pemberlakuan SKB Mendagri-Mentan tahun 1991 yang membagi habis penyuluh lapangan ke dalam induk kesatuan sub sektor serta kedudukan BPP yang ditempatkan hanya sebagai instalasi dari dinas kabupaten. Tidaklah mengherankan kalau ditemukan BPP yang sunyi senyap bahkan mungkin terkunci rapat sementara penyuluhnya yang ditempatkan di WKPP dengan versi masing-masing sub sektor bergerak dan berinteraksi dengan petaninya berdasarkan visi masing-masing. Barangkali inilah era dimana sistem kerja Laku tidak berlaku lagi seandainya pun ada yang menerapkan konsistensinya terhadap prinsip-prinsip dasar Laku bergeser dengan dalih situasional.

Penerapan sistem kerja Laku pada program intensifikasi khususnya padi menjamin penyuluh sebagai pembawa informasi iptek untuk bisa merasa tenang dan tegar menghadapi petaninya hal ini wajar karena yang pertama teknologi usahatani khususnya teknologi produksi padi pada umumnya telah dikuasai oleh penyuluh seandainya ada permasalahan yang dihadapi petani dalam menjalankan usahatannya biasanya dikarenakan petaninya tidak menerapkan secara utuh dari rekomendasi teknologi yang telah diberikan.

Kedua, materi dalam proses pelatihan di BPP merupakan materi komoditas yang sama sehingga dalam proses pelatihan ini pendalaman penyuluh terhadap teknologi komoditas padi selalu di "up date" oleh penyeliannya yaitu para PPS kabupaten, perlu diingat bahwa pada waktu itu perkem-

bangnan teknologi produksi padi berkembang cukup pesat.

Ketiga, dalam proses implementasi di lapangan, penyuluh tidak merasa gentar dalam menyampaikan anjuran atau rekomendasi teknologinya karena mulai dari penyediaan sarana produksi, permodalan sampai pemasaran telah dijamin oleh pemerintah melalui program Bimas dan yang keempat, karena titik fokus pembangunan pertanian pada saat itu adalah pencapaian swa sembada beras, maka anggaran operasional untuk program ini relatif cukup besar yang implikasinya pada kegiatan penyuluh di lapangan cukup memberikan keleluasaan gerak si penyuluh dalam berinteraksi dengan petaninya.

Iklm yang menguntungkan pada penyelenggaraan penyuluhan dengan sistem kerja Laku melalui program intensifikasi padi yang serba terjamin ini, ternyata tidak memberikan hasil yang sama ketika sistem kerja ini diterapkan pada ke tiga sub sektor lainnya. Hal ini bisa dihindari apabila sedari awal disadari bahwa ada beberapa hal pokok yang harus dicermati berkenaan dengan pemberlakuan sistem kerja Laku ini.

Pertama, sistem kerja Laku sebagai wahana untuk terjadinya transfer teknologi menuntut adanya teknologi yang sudah matang karena dengan model komunikasi dua tahapannya itu teknologi yang dialirkan adalah teknologi yang siap untuk diterapkan oleh petani, sementara keanekaan komoditas yang ada di ketiga sub sektor tersebut sedikit sekali teknologinya yang sudah siap pakai.



Sistem kerja Laku sebagai wahana untuk terjadinya transfer teknologi menuntut adanya teknologi yang sudah matang

Kedua, homogenitas usahatani sasaran pada sistem kerja Laku adalah syarat agar secara efektif transfer teknologi kepada petani dapat diterapkan oleh mereka dalam satuan kelompoknya. Pada pemberlakuan sistem kerja Laku di luar intensifikasi padi, sulit sekali ditemui petani apalagi dalam bentuk kelompok yang secara spesifik mengusahakan komoditasnya sebagai mata pencaharian utama sehingga penumbuhan kelompok berdasarkan komoditas menjadi tidak realistis lagi dan seringkali menjadi tumpang tindih.

Ketiga, proses interaksi penyuluh dan petani dalam sistem kerja Laku menuntut adanya ketaatan dari kedua belah pihak terhadap jadwal pertemuan yang telah disepakati. Untuk kondisi petani yang berusahatani padi biasanya berada dalam satu kawasan tertentu yang mudah dijangkau oleh penyuluh, tetapi kondisi ini berbeda sekali



dengan tempat tinggal nelayan dan pekebun yang letaknya berpencaran dan seringkali terpisahkan oleh letak geografis yang akibatnya pertemuan antara penyuluh dengan petani menjadi jarang karena adanya hambatan-hambatan tadi.

Keempat, perencanaan program dalam sistem kerja Laku dilakukan secara sentralisasi yang untuk itu diperlukan anggaran yang cukup besar agar kegiatan transfer teknologi dapat mengalir dari pusat sumber informasi kepada para penggunanya. Pada kondisi-kondisi tertentu pola sentralisasi ini akan memperpanjang rantai birokrasi yang pada akhirnya menciptakan iklim ketergantungan.

Meskipun disadari bahwa dalam perjalanannya sistem kerja Laku mengalami pasang surut yang boleh dikatakan iramanya seiring dengan berbagai kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di negara ini, namun ada

fenomena menarik dibalik penerapan sistem kerja ini oleh para penyuluh pertanian.

Sebagian besar penyuluh pertanian yang ditemui *ekstensia* selalu menyebutkan sistem kerja Laku sebagai sistem kerja yang cocok bagi mereka dalam melaksanakan tugas penyuluhannya.

Tugiran, penyuluh pertanian di BPP Sleman, DI Yogyakarta yang telah bertugas mulai tahun 1976 menyebutkan bahwa dari pengalamannya dalam melaksanakan tugas, sistem kerja Laku merupakan sistem kerja yang paling cocok karena dengan sistem ini kedekatan dengan petani tetap terjaga melalui kunjungan rutin yang terjadwal, di lain pihak penambahan pengetahuan penyuluh dengan pelatihan di BPP membuat kondisi penyuluh untuk selalu siap dalam menghadapi petaninya. Walaupun dalam perkembangan terakhir sistem kerja ini tidak dilakukan secara utuh, ia menyatakan bahwa kondisi kebijaksanaan penyuluhan pertanianlah yang membuatnya demikian.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh **L. Johanies**, koordinator penyuluh di BPP Nania Kodya Ambon, "*Dengan Laku kita dibangun untuk selalu menepati janji kepada petani, dan rasanya dengan sistem ini kehadiran penyuluh memang diperlukan oleh mereka. Inilah yang membuat kita termotivasi untuk terus berhubungan dengan para petani*", demikian ungkapnya kepada *ekstensia* ketika ditemui di BPPnya.

Keandalan sistem kerja Laku ini juga diakui oleh penyuluh pertanian

yang dulu dikenal dengan istilah PPS, **Ir. Hari Susanto, MS**, penyuluh pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam perbincangannya dengan *ekstensia*, menyatakan bahwa dulu dengan adanya sistem kerja Laku, PPS mempunyai keterikatan dengan para penyuluh yang berada di lapangan untuk selalu berinteraksi dalam proses pelatihan di BPP.

"Dengan sistem kerja Laku, PPS selalu dituntut dan ditantang untuk terus mencari materi dan informasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah di lapangan, berbagai metodapun mempunyai peluang untuk dicobakan karena kita punya wahananya yaitu pada proses latihan di BPP", ungkap **Hari Susanto** selanjutnya.

Masih banyak pernyataan serupa dari para penyuluh yang pada intinya masih tetap mengandalkan sistem kerja Laku sebagai sistem kerja bagi penyuluh pertanian, lantas bila penyuluhnya masih tetap merasa bahwa sistem kerja itu adalah tetap yang terbaik, mengapa banyak pihak menuding bahwa sistem kerja ini sudah tidak Laku lagi alias sudah tidak dianut oleh penyuluh sebagai sistem kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Bila ditelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya pernyataan penyuluh tentang penerapan sistem kerja Laku ini terbagi kedalam dua kelompok. Satu kelompok menganggap sistem kerja Laku adalah yang paling tepat seperti yang diungkapkan oleh para penyuluh di atas, namun ada juga penyuluh yang menganggap sistem kerja Laku sekarang ini sudah tidak tepat lagi untuk dipertahankan.

Pada umumnya kelompok penyuluh yang menganggap sistem kerja Laku ini sulit untuk dipertahankan adalah para penyuluh yang mengalami hambatan untuk berinteraksi dengan petaninya karena secara faktual sulit bertemu dengan petaninya mengingat wilayah atau kondisi geografi yang secara alami terpecah serta terpisah dan populasi petaninya yang memang sedikit sehingga tidak mungkin menggabungkan mereka dalam kelompok-kelompok apalagi harus mencapai target 16 kelompok.

Dari kelompok penyuluh yang menganggap sistem kerja Laku tersebut kurang sesuai lagi dengan kondisi sekarang, ada juga yang meninjaunya dari sisi yang lain, contohnya **Dr. Ahmad Kasiyani**, penyuluh pertanian Provinsi Sulawesi Selatan ini menyatakan bahwa penerapan sistem kerja Laku yang terlalu lama hanya akan mengakibatkan ketergantungan petani terhadap penyuluhnya sementara sekarang ini pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian harus menumbuhkan kemandirian dan keswadayaan dari petaninya sendiri sebagai pelaku.

“Sekarang ini diperlukan model sistem kerja yang menyempurnakan sistem kerja Laku seperti yang pernah berlaku pada masa lalu. Yang pasti muatan utamanya adalah membangun kemandirian petaninya untuk menjadi lebih aktif dan inovatif bukan lagi sekedar sasaran produksi belaka”, ujar Kasiyani kepada *ekstensia*.

Pernyataan Kasiyani tentang diperlukannya sistem kerja yang

lebih berorientasi kepada membangun kemandirian petani didukung oleh **Prof. Margono Slamet**, pakar penyuluhan pertanian yang pernah menjadi Rektor Unila, Lampung yang menyatakan bahwa sistem kerja yang tepat untuk era pembangunan pertanian mendatang adalah sistem kerja yang mampu merespons kebutuhan petani.

“Sistem kerja Laku yang saya tahu sekarang ini lebih banyak menitik beratkan pada maunya para birokrat yang diturunkan ke tingkat yang paling bawah, kalau ingin sistem kerja ini sesuai dengan tuntutan dan tantangan pembangunan pertanian, barangkali sistem kerja ini perlu ditelaah kembali atau mungkin diubah dan mengganti dengan sistem kerja baru”, ungkap Margono Slamet selanjutnya.

Sebenarnya keraguan terhadap efektivitas penerapan sistem kerja Laku telah mulai dimunculkan pada tahun 1989, hasil studi dan evaluasi Laku yang dilakukan FAO pada saat itu telah menunjukkan bahwa faktor kendala yang menyebabkan Laku tidak berfungsi adalah masalah kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat beraneka dan tersebar di berbagai wilayah.

Hasil pengkajian Jibatani Karsa(1994) dan Studi FAO(1995) juga memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi terdahulu yang pada intinya menyatakan antara lain bahwa sistem kerja Laku itu tidak laku pada penyuluhan yang dilaksanakan oleh sub sektor non tanaman pangan, model jadwal kunjungan pada

kelompok yang terlalu kaku yang mengakibatkan petani menjadi kurang mandiri, dan juga akses keterkaitan penyuluh dengan hasil-hasil penelitian yang masih rendah karena mekanisme keterkaitannya yang belum jelas yang mengakibatkan penyuluh lebih banyak mentransfer paket-paket teknologi yang dikemas secara nasional bukan berdasarkan kebutuhan faktual petaninya secara spesifik wilayah.

Rekomendasi penyempurnaan sistem kerja Laku yang disampaikan dari ke tiga hasil pengkajian atau studi tadi lebih banyak ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia yang memuat antara lain:

1. Titik berat sistem kerja Laku harus bergeser dari fokus komoditas dengan pencapaian produksinya kepada petani sebagai pemeran utama.
2. Penumbuhan dan pembinaan kelompok tani harus didasarkan keserasian anggota serta jangkauan nyata untuk bisa bertemu dan berinteraksi diantara mereka.
3. Kunjungan dan latihan tetap dilaksanakan dengan frekuensi kunjungan dan latihan yang bervariasi sesuai dengan kondisi faktual kepentingan petani dalam pengelolaan usahatannya.
4. Pembinaan kelompok tani harus mampu menumbuhkan kemandirian petani dalam merencanakan pengelolaan usahatannya, memecahkan permasalahan diantara mereka dan mengambil keputusan yang disepakati oleh mereka sendiri.
5. Jalinan keterkaitan penyuluh dengan penelitian tidak lagi

mengikuti pola atau alur dua tahapan komunikasi, tetapi secara bersama peneliti, penyuluh dan petani berinteraksi dalam memecahkan masalah teknologi secara spesifik lokasi.

6. Sistem kerja Laku harus mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang ada dalam kesisteman pembangunan wilayah, sehingga dengan demikian pekerjaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh penyuluh sebagai pekerjaan penyiapan sumberdaya manusia akan secara efektif terlihat hasilnya.

Kontroversi penerapan sistem kerja Laku memang masih terus bergulir, apalagi dengan kehadiran SKB Mendagri-Mentan no. 54 tahun 1996 dan 301/Kpts/LP.120/4/96 yang secara implisit menuntut adanya suatu sistem kerja penyuluhan pertanian yang secara efektif memberikan dasar operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah, sistem kerja Lakupun diangkat untuk ditelaah kembali sebagai salah satu alternatif sistem kerja yang akan diterapkan pada era penyuluhan pertanian mendatang.

Pro dan kontra terhadap penerapan sistem kerja ini merupakan suatu wujud hadirnya demokratisasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Barangkali untuk menentukan mana yang paling cocok atau tepat masing-masing pihak akan mengungkapkan berbagai argumen yang memperkuat pilihannya tersebut, namun satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian dan pandangan terhadap pilihan sistem kerja yang tepat adalah,

apakah sistem kerja yang dipilih itu sudah sejalan dengan misi dan filosofi penyuluhan pertanian itu sendiri?.

Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian yang Pancasila

Sebagai sistem, maka sistem kerja penyuluhan merupakan rambu-rambu jaringan jalan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai sistem, maka sistem kerja penyuluhan merupakan cara kerja atau teknik kerja penyuluhan pertanian untuk mencapai tujuan. Baik sebagai sistem ataupun sebagai sistem, maka sistem kerja penyuluhan pertanian tidak lain adalah merupakan tatanan proses dasar untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian.

Di dalam menetapkan sistem kerja penyuluhan pertanian, apa dan bagaimanapun bentuk sistem kerja penyuluhan pertanian itu, yang pasti bahwa ia harus senantiasa konsisten dan konsekuen sejalan dengan *falsafah penyuluhan pertanian* itu

sendiri. Falsafah merupakan landasan yang mendasari lahirnya suatu idea. Demikian pula dengan penyuluhan pertanian, idea atau konsep penyuluhan pertanian memiliki landasan falsafah Pancasila sebagai nilai dasar dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam tatanan masyarakat pertanian yang berlandaskan falsafah Pancasila, maka petani-nelayan berkedudukan sebagai warga negara RI yang dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh mata-pencaharian dan berkehidupan yang layak serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara RI yang lainnya.

Sebagai warga negara RI, petani-nelayan adalah *subyek* dalam mengelola seluruh peri kehidupan dan penghidupan diri dan keluarganya, mereka adalah *subyek* dalam mengelola usahatani, mata pencaharian sumber penghidupannya. Sebagai *subyek*, petani-nelayan adalah manusia merdeka yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri di dalam menetapkan



Sebagai subyek, petani-nelayan adalah manusia merdeka yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri.

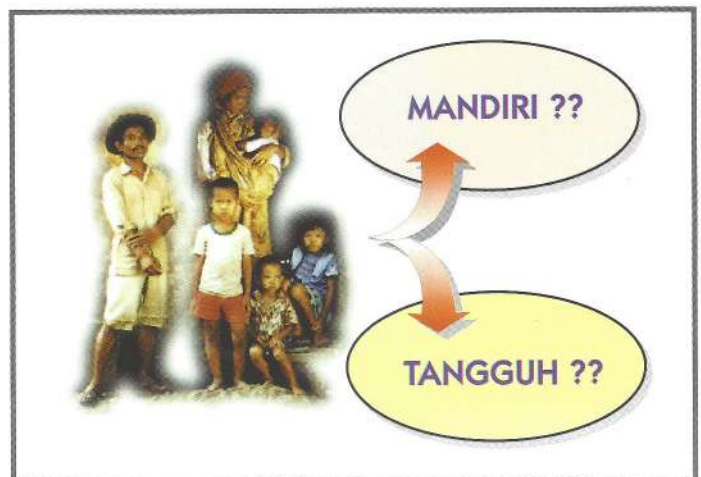
kan pilihan usahatani yang dikelolanya. Petani-nelayan adalah *subyek* yang mandiri di dalam menentukan jalan hidup yang dipilihnya sendiri. Undang Undang Budidaya Tanaman Tahun 1992, merupakan wujud nyata penerapan falsafah Pancasila secara konsekuen ke dalam nilai instrumental berbentuk undang-undang. Konsistensi terhadap cara pandang inilah yang harus senantiasa diterapkan dalam menetapkan sistem kerja penyuluhan pertanian dan sekaligus harus mampu mengantisipasi serta menjabarkan pelaksanaan Undang Undang Budidaya Tanaman Tahun 1992 tersebut di atas. Satu lagi PR untuk Pusat Penyuluhan Pertanian yang harus segera dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Adapun mengenai kondisi petani-nelayan yang sekarang masih berada dalam berbagai keterbatasan dalam hal penguasaan sumberdaya yang dimilikinya, hal itu tidak berarti bahwa petani-nelayan harus ditempatkan sebagai *obyek* dalam pembangunan sekarang ini. Sebuah dilema memang ! Keterbatasan petani-nelayan dalam hal penguasaan sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya ekonomi, dan mungkin pula memiliki keterbatasan pula dalam hal kepribadian, semangat, etos kerja, kepercayaan diri, sebagaimana diungkapkan oleh *Herman Soewardi* (lihat : Box), semua itu memang merupakan kondisi faktual yang sekaligus merupakan tantangan bagi para penyusun konsep sistem kerja penyuluhan pertanian. Petani-nelayan sekarang ini memang *belum mandiri, belum tangguh dan belum menjadi subyek*, masalahnya,

bagaimana membangun sistem kerja penyuluhan pertanian yang senantiasa mampu menempatkan dan mendudukan petani-nelayan sebagai *subyek*, sementara yang bersangkutan masih berada dalam kondisi belum mandiri dan belum tangguh serta masih berada dalam berbagai keterbatasan dalam penguasaan sumberdaya.

Telur atau Ayam dulu dan Kilas Balik Penyuluhan Pertanian

Memang sulit, ibarat memilih telur dulu atau ayam dulu; dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani-nelayan inipun berkembang berbagai pendapat dan pandangan. Tangguh dulu baru mandiri dan menjadi subyek, atau jadi subyek dan mandiri dulu baru akan menjadi tangguh. Ada pandangan yang berpendapat bahwa jangan dulu bicara tentang tentang subyek dan mandiri sebelum petani-nelayan itu tangguh. Jadikanlah dulu petani tangguh, petani yang mampu menerapkan teknologi yang mendu-



kung peningkatan produksi usahatannya. Bila ini sudah terwujud barulah petani itu bisa mandiri dan bisa jadi subyek.

Cara pandang ini pulalah yang telah menciptakan suatu sistem penyuluhan pertanian yang dikemudian hari berkembang dengan pemeo; "dipaksa-terpaksa-biasa" artinya, petani yang belum tangguh, belum subyek dan belum mandiri ini, perlu "dipaksa" dulu untuk mau menerapkan teknologi yang dianjurkan. Pada mulanya memang petani akan dengan "terpaksa" menerapkannya, tetapi lama kelamaan petani akan menjadi "biasa" menerapkan teknologi tersebut.

Dalam konteks ini memang terkesan petani belum didudukkan sebagai subyek yang mandiri, namun cenderung sebagai "obyek" dalam proses alih teknologi dan peningkatan produksi. Begitulah sistem kerja penyuluhan pertanian yang lalu, dan hasilnya, sungguh sangat luar biasa, sangat spektakuler, sistem ini ternyata mampu menghantarkan Indonesia mencapai swa sembada beras yang mencengangkan dunia. Lantas apa lagi yang mesti dipersoalkan bila sistem kerja penyuluhan pertanian yang lalu telah membuktikan kemampuan dan keberhasilannya?

Ditahun 1987 di Subang Jawa Barat pada seminar penyuluhan pertanian Kongres I Perhaptani, Herman Soewardi, Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad dan staf ahli Bimas pernah memberikan peringatan bahwa; sistem penyuluhan pertanian dengan pola "paksa, terpaksa, biasa" ini memang efektif

untuk mencapai sasaran program dalam waktu yang relatif singkat, namun akan dengan cepat pula mencapai titik jenuh atau "leveling off" serta akan mengalami penurunan tingkat produksi dan kualitas penerapan teknologi secara cepat dan tajam. Dalam waktu yang sama Salmon Padmanagara, Pakar penyuluhan pertanian menyatakan kekhawatiran bahwa pola "dipaksa, terpaksa, biasa" justru akan menciptakan masyarakat petani yang menjadi "biasa harus dipaksa" atau menjadi masyarakat yang apatis, tidak dinamis. Apabila kondisi ini benar-benar terjadi, maka tugas untuk mencerdaskan bangsa akan menjadi semakin berat.

Belum lagi kita sempat berbenah untuk mengantisipasi peringatan tersebut, suatu kenyataan telah bergulir bersama putaran waktu yang memang tidak pernah mau menunggu, produktivitas padi dan kualitas penerapan teknologi supra insus oleh para petani disepanjang jalur pantura melorot drastis dan import beraspun tak dapat dihindari. Ketangguhan petani yang diharapkan akan tumbuh dengan sedikit menggeserkan kedudukannya sebagai subyek yang mandiri itu, ternyata tidak atau belum menjadi kenyataan.

Kilas balik dari pengalaman telah menunjukkan bahwa sistem penyuluhan yang kurang mendudukkan petani sebagai subyek yang mandiri ternyata hanya memberikan keberhasilan sesaat namun sekaligus meninggalkan dampak tumbuhnya apatisisme dan sifat ketergantungan petani yang semakin tinggi. Perubahan keterampilan (penerapan/

alih teknologi) semata tanpa dibarengi dengan tumbuhnya jiwa kemandirian dan kepercayaan diri sebagai subyek, ternyata tidak mampu menumbuhkan ketangguhan yang diharapkan. Upaya perubahan atau peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan ternyata sejalan dan bersama-sama dengan upaya perubahan sikap dan perilaku serta pengembangan kepribadian petani. Upaya ke arah itu memang akan sangat efektif bila dilakukan melalui pintu dan jalur pendidikan bagi petani-nelayan secara wajar dan itu adalah penyuluhan pertanian dengan pengertian pendidikan di luar sekolah (non formal) bagi petani-nelayan dan keluarganya. Pertanyaan sekarang, sudahkah ada sistem penyuluhan pertanian atau metoda penyuluhan atau model penyuluhan yang telah didisain untuk memproses ketiga aspek (subyek, mandiri dan tangguh) itu secara paripurna dan tuntas?



Sekolah Lapangan dan Pola P4K Memang Canggih.....? Wow.....Keren!

Temu Profesi Penyuluh Pertanian di Solo tgl.11-13 Juni 1996 dan di Mataram NTB tgl. - Juli 1996 yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian tampaknya sudah mulai mencoba menjajaki aspirasi para penyuluh pertanian untuk membahas *sistem kerja penyuluhan pertanian* sebagai topik bahasan.

Pada kedua pertemuan tersebut dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap sistem kerja LAKU, Sekolah Lapangan PHT, dan Pola P4K, namun tampaknya pertemuan tersebut tidak menghasilkan klarifikasi rumusan yang jelas tentang sistem kerja penyuluhan yang bagaimana yang tepat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak jelas pula apakah dimasukkannya topik SL-PHT dan P4K dalam pertemuan itu berarti secara implisit Pusat Penyuluhan

Dalam SL setiap orang bekerja dan belajar dalam kelompok, bertindak sebagai anggota kelompok serta belajar memiliki keterampilan bekerja secara berkelompok.



Pertanian telah mengkatagorikan Metoda Sekolah Lapangan dan Metoda P4K tersebut sebagai sistem kerja penyuluhan ? Benarkah ?

Sekolah Lapangan PHT atau SL-PHT di Indonesia merupakan salah satu model atau metoda penyuluhan pertanian dengan muatan pesan (*content*) pengendalian hama terpadu ternyata dinilai cukup berhasil oleh berbagai pihak termasuk Badan Dunia seperti FAO dan Bank Dunia dan telah dipublikasikan ke manca negara. Apa Sekolah Lapangan PHT itu ? Sebagai sebuah model atau metoda penyuluhan pertanian yang dianggap berhasil, *ekstensia* telah mencoba menggelarnya melalui tulisan *Russ Dilt* pakar Sekolah Lapangan PHT ini (baca : *ekstensia* Vol.I tahun 1994).

Sekolah Lapangan dalam tahun-tahun terakhir ini semakin marak mewarnai dunia kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga seolah-olah hanya Sekolah Lapangan itulah warna dan isi kegiatan penyuluhan pertanian di tanah . Berbagai program pembangunan pertanian yang memerlukan interaksi dengan petani, semuanya menggunakan pola atau metoda Sekolah Lapangan. Konon katanya, bila penyuluhannya tidak menggunakan metoda Sekolah Lapangan, jangan harap program atau proyek itu akan memperoleh anggaran dari Bappenas.

Berdasarkan *issue* itulah mungkin, mengapa hampir semua program pembangunan pertanian dilaksanakan dengan menggunakan metoda Sekolah Lapangan. Ada SL-DPG, SL-P2RT, SL-Ayam Buras, SL-Kedelai, SL- Agribisnis dan

sederetan SL -SL lainnya, selain SL-PHT itu sendiri yang menjadi cikal bakal nya. Namun bila dicermati rakitan dan kemasan metoda Sekolah Lapangan yang berbagai-bagai itu, ternyata semuanya tidak menunjukkan adanya kesamaan secara metodologis dengan Sekolah Lapangan PHT yang menjadi cikal bakal nya .

Dalam rangka mencermati metoda Sekolah Lapangan bagi keperluan pembahasan sistem kerja penyuluhan pertanian, beberapa hal penting perlu disimak yang menjadi prinsip prinsip metoda Sekolah Lapangan .

Prinsip pertama, *semua orang yang terlibat dalam Sekolah Lapangan masuk menjadi peserta didik atau pelajar*. Artinya di dalam metoda SL tidak dikenal adanya Guru dan Murid, namun semuanya berperan menjadi siswa yang sama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Secara falsafi, prinsip ini mendudukan petani sebagai subyek dan mitra belajar dari penyuluh.

Prinsip kedua, *peserta berinteraksi dengan alat, bahan, garapan usahanya sebagai obyek yang dipelajarinya atau bahan pelajarannya. Alam lingkungan dan usahatannya menjadi "buku" pelajarannya, buku yang tak akan pernah ada habisnya*. Artinya, petani belajar dalam situasi nyata, dalam realita yang dihadapi pada usahatannya secara nyata. Melalui SL, petani belajar bagaimana membaca situasi alamnya, lingkungannya dan usahatannya, serta belajar mengenali kemampuan dirinya dalam berinteraksi dengan



Melalui SL, petani belajar bagaimana membaca situasi alamnya, lingkungannya dan usahatannya

semua unsur yang dihadapinya. Secara falsafi, metoda ini mengemban faham *realisme*, bekerja secara realistik dalam situasi nyata. Prinsip ketiga, *setiap orang bekerja dan belajar dalam kelompok. Setiap orang bertindak sebagai anggota dalam kelompok, dan belajar memiliki keterampilan bekerja secara berkelompok*. Artinya, metoda SL ini berangkat dari situasi nyata yang secara realistik dan pragmatis menghantar petani untuk belajar membangun peningkatan kemampuan berkelompok, membangun ketangguhan mereka untuk bekerjasama dalam usahatannya. Secara falsafi, metoda inipun mengemban faham *pragmatisme*, bekerja dan belajar sesuai dengan kebutuhan petani. Prinsip keempat, *semua kegiatan belajar dialami dan dilakukan oleh semua peserta. Petanilah yang aktif dan bukan penyuluh atau pemandu*. Artinya dengan menerapkan prinsip ini petani belajar menemukan sendiri masalahnya, dan belajar mencari dan memilih upaya pemecahannya

sendiri dalam suasana kerjasama kelompok. Sebuah pendekatan *inovative learning process* yang diterapkan untuk membangun dan mengembang-buahkan kemandirian serta kepercayaan diri para petani.

Russ Dilt menjelaskan bahwa metoda SL merupakan metoda belajar mengajar yang wajar bagi orang dewasa.

Metoda ini menerapkan prinsip prinsip pendidikan orang dewasa secara konsekuen dan konsisten, yakni pendidikan dalam pengertian edukasi atau education yang berasal dari bahasa latin *educare* yang berarti *to lead out*, dalam hal ini penyuluh atau pemandu berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai guru ataupun sebagai nara sumber yang sarat dengan segudang informasi dan ilmu pengetahuan dan lantas menyuapi dan menjejali para petani.

Metoda SL memerankan penyuluh sebagai fasilitator yang menciptakan dan memelihara iklim yang kondusif bagi pembelajaran

petani secara aktif dan tidak/jangan mencuri kesempatan belajar para petani. Prinsip ini kebalikan dari pengertian pendidikan dalam arti *incucare* yakni pola menyemai benih (ilmu pengetahuan dan keterampilan) dengan cara ditanam/dibenamkan (*kalau perlu diinjak*) untuk kemudian nanti akan tumbuh.

Sepintas, metoda Sekolah Lapangan masih sangat relevan dan cukup konsisten dan konsekuen menerapkan falsafah penyuluhan pertanian. Metoda ini telah menggabungkan prinsip dan tujuan penyuluhan pertanian yakni mendudukan petani sebagai subyek yang mandiri dan sekaligus mengembangkan kemampuan petani untuk menjadi tangguh atau ahli di bidangnya.

Dalam SL-PHT, muatan iptek yang diembannya adalah pengendalian hama terpadu, melalui SL-PHT petani belajar menjadi subyek yang mandiri dan ahli. Hasilnya, SL-PHT telah dikibarkan ke mancanegara sebagai salah satu keberhasilan petani Indonesia yang dinilai patut untuk diteladani. Namun demikian, pada metoda SL dengan muatan program-program lainnya belum menampakkan hasil yang setara dengan keberhasilan SL-PHT.

ekstensia kali ini tidak hendak menganalisis Metoda Sekolah Lapangan dengan muatan program-program lainnya, namun sekedar mengungkap Metoda Sekolah Lapangan ini dalam kaitannya dengan Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa secara konseptual metoda SL telah sejalan dan

konsisten mengemban falsafah penyuluhan pertanian, namun apakah metoda Sekolah Lapangan itu dapat dan telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Sistem Kerja penyuluhan pertanian? Sekali lagi, itulah pe-er bagi Pusat Penyuluhan Pertanian, karena masih banyak aspek lainnya yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan metoda Sekolah Lapangan ini menjadi Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian.

Bagaimana pula dengan Pola P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil), yakni pola pembinaan atau pola penyuluhan yang diterapkan oleh Proyek P4K untuk memberdayakan petani-nelayan kecil agar mampu mengakses berbagai peluang ekonomi dan sumberdaya lainnya yang tersedia dalam upayanya mengembangkan usaha mereka secara berkelompok bagi peningkatan pendapatan keluarganya.

Proyek P4K dengan sasaran para petani nelayan kecil yang pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan ini, telah berhasil menampilkan kinerja yang cukup spektakuler. Padahal menurut pengamatan *ekstensia*, mungkin proyek P4K inilah satu-satunya proyek yang tidak ikut latah mengubah nama kegiatan penyuluhannya dengan nama Sekolah Lapangan seperti yang terjadi pada program-program lainnya.

Ditengah maraknya masalah kredit macet, baik yang melanda para konglomerat dengan usaha raksasanya, maupun tunggakan kredit massal program Bimas yang

melanda para petani dan para pengurus KUD dan tidak jarang melibatkan para aparat itu, ternyata kredit yang diakses oleh para petani-nelayan kecil alias miskin ini berjalan sangat mulus dan lancar (lihat : box kinerja P4K). Kalaupun ada tunggakan, maka jumlahnya masih berada di bawah ambang toleransi.

Suatu performansi kinerja yang bukan main, dan bukan main-main, terlebih lagi bila melihat bahwa para pelakunya itu justru para petani-nelayan kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sering diangkat kepermukaan sebagai manusia yang tidak berdaya, ternyata mampu menampilkan dirinya sebagai sosok manusia terhormat, manusia yang bertanggungjawab dan berkemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

ekstensia juga tidak mencoba menelusuri lebih jauh efektifitas keberhasilan Proyek P4K dalam hal peningkatan pendapatan petani-nelayan binaannya, namun satu hal yang dapat diketengahkan di sini adalah keberhasilan pola P4K dalam mengembangkan kemampuan dan semangat petani-nelayan kecil itu untuk terus menjalankan usahanya dengan mengakses peluang kredit yang tersedia secara berkelanjutan dan lancar dalam mengelola hak serta kewajibannya.

Bukankah jalan terbaik untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah muncul dan berkembangnya sikap untuk mau bekerja dan berusaha secara berkelanjutan agar yang bersangkutan mampu menolong dirinya sendiri?

Itulah sebenarnya modal dasar pembangunan yang paling berarti.

Performansi sosok petani-nelayan kecil yang mampu membangun citra dirinya sebagai manusia terhormat, bertanggungjawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya, percaya diri dan memiliki semangat kerja yang berkelanjutan dalam berusaha ternyata telah mampu diwujudkan melalui pola P4K.

Itu berarti bahwa pola P4K telah mampu mewujudkan petani nelayan kecil yang berada di bawah garis kemiskinan ini sebagai subyek yang mandiri, membangun ketangguhan dirinya melalui semangat kerja, semangat berusaha dan semangat kerjasama dalam kelompoknya.

Keragaan Proyek P4K Bulan Juni 1996



1. Penumbuhan KPK	46.307 KPK
2. RUB yang telah disusun KPK	63.704 RUB
3. RUB yang telah direalisasi kreditnya oleh BRI	58.349 RUB
4. Nilai kredit yang diterima KPK	Rp. 83.984.185.000,-
5. Nilai pengambilan kredit	Rp. 58.933.848.896,-
6. Nilai tunggakan	Rp. 2.056.998.080,-
% tunggakan thd realisasi kredit	8,29 %
7. Total Tabungan KPK	Rp. 6.900.005.592,-
Terbagi atas :	
a. Di Bank	Rp. 4.626.660.129,-
Rata-rata/KPK	Rp. 134.975,-
b. Di Kelompok	Rp. 2.273.345.463,-
Rata-rata/KPK	Rp. 110.733,-
8. Jumlah Gabungan KPK	2.785 Gabungan
9. Jumlah anggota KPK yang masuk KUD	70.871 orang

Pola P4K telah mampu menangkis pendapat yang berpandangan bahwa petani miskin itu tidak berkemampuan dan tidak mungkin dapat berindak sebagai subyek karena tidak memiliki sumberdaya. Fakta membuktikan melalui pola P4K, mampu menggali potensi terpendam yang secara fitrahnya senantiasa bersemayam di dalam setiap jiwa seorang manusia yakni berupa keinginan, harapan dan cita-cita untuk hidup lebih baik.

Hal inilah yang mampu digali, dan direspons secara positif oleh pola P4K melalui proses menggali aspirasi, mengolahnya secara wajar dan manusiawi menjadi sebuah

prakarsa yang rasional berupa sebuah perencanaan usaha bersama kelompok yang dipilih dan ditentukan sendiri dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Setelah prakarsa rasional itu tumbuh dalam bentuk sebuah rencana usaha nyata, maka P4K merespons secara positif dengan memberikan peluang kepada para petani kecil untuk mengakses sumberdaya modal yang tidak dimiliki petani melalui kredit dari Bank. Kredit, bukan berupa intervensi *bantuan cuma-cuma atau bantuan bergulir dan sejenisnya*.

7 Prinsip Membina PNK



1. Prinsip Pendekatan Kelompok



2. Prinsip Keserasian



3. Prinsip Kepemimpinan dari PNK



4. Prinsip Pendekatan Kemitraan



5. Prinsip Swadaya



6. Prinsip Belajar Sambil Bekerja



7. Prinsip Pendekatan Keluarga

Hal yang lebih mencengangkan lagi, kredit itu termasuk kredit dengan suku bunga semi komersial dengan nilai bunga 1 % flat rate per bulan (sekitar 22,15 % per tahun), namun para petani-nelayan kecil yang berada di bawah garis kemiskinan itu, ternyata mampu menjangkaunya dan mampu untuk mengembalikannya secara lancar. Apa ora hebat ! Sementara banyak program dan proyek pengentasan kemiskinan yang berorientasi kepada pendekatan pemberian *bantuan* ternyata banyak yang gagal dan menguap atau *bergulir* tak ketahuan rimbanya.

Di mana letak keberhasilannya ? Lagi-lagi karena pola P4K mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar-mengajar orang dewasa dan sejalan dengan falsafah penyuluhan secara konsekuen dan konsisten di dalam setiap tahapan kegiatan pembinaannya. Program P4K terdiri dari adanya *misi* : *peningkatan pendapatan petani-nelayan kecil melalui pengembangan kemauan dan kemampuan untuk mengakses fasilitas dan kemudahan pembangunan yang tersedia.*

Sebagai sebuah program yang baik, maka P4K memiliki *metoda* untuk mencapai sasaran program secara bertahap dan terukur. *Metoda* adalah rangkaian kegiatan yang telah tersusun dalam tahapan-tahapan kegiatan yang terukur sebagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan program yang ditetapkan. Dalam pola P4K, *metoda* tersebut adalah 15 Langkah Penumbuhan dan Pembinaan Kelompok Petani Nelayan Kecil yang secara konsekuen dan konsisten menerapkan 7 Prinsip

penjabaran falsafah penyuluhan pertanian kita (lihat : Box P4K). Inilah kunci keberhasilan pola P4K dalam upaya memberdayakan petani-nelayan kecil menjadi sosok manusia yang subyek dan mandiri dalam membangun kemampuannya untuk menjadi manusia tangguh.

Sepintas, mungkin terlintas dalam pikiran kita : "ah, teori...!" begitulah kira-kira. Pengamatan *ekstensia*, sering menemukan bahwa terjadinya kasus-kasus kelompok petani-nelayan kecil (KPK) yang bermasalah yakni yang mengalami tunggakan angsuran kredit atau kegagalan dalam usahanya, sudah dapat dipastikan pada umumnya merupakan akibat dari ketidak taat azasan penyuluh pembinanya dalam menerapkan metoda 15 langkah dan 7 prinsip di atas. Anda tidak percaya, silahkan mencermatinya!

Seperti halnya Sekolah Lapangan PHT, maka pola P4K sebagai sebuah model dan metoda penyuluhan pertanian ternyata telah mampu membuktikan keampuhannya dalam upaya memberdayakan para peserta didiknya. Kedua model atau metoda penyuluhan ini telah cukup berhasil dan teruji keampuhannya sebagai sebuah metoda pemberdayaan petani dengan pola pengembangan secara induktif dan dalam konteks muatan teknologi yang bersifat partial dan sangat spesifik.

Namun demikian rasanya terlalu pagi dan terlalu gegabah bila dengan secara serta merta langsung bisa mendudukkan kedua metoda ini cocok dan tepat untuk ditetapkan sebagai sistem kerja penyuluhan pertanian secara umum dan menyeluruh.

Mengangkat Metode SL dan atau P4K sebagai Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian ?

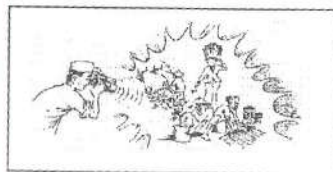
Sebagai sistem kerja, tentu ia harus bisa *“link and match”* dengan berbagai sub sistem lainnya dalam penyuluhan pertanian. Sebagai sebuah sistem kerja, maka SL dan atau Pola P4K harus terkait dan berfungsi akses dan kontrol terhadap seluruh sub sistem dalam penyuluhan pertanian seperti misalnya terhadap sub sistem pengembangan karier dan profesionalisme penyuluh

pertanian serta sistem angka kreditnya, dengan tatanan kelembagaan dan tatanan wilayah kerja penyuluhan pertanian, dengan upaya pencapaian tujuan penyuluhan pertanian dan tujuan program - program pembangunan, dengan proses penggalan dan pengolahan aspirasi dan kebutuhan petani-nelayan, dengan penerapan azas desentralisasi yang mengandung berbagai keragaan wilayah, agroekosistem, sosial budaya, dan infrastruktur yang beraneka, dengan.....sederetan *“dengan”* lainnya.

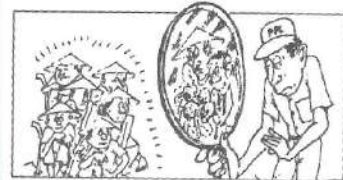
15 Langkah Penumbuhan dan Pembinaan Kelompok Petani-Nelayan Kecil



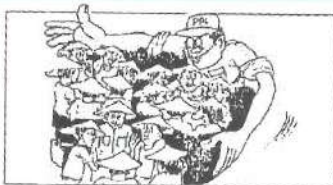
1. Identifikasi Lokasi Binaan dan Potensi Sumberdayanya



2. Identifikasi Usaha-usaha Ekonomi Skala Kecil



3. Identifikasi PNK (M2)



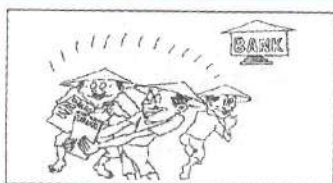
4. Mendorong dan Membimbing PNK Membentuk Kelompok



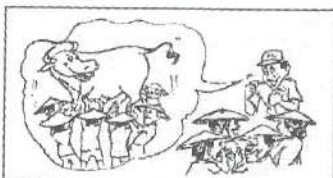
5. Survei Rumah Tangga Anggota KPK



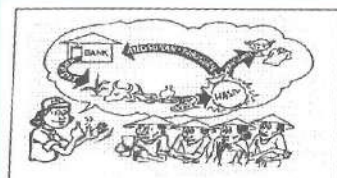
6. Bimbingan Penyusunan RUB



7. Bimbingan Menabung dan Mendapatkan Kredit



8. Bimbingan Pelaksanaan Usaha Bersama



9. Bimbingan Menabung dan Pengembalian Kredit

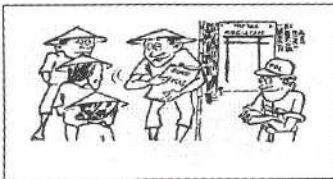
Selain itu, sistem kerja-pun harus senantiasa konsekuen dan konsisten dengan falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian kita, ia-pun harus sekaligus mampu berperan sebagai sarana untuk mengantisipasi tantangan masa depan dengan era globalisasi dan era agribisnisnya.

Ternyata bukan sebuah garapan yang sederhana memang, namun inilah tuntutan masa kini. Menyusun sistem kerja penyuluhan pertanian adalah proses menata interaksi berbagai sub sistem dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta sinergis dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Karenanya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk segera menyusunnya agar tidak bertambah kompleks akibat masa transisi atau masa stagnasi yang terlampau lama

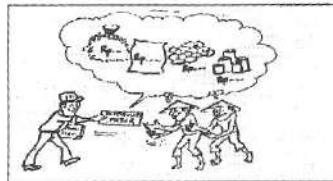
di dunia penyuluhan pertanian sekarang ini. Mengapa hal ini menjadi penting ?

Di dalam Petunjuk Pelaksanaan SKB. Mendagri Mentan No.54 Tahun 1996 dan No.301/Kpts/LP.120/4/96 ada penjelasan mengenai Sistem Kerja dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang menyatakan bahwa : *Penyuluh Pertanian pada berbagai tingkat wilayah administratif dalam melakukan penyuluhan pertanian dapat menerapkan sistem kerja LAKU, Sekolah Lapangan (SL) maupun sistem kerja lain serta kombinasinya sesuai dengan kondisi dan situasi sosial ekonomi petani-nelayan di wilayah yang bersangkutan.*

(Bab. VI.A.1.) Isi butir di atas ternyata belum memberikan klarifikasi yang jelas dan tegas tentang *bagaimana cara memilih*



10. Bimbingan Pencatatan dan Pembukuan Keuangan Kelompok



11. Bimbingan Pemasaran



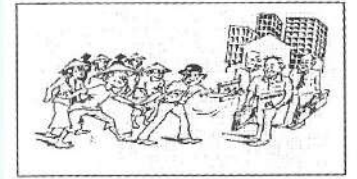
12. Bimbingan Pemupukan Modal dan Penggunaannya



13. Bimbingan Penggunaan Waktu dan Uang Secara Tepat



14. Bimbingan Kerjasama Antar Kelompok dan Perkoperasian



15. Bimbingan untuk Mendapat Pembinaan dari Lembaga/Instansi Lain

dan menetapkan sistem kerja yang sesuai dengan kondisi dan situasi sosial ekonomi petani-nelayan di wilayah yang bersangkutan seperti tertera dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut. Selain itu, Petunjuk Pelaksanaan inipun tidak/belum menjelaskan mengenai apa itu : sistem kerja LAKU, Sekolah Lapangan dan Sistem Kerja lainnya itu. Sistem kerja LAKU yang mana, Sekolah Lapangan yang mana dan Sistem Kerja Yang Lain yang mana yang dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut ?

Dalam kenyataannya di lapangan ternyata belum seluruh pelaku penyuluhan pertanian mampu memahami dengan benar dan belum mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian, falsafah, dan metodologi setiap jenis dari apa yang dinamakan "sistem kerja" dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut. Salah satu bukti masih terdapatnya kesimpangsiuran pengertian, falsafah dan metodologi terhadap metoda Sekolah Lapangan ini misalnya, ialah dengan merebaknya kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian (penyuluhan program-program pembangunan pertanian) dengan nama Sekolah Lapangan, namun bila disimak dengan lebih seksama ternyata kebanyakannya hanya sama dalam nama saja, namun isi, jiwa, dan proses metodologisnya tidak/belum mencerminkan adanya penerapan prinsip-prinsip metoda Sekolah Lapangan seperti yang dianut dan diterapkan dalam SL-PHT. Uraian dan analisis ekstensia terhadap LAKU, SL dan Pola P4K di atas dimaksudkan untuk sekedar menebar informasi bahwa proses memilih dan menetapkan Sistem

Kerja Penyuluhan Pertanian, bukan sekedar proses memilih kucing dalam karung. *bukaaan...basa basi* seperti iklan di tivi.

Hal lain yang masih harus dijelaskan lebih lanjut ialah pernyataan : *Penyuluh Pertanian pada berbagai tingkat wilayah administratif dalam melakukan penyuluhan pertanian dapat menerapkan sistem kerja LAKU, Sekolah Lapangan...dstnya (Bab.VI.A.1.)*. Apakah Penyuluh Pertanian yang berada di tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional/Pusat semuanya melakukan sistem kerja LAKU atau SL ? Bukankah LAKU atau SL itu dilakukan di tingkat lapangan (tingkat BPP/Kecamatan, Desa dan di tingkat Kelompoktani) ? Untuk menghilangkan kerancuan itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut.

Butir A2 dalam Bab VI pada Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan bahwa : *Sistem kerja Penyuluh Pertanian dalam satu wilayah kecamatan didasarkan atas prinsip satu kesatuan tim Penyuluh Pertanian yang melayani seluruh program pembangunan pertanian dan aspirasi pengembangan usaha petani-nelayan di wilayah kecamatan*. Pengertian prinsip satu kesatuan tim Penyuluh Pertanian dalam petunjuk ini ternyata masih perlu penjelasan lebih lanjut, karena di Daerah ternyata masih terdapat berbagai persepsi yang berbeda. Kepala Sub Dinas Penyuluhan Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB dengan nada kocak namun tajam dan dalam bentuk kritik yang cukup menyengat, mengungkapkan persepsinya bahwa *sangat ironis sekali bila*

ditengah marak-maraknya berbagai program dan institusi yang justru makin menukik masuk ke desa, seperti ABRI masuk desa dengan AMD-nya, Koran Masuk Desa, Hakim Masuk Desa, sampai-sampai Lidya Kandau Masuk Desa, tapi penyuluhan pertanian yang sejak dulu memang sudah berakar di desa justru menarik/mencerabut para penyuluhnya ke BPP atau ke kecamatan. Dari pernyataannya, jelas bahwa prinsip satu kesatuan tim Penyuluh Pertanian diartikan para penyuluhnya ditarik dari wkpp dan semuanya berkantor di BPP. Persepsi ini tumbuh karena didukung oleh isi butir B pada Bab VI yang menyatakan : Wilayah kerja Penyuluh Pertanian di tingkat wilayah kerja BPP mencakup satu wilayah Kecamatan.....dst-nya. Hal senada dilontarkan pula oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Jayapura di Irian Jaya, yang menyatakan bahwa pemberlakuan sistem wilayah kerja penyuluhan pertanian (wkpp) di wilayah provinsi Irian Jaya masih sangat relevan, di mana penyuluh harus tinggal di wkpp-nya agar dapat lebih menjalin keakraban dengan para petani-nelayannya. Budaya masyarakat Irian Jaya yang terdiri dari berbagai suku, dan bahasa yang berbeda menuntut komunikasi interpersonal dengan intensitas yang tinggi,

karenanya sistem wkpp masih sangat relevan untuk Irian Jaya. Namun demikian, pengaturan wkpp dengan 16 wilkel (wilayah kelompok)-nya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur setempat, dan luas wilayah kecamatan di Irian Jaya pada umumnya sangat luas dan berbeda dengan kecamatan di P. Jawa.

Tuntutan yang mendesak sekarang adalah bagaimana berbagai alternatif sistem kerja seperti yang telah termuat dalam Petunjuk Pelaksanaan SKB Mendagri-Mentan 1996 dapat secara operasional diterapkan, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kondisi dan situasi yang bagaimana yang menjamin bahwa sistem kerja yang digunakan efektif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian .

Pusat Penyuluhan Pertanian selaku pembina teknis para penyelenggara penyuluhan pertanian di Daerah seyogyanya dapat segera melakukan langkah-langkah anti-sipasi untuk menghindarkan bias akibat masih adanya sesuatu yang masih kurang jelas seperti diuraikan di atas, tentu harus sampai tuntas.

(zet,rm,ht)

SISTEM KERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Herman Soewardi *)

Pembelajaran vs Perekayasaan, dilema penyuluhan pertanian

Partisipasi saya dengan Departemen Pertanian adalah sejak permulaan program Bimas Nasional yang disempurnakan dilancarkan. Program tersebut dibentuk berlandaskan teori Mosher *The Progressive Rural Structure* (1969), yang pada hakekatnya berupa upaya untuk menciptakan struktur progresif masyarakat pedesaan sehingga dengan demikian proses pembangunan pertanian, yang pada dasarnya harus dilaksanakan oleh para petani di dalam masyarakat pedesaan, dapat berjalan. Adapun esensi teori itu adalah mewujudkan kelembagaan-kelembagaan yang progresif-modern yang keseluruhannya berfungsi memasukkan input dari kota ke desa, dan mengeluarkan output dari desa ke kota, yang kesemuanya itu diperuntukkan bagi petani yang harus dilecut dengan berbagai insentif/keuntungan. Di dalam program Bimas kelembagaan-kelembagaan itu ada empat macam, maka disebut "catur sarana", yang beroperasi secara terpadu di setiap *locality*. Di dalam program Bimas *locality* itu disebut "unit-desa".

Salah satu dari empat kelembagaan itu adalah penyuluhan pertanian. Fungsinya adalah melakukan proses pembelajaran kepada petani, yang ditujukan untuk mencapai : *better farming, better business* dan *better living*. Dengan demikian maka inti dari pembelajaran itu merupakan perubahan perilaku (*changing behavior*), yang dibalik perubahan perilaku adalah berubahnya kepribadian petani menjadi petani mandiri. Kemampuan-petani adalah *self-help*. Karena itu pembelajaran penyuluhan pertanian bermotto : *help people help themselves*.

Demikianlah dasar-dasar falsafah dan teori penyuluhan, yang juga dianut di negeri kita sejak dulu. Namun sejarah pembangunan negara kita berjalan lain. Sejak Pelita I dimulai, pembangunan sektor pertanian dijadikan sebagai primadona.

Investasi-investasi di sektor pertanian terjadi sangat pasif, seperti pengirigasian. Petani adalah andalan utama suksesnya pembangunan pertanian ini. Karena itu para petani adalah penyumbang utama terhadap terjadinya pembangunan yang menyeluruh di segala bidang. Pangan utama (seperti beras) harus dihasilkan dalam jumlah yang

*) Gurubesar Unpad Bidang Sosiologi dan Filsafat Ilmu

cukup dan dengan harga yang terjangkau. Dan terlebih-lebih semua itu harus dijelmakan dalam waktu yang cepat.

Maka kita bertanya : dengan cara apakah kita dapat mencapai itu semua (dalam waktu yang cepat itu) ? Tak lain jalannya adalah PEREKAYASAAN (*engineering*). Petani, usahatani dan masyarakat desa harus di rekayasa, karena inilah tulang punggung pembangunan. Catur sarana, sebagai penjelmaan dari struktur progresif masyarakat desa, perlu dibuat menjadi *intact* dalam waktu yang cepat.

Dalam **nesesitas** (= keharusan) pembangunan seperti ini, “penyuluhan pertanian” mau tidak mau harus berubah menjadi “perekayasa pertanian”. Dalam suasana begini kemandirian petani tidak diperlukan, melainkan kepatuhan petani. Mereka harus dijadikan “prajurit-prajurit yang patuh yang selalu siap menunggu perintah dan melaksanakannya”, *at any time*

and at any place. Hasilnya pun hebat sekali. Dalam tahun 1984, yaitu setelah pembangunan pertanian berjalan selama 15 tahun (1969-1984), swasembada beras tercapai. Untuk itu Indonesia memperoleh “acungan jempol” dari seluruh dunia.

“Perekayasaan” adalah penyimpangan dari falsafah, asas, teori dan praktek penyuluhan. Apakah perekayasaan itu akan berjalan terus di negara kita ini, ataukah dalam PJP II ini kita perlu memikirkan cara lain untuk memotivasi dan mengorganisir para petani ? Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Petani Yang Bagaimanakah Yang Kita Inginkan ?

Masa PJP I kini sudah lalu. Masa itu merupakan suatu kurun waktu yang luar biasa dalam sejarah penyuluhan pertanian kita, karena dalam masa inilah kita berhasil meyakinkan dunia, termasuk dunia ilmiah,



bahwa negara kita, dari negara pengimpor beras terbesar telah berubah menjadi negara yang bisa mencukupi kebutuhan berasnya sendiri. Namun, hal yang sangat bagus itu, bila ditinjau dari segi penyuluhan, merupakan penyimpangan dari asas-asas penyuluhan sebagai suatu proses pembelajaran. Kita sangat maklum bahwa dalam masa yang sudah lalu itu kita terpaksa menyimpang, namun kita juga maklum bahwa kita tidak boleh menyimpang terus-menerus. Karena kita yakin bahwa penyimpangan itu akhirnya akan berbalik merugikan diri kita sendiri.

Kini kita sudah meninggalkan PJP I dan memasuki PJP II. Demikian pula dalam hal praktek-praktek penyuluhan : kita harus meninggalkan “perekayasaan” dan kembali ke penyuluhan berlandaskan pada asas-asas pembelajaran. Untuk itu Bapak Salmon Padmanagara, pakar penyuluhan kita, telah menggambarannya dalam tulisannya berjudul “Pendidikan Pertanian Untuk Petani”(ekstensi Vol.3, Tahun II, Feb. 1996) dengan pandangan-pandangannya yang sangat mendasar. Ia mengatakan : “Sikap terhadap petani seperti yang digambarkan terdahulu, menimbulkan sikap petani mengenai diri sendiri sebagai yang patuh bagi program-program dan pembinaan-pembinaan dari “atas”. Yang demikian itu jauh dari yang diinginkan sejak lama, yaitu petani yang mandiri dan tanggung, petani sebagai subyek, bukan obyek”. Yang selanjutnya dijabarkan lagi : “..... *petani mandiri, tanggung, dan subyek (adalah) petani hari esok; petani kemarin adalah petani dari budaya dan masyarakat kemarin atau lama yang mulai ditinggalkan; petani hari ini adalah petani dari budaya dan masyarakat sekarang atau masa kini*”. Dan selanjutnya : “model kemarin tinggal sisa; model sekarang adalah mayoritas; model esok sudah muncul”.

Gambaran itu sangat jitu, kita tidak perlu menyangsikan kebenarannya. Dan kitapun sangat menyetujui tentang model petani hari esok, yang mandiri, tanggung, dan subyek. Inilah tujuan dari sistem kerja penyuluhan dalam era baru ini. Itulah yang harus diwujudkan sebagai hasil sistem kerja penyuluhan sekarang.

Setelah jelas tujuan apa yang harus kita capai, maka dengan mudah kita jabarkan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Untuk keperluan ini perlu diuraikan dua landasan pokok, ialah landasan ilmiah dan landasan operasional dari sistem kerja penyuluhan itu. Uraian selanjutnya dari makalah ini adalah tentang kedua landasan pokok itu, ialah landasan ilmiah dan landasan operaional.

Landasan Ilmiah Sistem Kerja Penyuluhan

Tujuan dari sistem kerja penyuluhan, sebagaimana telah dirumuskan dimuka adalah timbulnya kepribadian petani yang bersifat mandiri, tanggung, dan subyek. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa kepribadian petani sekarang adalah belum mandiri, belum tanggung, dan belum subyek. Ini, menurut hemat saya, bukan sekedar sikap kita terhadap petani, akan tetapi dalam realitanya memang demikian. Benar bahwa ada petani-petani sekarang yang bersifat mandiri, tanggung, dan subyek, namun jumlahnya hanya sedikit. Dalam disertasi saya (terbit 1972), petani yang demikian itu hanya berjumlah 1/3 dari masyarakat desa, sedangkan sisanya yang 2/3 itu menunjukkan sifat-sifat belum mandiri, belum tanggung, dan belum subyek.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mayoritas dari petani-petani kita itu bersifat demikian. Hal ini tak lain karena kultur kita bersifat :*soft culture*, atau

budaya lunak, santai, atau “cuek”. Sehingga mayoritas anggota kebudayaan itu pun bersifat begitu. Ini disebut *type B personality* yang bersifat *relaxed and unhurried* (Mc Clelland). Kebalikannya adalah *type A personality* yang bersifat *agility and restless*.

Baiklah kita perinci sifat-sifat budaya santai/cuek beserta kepribadian yang bersemayam di dalam budaya itu: (1) tidak ada orientasi ke depan; (2) tidak ada *growth philosophy* atau keyakinan bahwa hari esok dapat dibuat lebih cerah dari pada hari ini; (3) cepat menyerah atau cuek. Sifat inilah yang disebut “tidak tawakal” atau tidak ada sifat *strive for excellence*; (4) *retreatism* atau berpaling ke akhirat; dan (5) inertia atau lamban. Dari kelima sifat itu tentunya sudah banyak perubahan, kecuali nomor tiga, ialah cepat menyerah atau tidak adanya *strive for excellence* itu. Baiklah kita tinjau sifat ini secara seksama, karena sifat inilah yang mengkarakterisir budaya tersebut.

Sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat kita bahwa bila kita melaksanakan suatu pekerjaan, pekerjaan apa pun, kebanyakan diantara kita melaksanakannya “asal saja”. Kita segera merasa puas bila pekerjaan itu selesai dilaksanakan tanpa melihat bagaimana hasilnya. Semua pelaksanaan pekerjaan harus “dimandori”, karena bila tidak, tipis harapan kita bahwa hasil pekerjaan akan baik. Pengalaman saya adalah di dalam melakukan survai-survai. Bila tidak disupervisi, kuesioner akan diisi asal terisi saja. Maka banyak jawaban-jawaban dari responden yang kontradiktif dari satu bab ke bab lain. Sulit kita mencari pekerja yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Semua pekerjaan dilaksanakan dengan “rutinitas”, dan dengan irama kerja yang tidak meningkat. Kebalikan dari rutinitas

adalah inovatif, atau selalu ada pembaharuan/penyempurnaan. Demikian pula para petani kita. Bila dikebun-kebun percobaan dan di lahan kontak tani tercapai hasil padi/ha 80 qt, mereka sudah merasa puas bila mereka dapat mencapai hasil setengahnya saja. Apa lagi tanaman-tanaman lain : mereka lakukan itu secara “ceb-cul”. Bila sudah “nanceb”, “cul” mereka pergi. Inilah sifat “asal saja”. Semuanya dilakukan “serba asal”. Salya adalah “asal aya” (aya = ada); Saldi adalah “asal jadi”, dan Salmon adalah “asal montok” (demikianlah kelakar Bapak Yahod Sumabrata).

Selanjutnya marilah kita tinjau tidak mandiri, tidak tangguh, dan tidak subyek secara kultural.

a. Tidak Mandiri

Kultur kita tidak menghendaki kemandirian, namun sebaliknya, ialah ketergantungan. Hal ini diterapkan sejak kecil, dengan pola asuh (sosialisasi). Lihatlah hubungan orang tua-anak di dalam pola asuh kita. Anak-anak kita, kita didik supaya diam dan nurut. Anak yang banyak geraknya disebut memusingkan, berlainan dengan pola asuh Barat. Ketika saya bersekolah di A.S., dalam pertemuan berserta dosen-dosen yang membawa anak-anak mereka, saya tarik kesimpulan bahwa anak-anak mereka bersifat “belegug” untuk ukuran kita. Saya terheran-heran melihat mereka begitu “berani” terhadap orang tuanya. Mereka tidak bisa dilarang : selalu berbuat atas kehendaknya. Mereka tidak mau diam dan tidak bisa nurut kepada orang tua. Dan sebaliknya, orang tua tidak menolong bila mereka jatuh. Dibiarkannya agar mereka bisa berdiri kembali dengan kekuatannya. Bagaimana pola asuh kita ? Kita di didik agar anak-anak diam. Tidak lari kesana-

kemari, dan harus bersifat “sungkan”, kepada orang tuanya dan kepada kolega orang tuanya. Mereka tidak boleh mengutarakan pendapat, bila begitu mereka dikatakan “melawan” atau “membangkang” orang tua. Anak yang tidak beropini dan yang selalu mengatakan “ya”, nurut perintah dianugerahi dengan permen, coklat, dan disebut “anak yang manis”, anak yang pintar”, dan sebagainya. Demikian pula bila anak jatuh, dengan segera orang tua datang untuk membangunkannya. Dengan singkat dapat kita katakan bahwa pola asuh kita adalah pola ketergantungan, atau kebalikannya dari kemandirian. Ketika anak menjadi dewasa, ia tidak memiliki kepribadian. Ia selalu ingin ditolong, dan tidak pernah berprakarsa. Beropini sulit baginya, dan berprakarsa adalah besar risikonya. Seseorang yang gagal meraih hasil dari prakarsanya “diganjar” dengan ucapan : “mampus luh, berani-berani menyimpang dari kebiasaan”. Karena itu pada umumnya orang-orang kita tidak berpribadi. Dirinya adalah *nothing*, dan dia tidak pernah merasa bangga akan dirinya, melainkan dia selalu menyombongkan bahwa dirinya adalah “anak buah”, “begundal”, atau “keturunan” si Anu. Dalam hal ini orang Sunda selalu ingin disebut “keturunan raja Pajajaran”.

b. Tidak Tangguh

Ketidak-mandirian erat berkaitan dengan ketidak-tanggihan. Maka orang yang tidak mandiri atau tergantung jelas tidak memiliki ketanggihan. Apakah ketanggihan itu ? Ialah tidak cepat menyerah. Baiklah kita bandingkan antara Jepang dan kita. Jepang menganut “semangat Bushido”, ialah ketanggihan ikan Bushido untuk naik ke atas curugan. Ia

gagal 5 atau 6 kali, namun ke 7 kalinya ia berhasil. Ikan Bushido sangat tangguh, atau sangat *tenacious*. Masyarakat kita menunjukkan sifat-sifat kebalikannya. Dalam dua kali mencoba bila gagal, terus mengundurkan diri, seperti dalam peribahasa : “jatuh dihimpit tangga”, “keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya”, dan dalam bahasa Sunda, “katurug katutuh”. Semua itu hanya dua kali mencoba dan terus berhenti. Orang Jepang mengatakan peribahasa mulut harimau dan mulut buaya itu dengan versi yang lain dari kita : “keluar dari mulut Harimau sambil membawa taring harimau, dan masuk ke dalam mulut buaya, agar kelak keluarnya membawa kulit buaya”. Inilah sebabnya negara kita yang sarat akan sumber daya alam burutang kepada Jepang hampir US\$ 100 miliar, padahal negara Jepang sangat miskin dengan sumber daya alam.

Sebenarnya agama memerintahkan kepada umatnya agar sabar dan tawakal. Orang kita cukup sabar akan tetapi tidak tawakal. Tidak tawakal. Tidak tawakal artinya cepat menyerah, atau tidak lulus ujian.

c. Tidak Subyek

Hal ini menurut pendapat saya adalah akibat dari tidak mandiri dan tidak tangguh. Pemerintah memperlakukan petani sebagai obyek karena mereka itu tidak mandiri dan tidak tangguh. Bila mereka itu mandiri dan tangguh, mereka tidak perlu diperintah untuk maju, seperti para petani Korea Selatan atau Taiwan.

Maka sifat-sifat petani kita yang tidak mandiri, tidak tangguh, dan tidak subyek adalah sifat-sifat kultural yang sangat mendasar. Semuanya itu berpusat pada pola asuh atau sosialisasi, dari sejak kanak-kanak

sampai dewasa. Pola asuh tak lain adalah pembelajaran, dan penyuluhan pertanianpun merupakan pembelajaran, ialah pembelajaran luar sekolah dan diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mencapai kedewasaan. Maka dari segi inilah kita harus meneropong penyuluhan pertanian. Atau menumbuhkan kepribadian, ialah suatu kepribadian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian : mandiri, tangguh, dan subyek.

Karena itu teori keilmiah penyuluhan pertanian perlu ditinjau kembali secara seksama. Dalam hal ini saya mengajukan suatu gagasan, ialah disamping penyuluhan pertanian berupaya untuk menimbulkan *changing behavior*, untuk negara seperti kita yang didominasi oleh *soft culture*, perlu juga diupayakan *changing personality* atau perubahan kepribadian. Baiklah kita tinjau kedua perubahan itu di kalangan para petani.

a. Perubahan Keperilakuan (*Changing Behavior*)

Bagi mereka yang mengikuti kuliah penyuluhan pertanian, mereka tidak asing dengan buku Rogers *Modernization among Peasants* (1969). Ini adalah teori perubahan berperilaku yang dilandaskan pada teori komunikasi S-M-C-R-E (yang disebut oleh Bapak Hanan Hardjasmita almarhum sebagai teori "es em cre"). S adalah *source*, M adalah *message*, C adalah *channel*, R adalah *receiver*, dan E adalah *effect*. Suatu sumber memancarkan pesan melalui suatu media, yang ditangkap oleh seorang penerima yang akhirnya menimbulkan suatu efek, ialah perubahan berperilaku yang kita harapkan. Sedangkan proses perubahan berperilaku itu digambarkan sebagai : *awareness, attitude, interest, trial, evalu-*

ation, dan akhirnya *adoption* atau sebaliknya *rejection* (penolakan).

Apa yang dicapai oleh proses komunikasi ini ? Hanya perubahan kelakuan saja, atau tegasnya *practices*, seperti adopsi terhadap praktek-praktek pancausaha. Adapun kepribadian penerima (*receiver*) tidak dipengaruhi : suatu "type B personality" tetap type B personality".

b. Perubahan Kepribadian

Mula-mula secara faktual saya mendapati bahwa dalam penelitian untuk disertasi saya, saya memperoleh petani dengan kepribadian "type A" dan "type B". Yang pertama saya sebut "lapisan atas" dan yang kedua "lapisan bawah". Lapisan atas adalah 1/3 dari masyarakat desa sedangkan lapisan bawah adalah mayoritas, ialah 2/3 dari masyarakat desa. Ternyata lapisan bawah bisa berubah keperilakuannya (dari non-pancausaha menjadi pancausaha), tetapi kepribadiannya tetap (type B personality), dengan sifat-sifat : partisipasi sosial yang bersifat horizontal, cara mempergunakan kekayaan yang boros kurang memiliki daya sliira terhadap unsur-unsur modern, lemahnya daya tepa sliira terhadap unsur-unsur modern, lemahnya daya dorong keberhasilan (*achivement motivation*), tidak memiliki kegairahan untuk menguasai masa depan, dan tidak berkemampuan interpretasi (opini) secara mandiri. Demikian pula dalam disertasi-disertasi berikutnya yang saya bimbing (lihat Dudung A. Adjid, 1985; Rusidi, 1989; dan Wardi Bachtiar, 1996). Maka hal inilah, perubahan kepribadian para petani kita, yang harus diupayakan dalam penyuluhan pertanian hari sekarang dan esok.

Maka kedua tugas penyuluhan ini, bila digambarkan, akan terlihat seperti pada

gambar di bawah ini.

Sifat Kotak (A): "tidak perlu diperintahkan untuk maju".

Sifat Kotak (B): "tunggu perintah untuk maju".

Sifat Kotak (C): "diperintahpun tidak mau maju".

Tugas penyuluhan pertanian adalah mengalihkan kotak (C) ke kotak (A), tentunya dengan *special efforts*, khususnya upaya meningkatkan etos kerja "kucing" menjadi "macan". Dalam hal ini diperlukan AMT (*Achievement Motivation Training*) dari Mc Clelland yang dikombinasikan dengan moralitas keagamaan (lihat tulisan saya "Pesantren dan Ulama sebagai Mitra Penyuluhan").

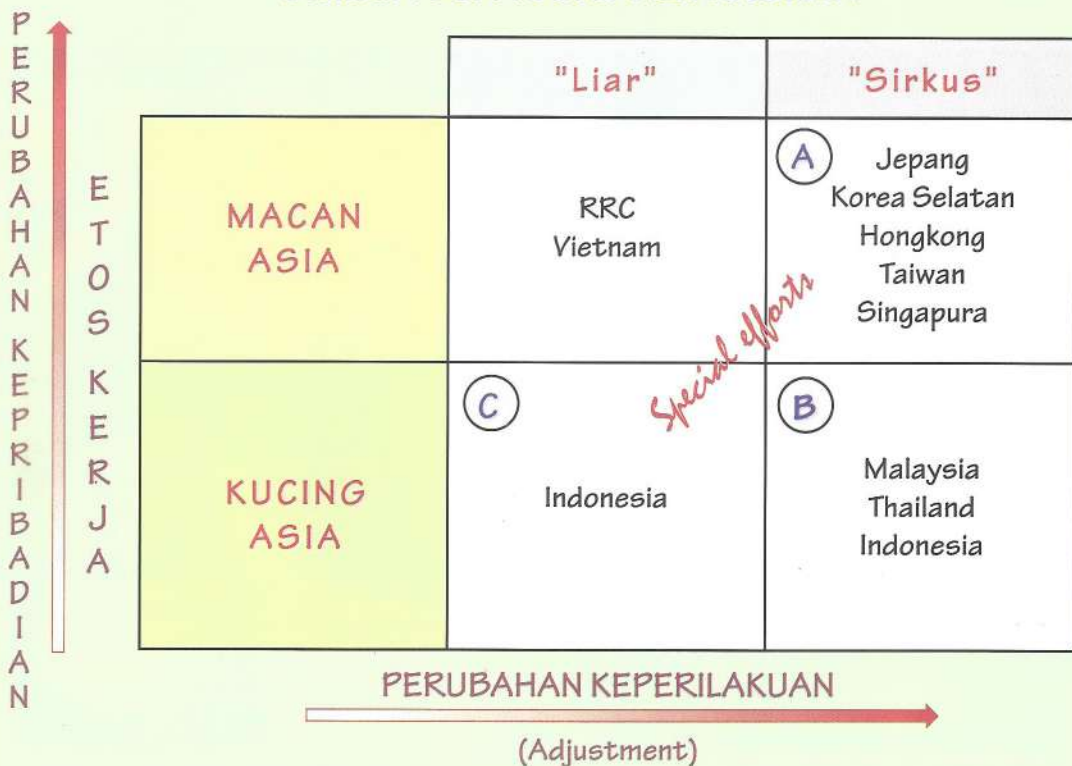
Landasan Operasional

Bagian ini akan saya kupas sepintas lalu saja, karena ini merupakan bidang para pakar penyuluhan, sedangkan saya berkecimpung dibidang sosiologi pedesaan. Maka banyak hal yang tidak saya kuasai.

Kedudukan Sistem Kerja Penyuluhan Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

Sistem Kerja Penyuluhan adalah INTI dari penyelenggaraan penyuluhan. Sistem ini ditempati oleh para penyuluh pertanian. Mereka disebut "pejabat fungsional". Emolumen yang mereka terima jauh lebih rendah dari pada "pejabat struktural". Nasib mereka perlu diperbaiki, karena merekalah sesungguhnya yang disebut ujung tombak pembangunan pertanian.

Gambar : DUA TUGAS PENYULUHAN



Interaksi fungsional “tripartit” Penelitian, Penyuluh, dan Petani

Yang ingin saya kemukakan disini adalah bahwa sesungguhnya para petanipun (“lapisan atas”) bisa pula bertindak sebagai penyuluh maupun peneliti. Di Kanada, 40% tulisan dalam jurnal pertanian ditulis oleh para petani. Hal ini pun juga perlu menjadi kebiasaan di negara kita.

Desentralisasi Dalam Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian

Desentralisasi adalah kebalikan dari “sablon” atau “cetak biru” (dari atas). Dengan adanya desentralisasi maka setiap BIPP merencanakan pelaksanaan kerja penyuluhan pertanian, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi setempat. Kini tiada lagi “sablonan” dari atas, dan semua pelaksana penyuluhan pertanian tidak perlu menunggu “juklak”. Kata sinyoh Belanda : “beuk maar”

Mengantisipasi Tantangan Masa Depan

Para pakar ekonomi meramalkan bahwa seluruh Asia akan meningkatkan impor pertaniannya, termasuk beras. Demikian pula Indonesia. Semua komoditi pertanian yang mewah akan meningkat impornya secara drastis : terigu, susu, daging, buah-buahan dan sayuran. Inilah tantangan bagi kita. Kelestarian ekologi perlu dijaga.

Perangkat Yang Diperlukan

Yang sekarang berada dalam keadaan minim adalah perangkat penelitian yang bersifat lokal. Inilah yang perlu ditingkatkan, disamping tentunya mobilitas para penyuluh.

Tolak Ukur Keberhasilan

Saya hanya melihat tiga hal yang terpenting : **kemandirian**, **unggulan**, dan **kesubyekan**. Ini memerlukan penjabaran yang bersifat sosio - kultural - psikologis.



Pendekatan Penyuluhan Pertanian

Oleh : Dr. Ir. Soemitro Arintadisastra, M.Ed.

Penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya agar mereka dapat:

- a) berusaha tani lebih baik
- b) berusaha tani lebih menguntungkan "better bussines"
- c) hidup lebih sejahtera
- d) mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersahabat.

Berarti materi penyuluhan yang diajukan kepada petani bukan hanya masalah ilmu dan teknologi saja, akan tetapi termasuk perubahan sikap, cara hidup, dan kemampuan berusaha yang lebih menguntungkan.

Yang menjadi perhatian dalam penyuluhan pertanian bukan hanya kegiatan produksi saja, akan tetapi mencakup agribisnis dan agroindustri, usaha rumah tangga dan pedesaan, termasuk hidup sehat dan makanan sehat dan bergizi.

Pendekatan Individual

Penyuluhan pertanian secara ilmiahnya menitikberatkan kepada pendekatan "individual". Pendekatan ini memang efektif akan tetapi kurang cepat dan kurang efisien.

Pendekatan Kelompok Tani

Mengingat jumlah petani yang perlu ditingkatkan pengetahuannya, ilmu, keterampilan serta sikapnya sangat banyak, di Jawa seorang PPL/ perlu membina lebih dari 1.600 keluarga, maka pendekatan individual dengan "olie vlek" terlalu lama dan relatif mahal. Karena itu dikembangkan "pendekatan kelompok tani". Pendekatan kelompok ini sebenarnya merupakan pendekatan "Community Development".

Penyuluhan pertanian yang intensif dimulai pada petani padi, yang menanam di lahan beririgasi, ternyata pendekatan kelompok ini cocok, terutama untuk mencegah terjadinya pertentangan karena perebutan air irigasi, mengusahakan adanya penanaman serentak dan seragam, yang dapat mengurangi serangan hama penyakit, lebih mudah melakukan pemberantasan hama tikus secara serempak dengan *gropyokan*.

Keuntungan Digunakannya Pendekatan Kelompok Tani

Pendekatan kelompok ini ternyata banyak menguntungkan diantaranya sebagai berikut; dalam setiap kelompok selalu saja ada petani yang lebih



Dr. Ir. Soemitro
Arintadisastra, M.Ed.

Direktur Bina
Program, Direktorat
Jenderal Tanaman
Pangan & Hortikultura

dahulu memiliki informasi teknologi baru dan lebih maju “*inovator*”, “*early adaptor*”. Mereka ini secara sadar atau tidak dapat memajukan anggota lainnya, kerjasama petani dalam kelompok ternyata cukup menyenangkan, karena itu kelompok tani merupakan wadah bersosialisasi.

Dengan adanya kelompok ini ternyata mampu mengidentifikasi masalah, serta mampu mengatasi masalah dengan cepat. Dari sudut ekonomi juga cukup menguntungkan, karena biaya produksi dapat ditekan melalui pembelian sarana produksi secara bersama, produksi dapat menjadi lebih tinggi, karena mampu menerapkan seluruh teknologi yang dianjurkan, sekaligus mempermudah memperoleh modal dan input produksi melalui pengajuan RDKK kepada perbankan.

Adanya pertemuan teratur yang disepakati bersama antara anggota kelompok tani menyebabkan hubungan petani satu sama lain menjadi lebih akrab dan hangat, inilah suatu landasan yang kuat untuk mengembangkan kebersamaan, tumbuhnya kreativitas dan dinamika petani, tumbuhnya “*leadership*”. Selain dari pada itu kekuatan yang dimiliki petani yang kecil-kecil menjadi mudah disatukan, serta upaya untuk memperoleh modal dan input produksi melalui kerjasama/ “*cooperation*” menjadi lebih mudah dan lebih ekonomis.

Berarti kelompok tani merupakan wadah yang memiliki berbagai fungsi yaitu; sebagai wadah untuk mencari/mendapatkan informasi dan sebagai kelompok belajar, sebagai



wadah untuk berusaha bersama, untuk bergembira dan bersosialisasi, untuk memecahkan masalah, untuk menyatukan kekuatan dan terakhir untuk menumbuhkan kreativitas dan kepemimpinan.

Dalam pelaksanaannya pendekatan kelompok ini dapat berbentuk penyelenggaraan Sekolah Lapang (SL), penyelenggaraan INSUS, Kelompok Petani Kecil. Pendekatan kelompok tani ini masih dijumpai beberapa kelemahan yaitu masih terjadi pertengkaran antar kelompok dalam penggunaan air irigasi, adanya ketidakseragaman waktu tanam padi menyebabkan tidak terputusnya serangan hama penyakit, skala ekonomi satu kelompok terlalu kecil sehingga tidak dapat menumbuhkan industri maupun perusahaan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut diadakan “*Pendekatan Kerjasama Antar Kelompok Tani*”.

Wadah untuk mencari/ mendapatkan informasi dan sebagai kelompok belajar, sebagai wadah untuk berusaha bersama, untuk bergembira dan bersosialisasi, untuk memecahkan masalah

Pendekatan Kerjasama antar Kelompok Tani

Kerjasama antar kelompok tani dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan atau pertentangan antar kelompok selain dari pada itu menumbuhkan kerjasama antar kelompok yang mampu menumbuhkan usaha yang "*Berskala ekonomi*" Dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan adalah program SUPRA INSUS. Agar program ini dapat berhasil, perlu dibina kerjasama antar kelompok tani yang diwakili oleh ketua dan sekretaris kelompok tani dengan jalan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) bersama, Rencana Kerja dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDK, RDKK) harus disusun sendiri oleh kelompok tani, tidak boleh dibuatkan oleh PPL atau pengurus koperasi. Karena kalau RDK, RDKK dibuatkan oleh PPL maka tidak akan terjadi proses menumbuhkan hal-hal yang positif pada kelompok tani yang kita cita-citakan

Proses penyusunan RDK dan RDKK oleh kelompok tani bukan hanya merupakan proses penyusunan dasar kebutuhan kelompok saja, akan tetapi timbul proses-proses lain sebagai berikut:

- a) proses menumbuhkan partisipasi anggota,
- b) proses menumbuhkan dinamika,
- c) proses menumbuhkan "*leadership*",
- d) proses menumbuhkan keakraban antar anggota,

- e) proses penumbuhan control, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran dan pengembalian kredit.

Pendekatan antar Unit SUPRA INSUS

(HIMPUNAN SUPRA INSUS)

Pendekatan terakhir adalah pendekatan kerjasama antar unit SUPRA INSUS yang biasa disebut Pendekatan Himpunan SUPRA INSUS.

Dalam teori luas areal Himpunan SUPRA INSUS luasnya mulai 5.000 Ha sampai 30.000 Ha. Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pada areal yang luas serta menumbuhkan industri benih, industri pengolahan hasil. Akan tetapi dalam kenyataannya kebutuhan benih tidak hanya dilayani oleh satu kabupaten tersebut, sudah ada aliran benih antar kabupaten, bahkan aliran benih antar propinsi. Agribisnis dan Agroindustri-pun dapat tumbuh pada areal 600 Ha - 5000 ha. Industri benih pun dapat tumbuh dengan memperhatikan kebutuhan benih antar Kecamatan atau antar Kabupaten. Sebagai contoh benih jagung hibrida dihasilkan di Jawa Timur ternyata mampu melayani seluruh Indonesia.

Dalam praktek, areal yang luasnya 30.000 Ha terlalu luas dan sulit dibina oleh PPL atau oleh Dinas. Karena itu lahan yang luasnya 30.000 sebaiknya dibagi menjadi 6 - 10 himpunan SUPRA INSUS, dimaksudkan agar pelaksanaannya lebih sederhana tidak rumit, dan tidak akan terjadi Himpunan SUPRA INSUS fiktif.

BERBAGAI METODA PENYULUHAN PERTANIAN

Kita bisa mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dan dapat mempertahankannya sampai saat ini, bukanlah hasil kerja setahun, dua tahun saja atau bukan hasil menggunakan model INSUS, SUPRA INSUS saja, akan tetapi merupakan proses yang cukup lama dan secara bertahap melakukan perubahan berbagai metoda penyuluhan pertanian.

DEMAS

(Demonstrasi Massal) dan
Sekolah Lapang (SL)

Sejak tahun 1964 kita mencoba memberikan motivasi petani, mendidik petani langsung di lapangan, diantaranya dalam cara membuat pembibitan yang baik, bagaimana mempersiapkan lahan, cara mencaplak dan melakukan tandur jagar langsung di sawah, mengajarkan cara memupuk yang dipendamkan di tanah dengan cara diinjak, sampai cara menyangi memakai landak, pengemposan hama tikus, sampai kepada panen dan penyimpanan.

Petani di hamparan seluas 50 Ha ini dibina langsung oleh dua orang tenaga calon sarjana yang sedang melakukan praktek terakhir. Metoda ini cukup baik dan hasilnya dapat dibanggakan. Metoda tersebut disebut *DEMAS (Demonstrasi Massal)*. Sebenarnya metoda *Sekolah Lapang* yang sekarang sedang populer tidak berbeda dengan metoda *DEMAS*. Yang

berbeda pada *Demas* dengan *Sekolah Lapang* adalah sebagai berikut; pada *DEMAS* kelompok tani pada areal *DEMAS* terdiri dari beberapa kelompok yang dibina oleh mahasiswa terus menerus. Mahasiswa bekerja bersama petani, mendampingi petani, dan hidup di lingkungan petani, sedangkan pada penyelenggaraan *Sekolah Lapang* pertemuan petani diadakan 14 kali pertemuan di lapangan dan pada setiap pertemuan disediakan makanan kecil dan sedikit uang saku. Selain itu pada *DEMAS* petani diajarkan di lapangan langsung sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan langkah-langkah kegiatan petani yang dilaksanakan di lapangan. Disini petani belum diajarkan cara mengidentifikasi hama penyakit dan mana yang predator.

DEM FARM

Demonstration Farm

Pada tahun 1972 dilahirkan suatu metoda Penyuluhan *Demonstrasi Farm*, yaitu suatu demonstrasi penanaman padi yang dilaksanakan oleh satu kelompok tani dalam satu hamparan seluas 8 - 15 Ha, di 6 kabupaten di Jawa Barat. Yang diajarkan kepada petani pada usahatani padi tersebut juga sama yaitu mengenai penanaman padi, dari mulai pengolahan tanah, penanaman/jarak tanam, pengendalian hama, pemupukan berimbang sampai kepada paska panen. Hasilnya cukup meyakinkan dan pola pembinaan inilah merupakan cikal bakal digunakannya pola *INSUS* dan *SUPRA INSUS*, yaitu pembinaan petani melalui pendekatan kelompok tani.

DEM PLOT Demonstration Plot

Metoda penyuluhan pertanian lainnya diantaranya kegiatan *Demonstrasi Plot*. Demonstrasi Plot ini dilaksanakan di lahan petani pada areal seluas 0,1 Ha. Apa yang hendak di demonstrasikan kepada petani ini tergantung maksud tujuannya; Apakah memperkenalkan bibit unggul, apakah memperkenalkan tanaman baru atau pemupukan atau teknologi baru. Demplot akan efektif kalau dilaksanakan di lahan petani, plot diletakkan di petakan yang mudah dilihat petani lainnya, biasanya di tepi jalan yang terbaik irigasinya dan tidak jauh dari pasar pedesaan.

Memang kelemahan dari metoda Demonstrasi Plot ini petani-petani hanya digugah untuk "mengetahui" akan adanya teknologi baru dan diusahakan untuk menimbulkan

"minat" saja. Kelemahan lainnya yaitu lokasi yang dipilih sering di kebun dinas atau lokasi BPP, karena itu petani tidak dapat langsung mencobanya. Berarti petani tidak memperoleh tambahan ilmu dan pengalaman, dan kelemahan yang sering terjadi kalau petani telah berminat akan sesuatu yang di demonstrasikannya, sering bahan tersebut tidak tersedia di kios-kios di pedesaan.

DEMONSTRATION TRIAL

Yang cukup baik untuk dilaksanakan saat ini atau masa-masa mendatang yaitu *Demonstrasi Trial*; yaitu kegiatan demonstrasi pada sebidang tanah milik petani yang lahannya dibagi atas beberapa kotak-kotak, masing-masing kotak misalnya luasnya 4x6 m². Tiap kotak ditanami satu jenis varietas misalnya Cisadane, Membramo, IR 64 atau IR 48 atau Cisokan, dan Maros,

Demonstrasi penanaman padi yang dilaksanakan oleh satu kelompok tani dalam satu hamparan luas



sedangkan perlakuan, macam dan dosis pemupukannya setiap kotak itu sama, yang berbeda hanya variasinya.

Dengan dilaksanakannya Demonstrasi Trial ini, maka PPL dan petani dapat melihat dan menyadari serta memilih varietas apa yang cocok dan paling baik di lahan setempat. Metoda ini cocok untuk menentukan dan memilih materi penyuluhan pertanian yang lokal spesifik. Agar penyelenggaraan Demonstrasi Trial ini dapat memiliki dampak yang cukup luas, maka sebaiknya diadakan "field day" pada

saat penanaman dan saat panen/ubinan. Dengan "field day" ini petani yang berjauhan dapat melihat dan menyaksikan sendiri hasil dari berbagai petak yang terbaik.

Apabila kita akan merekomendasikan pemupukan dapat dibuat berbagai perlakuan pemupukan dengan catatan kita pilih satu varietas padi yang paling cocok. Varietas padi sama untuk semua plot. Dengan dua kali penyelenggaraan Demonstrasi Trial yang berbeda, maka akan dapat merekomendasikan penggunaan varietas dan pemupukan yang tepat, sekaligus mengajarkan pada petani.

Demonstrasi Trial Varietas Padi

Varietas IR 64	Membramo	IR. 42	Cisadane	Cisokan	Maros
----------------	----------	--------	----------	---------	-------

Dosis pupuk 200 kg urea, 100 kg fosfat, 50 kg KCl (disemua kotak sama)

Demonstrasi Trial Pemupukan

200 kg urea	150 kg urea	250 kg urea	200 kg urea	200 kg urea	200 kg urea	200 kg urea
100 kg fosfat	100 kg fosfat	100 kg fosfat	75 kg fosfat	50 kg fosfat	100 kg fosfat	100 kg fosfat
50 kg KCl	50 kg KCl	50 kg KCl	50 kg KCl	50 kg KCl	75 kg KCl	100 kg KCl
I	II	III	IV	V	VI	VII

Varietas disemua plot sama, misalnya varietas Maros

Dengan *demonstration trial* semacam ini, kita bisa memilih plot yang memiliki produksi yang terbaik kemudian diikuti dengan analisa ekonomi mana yang paling menguntungkan. *Demonstration trial* ini selain berfungsi sebagai metoda penyuluhan, akan tetapi merupakan alat untuk menambah informasi yang paling tepat, serta membuat PLL menjadi lebih trampil dan menjadi lebih percaya diri akan rekomendasi yang ia sampaikan.

SISTEM LAKU TRAINING & VISIT SYSTEM

Sistem kerja ini dapat juga disebut *Metoda* Sistem LAKU ini cukup berjasa menghantarkan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan tahun 1984 dan mempertahankannya sampai tahun 1996 ini. Sistem ini kurang populer untuk para PPL karena angka kredit untuk kunjungan ke kelompok tani terlalu kecil, untuk petani di luar Jawa juga tidak populer karena lokasi petani jauh-jauh. Berarti yang salah bukan sistem LAKU-nya, akan tetapi sistem penghargaan/kredit sistem-nya yang harus ditingkatkan.

Saya yakin kalau angka kredit untuk kunjungan kepada kelompok tani kita tingkatkan misalnya dari 007 menjadi 035, sistem ini akan berjalan lagi.

Sistem LAKU apabila dilakukan dengan tekun dan konsisten tetap akan efektif dan hasilnya cukup baik.

Beberapa kekuatan dan kebaikan sistem LAKU diantaranya adalah:

1. Penyuluh Pertanian memiliki rencana kerja dalam setahun.

2. Penyuluh Pertanian mengunjungi petani secara teratur.
3. Pembinaan melakukan pendekatan kelompok tani.
4. Penyuluh Pertanian cepat mengetahui masalah yang ada di petani dan cepat memecahkannya.
5. Penyuluhan Pertanian secara teratur mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan
6. Para PPL mendapatkan supervisi dan pengawasan yang teratur.

METODA INSUS dan SUPRA INSUS

Metoda Supra INSUS sebenarnya merupakan pola pengembangan yang berwawasan agribisnis, akan tetapi dapat juga disebut metoda penyuluhan terbaru yang canggih yang merupakan kerjasama antar kelompok tani dalam suatu kawasan yang berskala ekonomi, yang mampu menumbuhkan kelembagaan ekonomi pedesaan dan sekaligus mampu menumbuhkan kerjasama antar petani.

Pola Supra INSUS ini diawali kegiatan Perencanaan Kegiatan (RDK) dan Perencanaan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Penyusunan RDK dan RDKK yang disusun bersama oleh anggota kelompok tani dan "*tidak boleh dibuatkan*" oleh PPL merupakan kunci keberhasilan pola INSUS, Supra INSUS.

Pola ini selain mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, ternyata proses penyusunan RDK. RDKK mampu menumbuhkan:

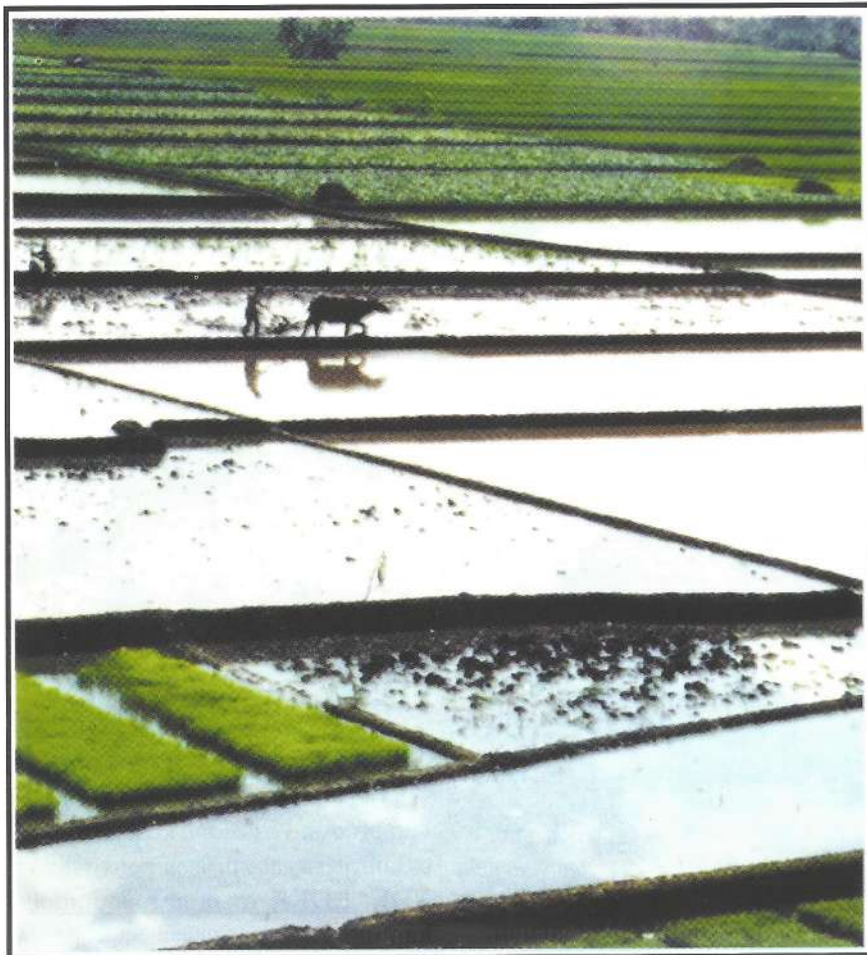
1. Mendinamiskan masyarakat tani/ menumbuhkan motivasi petani.

2. Menumbuhkan "leader ship".
3. Mengembangkan sistem kontrol dalam pengajuan dan pengembalian kredit.
4. Mengembangkan kerjasama antar petani dalam kelompok dan antar kelompok.
5. Melatih kebiasaan berhubungan dengan Bank.
6. Mampu menyeragamkan varietas dan waktu panen.

Sekali lagi saya tekankan proses penyusunan RDK dan RDKK

merupakan hal yang sangat penting, dan harus dibuat oleh anggota kelompok sendiri.

Sedangkan INSUS adalah suatu pola pengembangan yang berlandaskan kerjasama antar petani dalam kelompok tani dalam satu hampan. Kelemahan dari pola ini pertemuan jarang dilaksanakan di lapangan, pertemuan sering dilaksanakan di rumah petani atau di balai-balai pertemuan, sehingga bersifat teoritis dan mudah dilupakan.



INSUS adalah suatu pola pengembangan yang berlandaskan kerjasama antar petani dalam kelompok tani dalam satu hampan

PROFIL/PERFORMANSI KEPEMIMPINAN DAN KELEMBAGAAN PETANI-NELAYAN DI ERA AGRIBISNIS DAN GLOBALISASI

Oleh : *Mudjija Prodjosuhardjo*

PENDAHULUAN

Agribisnis adalah usaha pertanian yang merupakan pemikiran dasar yang sejak awal, bahwa usaha pertanian tersebut memberikan keuntungan. Usaha ini terjadi sejak kegiatan usaha pertanian dimulai dari penyiapan dan penyediaan prasarana produksi, sarana produksi, proses produksi, pengolahan, pengangkutan dan distribusi produksi pertanian tersebut. Dari seluruh kegiatan tersebut, kenyataannya terjadi berbagai variasi antara komoditi satu dengan komoditi yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bahkan antara petani yang satu dengan petani yang lain, ada komoditi yang seluruh tahap pengusahaan tersebut terjadi di dalam satu tangan, tetapi juga terdapat pada lebih dari satu tangan.

Begitu pula di daerah yang satu umumnya terdapat satu tangan dalam semua proses pengusahaan tersebut, tetapi juga terdapat di suatu daerah yang hanya mengusahakan satu fase pengusahaan dan terdapat yang lebih dari suatu wilayah produksi untuk fase-fase pengusahaan tersebut. Terjadi pula pada "petani" satu hanya mengusahakan satu fase pengusahaan; ada pula

"petani" yang mengusahakan satu atau lebih fase pengusahaan itu sekaligus.

CIRI-CIRI KOMODITI

Dari pendahuluan di atas telah diuraikan, bahwa agribisnis mempunyai ciri khusus, yang sangat berbeda pandangan maupun manajemennya dengan usaha pertanian yang bukan berpandangan bisnis.

Menurut **Prodjosuhardjo**, 1994, perbedaan yang sangat menonjol adalah meliputi :

1. Pemilihan komoditi dan tempat usaha pertanian tersebut akan dilakukan.
2. Penyediaan prasarana dan sarana produksi sampai proses produksi dalam "Satu tangan" atau *decision maker*.
3. Pengolahan dan pengangkutan dalam "satu tangan".
4. Pemasaran dan distribusinya ditangan lain.

Sebaliknya juga sering terjadi, bahwa keseluruhan proses tersebut dalam satu tangan. Untuk keadaan pertama, artinya terdapat spesialisasi pengusahaan, sedangkan pada keadaan yang kedua, memerlukan generalis untuk pengelolaannya.



*Mudjija
Prodjosuhardjo*

Staf pengajar
Fakultas Pertanian
UGM.

Dengan adanya berbagai macam perusahaan tersebut, maka pembinaan kepada "petani", diperlukan pula keterampilan berusaha (*managerial skill*) yang berbeda-beda, baik metode maupun materi pembinaan dan obyek pembinaannya.

Disamping itu pembinaan dan pembinaannya dengan sendirinya juga terdapat perbedaan antara usaha pertanian yang satu dengan usaha yang lain. Perbedaan semacam ini akan semakin tajam, apabila pada saatnya agribisnis globalisasi. Hal ini disebabkan karena agribisnis dan globalisasi memiliki ciri-ciri khusus.

PERMASALAHAN

Permasalahan perusahaan/ pengelolaan

Kalau pada bab yang terdahulu telah dibicarakan pengertian-pengertian dan beberapa fase tentang perusahaan pertanian, maka pada bab ini akan lebih banyak mengungkap tentang permasalahan-permasalahan pokok, yaitu keadaan yang pada saat sekarang ini tidak memuaskan atau tidak ada kesesuaian, baik dilihat dari segi mikro maupun makro. Untuk meninjau permasalahan ini, perlu diuraikan terlebih dulu mengenai tinjauan ekonomi pada berbagai perusahaan pertanian tersebut.

Dilihat dari segi ekonomi, maka usaha pertanian itu dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan ekonomi pertanian umum, yang didasarkan pada makro perwilayahan, sosial ekonomi, fisibilitas, politik, kondisi petani dll. Yang kedua dari tinjauan ekonomi pertanian khusus, yang mempelajari dari segi mikro ekonomi perusahaan,

usahatani, pendapatan dan keuntungan usaha pertanian serta macam komoditinya. Corak ekonomi yang akan dibahas berikutnya terutama tinjauan yang kedua ini.

Pada umumnya cara perusahaan yang kedua ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) cara berdasarkan sistem/wataknya, yaitu: (*Iso Reksohadiprojo, 1963*)

1. Perusahaan pertanian yang memiliki ciri-ciri ekonomi yang berwatak kapitalitas, yang dikemukakan oleh **RICARDO** dan **ADAM SMITH**.

Ciri-ciri perusahaan pertanian berwatak seperti ini adalah :

- a. Proses produksi dianggap sebagai perpaduan dari berbagai faktor produksi alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, atau skill, *baik technical skill* maupun *managerial skill*. Oleh karena itu setiap faktor produksi tersebut harus di hargai, bahkan sering dihargai lebih dulu, meskipun proses produksi belum berhasil.
- b. Usaha pertanian tersebut ditujukan kepada produksi bahan-bahan yang akan diperdagangkan (*market oriented*).
- c. Modal di dalam proses produksi ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, sedemikian pentingnya sehingga orang mengatakan bahwa keuntungan pengusaha pertanian sebagian besar disebabkan karena kedudukan/tersedianya modal di dalam proses produksi.
- d. Produksi pertanian yang dihasilkan, ditujukan untuk



Akan tetapi tenaga kerja manusia dianggap sebagai faktor produksi yang terpenting

memperoleh keuntungan tertinggi-tingginya dengan perongkosan yang serendah-rendahnya.

Di Indonesia, sistem pengelolaan usaha pertanian demikian, umumnya dilakukan oleh perusahaan lain, yang berorientasi *onderneming* dan komoditi yang semacam. Arah usaha pertanian semacam ini, memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.

2. Pengusahaan pertanian yang memiliki ciri-ciri ekonomi yang berwatak sosialitas, contohnya teori yang dikemukakan oleh **Karl Marx**.

Ciri-ciri pengusahaan pertanian semacam ini adalah :

- a. Proses produksi juga dianggap sebagai perpaduan, antara faktor-faktor produksi pertanian, yaitu alam (tanah, air dan iklim); tenaga kerja manusia, modal dan teknologi, termasuk *technical skill* dan *managerial skill*. Akan tetapi tenaga kerja manusia dianggap sebagai faktor produksi yang terpenting, sehingga harus diberi penghargaan yang tertinggi pula dibanding faktor-faktor yang lain.
 - b. Produksi pertanian yang dihasilkan, ditujukan langsung kepada keperluan masyarakat dan tidak semata-mata diperdagangkan.
 - c. Produksi yang dihasilkan pertanian secara perseorangan (privat) kurang dimungkinkan segala usaha dilaksanakan secara kolektif.
 - d. Usaha pertanian semacam ini, bukan keuntungan bersih setinggi-tingginya.
3. Pengusahaan pertanian, yang memiliki watak asli/kekeluargaan seperti yang dilakukan oleh **A. TSCHAYANOV**.
- Ciri-ciri pengusahaan pertanian kekeluargaan ini adalah meliputi:
- a. Produksi pertanian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri dan diusahakan oleh keluarga sendiri. Oleh karena itu usaha pertanian demikian terutama untuk memenuhi kebutuhan primer, misalnya bahan makan dan sandang.
 - b. Produksi pertanian yang berwatak kekeluargaan ini



Hakekatnya mengharuskan orang untuk melakukan perpaduan faktor-faktor produksi pertanian sedemikian rupa, sehingga diperoleh barang-barang kebutuhan hidup semaksimal mungkin.

tidak mudah diombang-ambingkan oleh konyunktur ekonomi; karena sifatnya yang sangat luwes atau supel, tidak tergantung pasar dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan kegoncangan ekonomi dari luar.

Dari ketiga sistem pengusahaan pertanian tersebut terang terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Hal ini disebabkan karena sistem yang satu dengan sistem yang lain, tidak dapat dikonfirmasi. Tetapi meskipun demikian, dalam pengelolaan produksi pertanian tersebut, sistem-sistem itu mempunyai asas-asas tertentu, yang tidak mudah untuk dikembangkan bersama. Asas-asas ekonomi yang berlaku untuk tiap-tiap sistem pengusahaan pertanian tersebut adalah :

1. Kebutuhan hidup manusia atau masyarakat itu, pada dasarnya tidak terbatas jumlah dan jenisnya.

Akan tetapi faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan kebutuhan hidup manusia itu sangat terbatas. Kenyataan ini, pada hakekatnya mengharuskan orang untuk melakukan perpaduan faktor-faktor produksi pertanian sedemikian rupa, sehingga diperoleh barang-barang kebutuhan hidup semaksimal mungkin.

2. Tetap berlakunya hukum semakin mundurnya kenaikan hasil, yang berlaku untuk tiap-tiap sistem tersebut diatas dalam proses produksi. Untuk ini menuntut, bahwa orang tidak bebas dalam usaha untuk memperoleh hasil yang harus selalu naik.
3. Berlakunya hukum keuntungan relatif, yaitu terjadinya perbedaan relatif antara komoditi yang satu dengan komoditi yang lain, dimasing-masing wilayah pertanian.

4. Asas-asas produksi pertanian, antara lain spesialisasi, tumpang-sari, tumpang gilir dan sebagian tetap berlaku untuk sistem perusahaan pertanian apapun. Sehingga dapat terjadi, dalam suatu proses produksi dilaksanakan oleh lebih dari satu tangan .

Bagi di Indonesia, kenyataannya terdapat berbagai modifikasi dari macam sistem tersebut. Yang paling menonjol adalah perusahaan pertanian yang diarahkan pada usaha pertanian keluarga dan perusahaan pertanian yang diarahkan untuk memperoleh keuntungan. (*Soedarsono Hadisapoetro, 1973*). Untuk pertanian keluarga, yang umumnya bersifat *subsistence*, produksi yang dihasilkan terutama hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat umumnya.

Usaha-usaha pertanian ini misalnya usaha pertanian rakyat, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, tidak memperhatikan keuntungan. Oleh karena itu yang dipentingkan adalah produksi setinggi-tingginya, besarnya pendapatan (*income*) dan besarnya pendapatan masyarakat (*Community income*).

Penerapan dalam pertanian perusahaan, disamping memperhatikan pendapatan, yang terpenting harus diperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Sehingga semua biaya baik dari luar pertanian maupun dari milik petani sendiri harus diperhitungkan sebagai biaya. Kebijakan pemerintah, mengatakan bahwa pada tahun 2.000-an, Indonesia harus mengikuti cara berfikir sesuai dengan keadaan pada saat itu. Antara lain bahwa kelembagaan petani dalam pola agribisnis dan globalisasi.

KEPEMIMPINAN DAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM ERA AGRIBISNIS DAN GLOBALISASI

1. Era Globalisasi dalam Agribisnis

Pada saat ini Indonesia sedang menuju ke harapan untuk menerima pengaruh era agribisnis dan globalisasi. Oleh karena itu sistem pengelolaan hasil pertanian seharusnya menuju ke internasionalisasi. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam globalisasi dengan sendirinya mengikuti dengan yang selama ini relatif masih tertutup dan hanya berkisar pada tingkat nasional, atau bahkan tingkat regional atau lokal. Dalam era globalisasi, akan terjadi perubahan dalam lalulintas teknologi, baik teknologi usahatani prapanen maupun teknologi pasapanen. Perilaku usaha pertanian akan menjadi salah satu ciri terjadinya pendekatan, yang semula berorientasi kecukupan dalam negeri menjadi berorientasi ke luar negeri.

Dari sifat yang semula sebagai komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang berwatak *subsistent farming*, berubah menjadi pertanian berwatak bisnis atau agribisnis. Hal ini merupakan keharusan bagi usaha-usaha pertanian, sehingga penampilan petani dan kelembagaan tanipun harus mengikuti gerak menginternasionalkan tersebut. Agribisnis merupakan usaha-usaha pertanian yang berwawasan ekonomi dari usaha pertanian yang subsisten menjadi usaha pertanian yang komersial. *Farming as bussiness means farming for profit, not just some profit, but as much profit as possible.*

Apabila terjadi perubahan sede-

mikian itu, maka usaha pertanian menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan ekonomi tinggi, sangat penting untuk meningkatkan penghasilan usahatani tersebut. (Upton, et. al. 1965). Apabila usaha pertanian semakin menguntungkan, maka semboyan *I do not want my son to be a farmer, because farmer are poor* itu tidak akan menakutkan lagi. Sebab, apabila menjadi suatu usaha ekonomi, petani tidak menjadi miskin, dan petani akan menerima keuntungan atau pendapatan yang lebih tinggi.

Untuk dapat mengetahui wawasan yang lebih luas, maka petani perlu mengetahui, bukan hanya cara budidaya suatu komoditi pertanian yang selama ini di dengung-dengungkan, melainkan juga harus mengetahui bagaimana cara manajemen suatu usaha pertanian agar memperoleh keuntungan. Menurut Geertz, C1. (1974) mengatakan bahwa sektor industri pertanian bermodal tinggi (misalnya pabrik gula), satu bagian dari perekonomian negeri Belanda di Eropa, sejak dikembangkan di abad yang lalu telah menghambat perkembangan pertanian yang lain, dan masyarakat Jawa yang makin sarat penduduk, akhirnya menjadi *disquesed un - employment*, yaitu pengangguran yang tidak kentara. Hal ini merupakan salah satu penghambat untuk menuju komersialisasi pertanian atau agribisnis di pedesaan oleh petani di Jawa pada waktu itu.

Involusi semacam itu merupakan gerakan-gerakan modernisasi, tetapi petani tetap mandeg atau jalan di tempat; artinya tidak memiliki pandangan yang jauh ke depan, yang

dapat menghasilkan keuntungan, termasuk tidak melihat keunggulan komparatif pada suatu usaha komoditas pertanian yang lain, atau fase usaha pertanian. Akibat pandangan dan cara berfikir seperti itu, maka pertanian di Jawa pada waktu itu, terbagi dengan sendirinya; yaitu usaha pertanian rakyat yang pada umumnya padat tenaga atau labour intensif dan usaha pertanian perusahaan yang padat modal atau *capital intensive*.

Dua kelompok kenyataan ini yang oleh Boeke (1947) dan Geertz (1974), dikatakan sebagai terjadinya dualisme pertanian di Indonesia, yang banyak orang menyebutkan terjadinya dikotomi pertanian di Indonesia. Sifat dan watak (*attitude*) semacam ini masih sangat dirasakan oleh pengamat, maupun oleh petani sendiri sampai sekarang.

Upton, et. al. 1965, mengatakan bahwa usahatani itu sendiri sebetulnya merupakan usaha bisnis, artinya mencari keuntungan; dengan mengatakan *Farming as bussiness means farming for profit, not just some profit, but as much profit as possible*. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha pertanian itu sebenarnya sudah merupakan usaha ekonomi. Tetapi yang menjadi masalah adalah sejauh mana usaha ekonomi itu betul-betul memberikan keuntungan bagi petani. Banyak orang mengatakan bahwa petani dalam berusahatani tidak atau kurang melihat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dan sarana produksi. Untuk dapat menjawab itu, maka marilah kita memikirkan, apakah penyuluhan kita sejak awal diberikan juga telah memuat tujuan

bisnis? Jawabnya "belum!" Penyuluhan selama ini masih berpandangan pada mengajarkan keterampilan pasca usaha, masih pra atau na panen, belum pada pasca panen.

Dari pernyataan **Upton. et. al** tersebut, tidak ada usahatani yang tidak bertujuan untuk mencari untung setinggi-tingginya. Dari pendapat Boeke (1947) dan pendapat Upton (1965) diatas menunjukkan adanya 2 pendapat yang kurang sejajar. Tetapi bagi Indonesia memang masih terdapat kenyataan seperti yang dikemukakan oleh **Boeke** diatas, yaitu adanya usaha pertanian yang bersifat komersial dan ada usaha pertanian yang bersifat non komersial; seperti yang diketemukan oleh Geertz pada tahun 1947.

Kotak, C. Pl.(1988) mengatakan, bahwa segala upaya dalam pembangunan harus mengutamakan untuk kepentingan umat manusia, yaitu pernyataan sebagai berikut:

1. Manusia harus mengutamakan pada semua tahap pembangunan yang mempengaruhi mereka.

2. Mengutamakan manusia didalam campur tangan pembangunan, berarti harus untuk memenuhi keutuhan bagi perubahan yang mereka rasakan; dengan mengidentifikasi sasaran dan strategi bagi perubahan atau dinamika yang sesuai dengan budaya; rancangan yang efisien bagi inovasi baru.
3. Lebih baik memanfaatkan, ketimbang menentang kelompok dan organisasi yang telah ada. *Nuting jaman Kelakone* (Jawa).
4. Di negara yang sedang berkembang, pada umumnya analisis dan rekayasa sosial (bukan perubahan sosial!), harus dapat membawa hasil-hasil positif penelitian, baik sosial maupun ekonomi. (*Empan papan*, Jawa) Karena tiap daerah, kelompok masyarakat telah membawa budaya sendiri-sendiri, bahkan falsafah hidup sendiri. Sehingga sifat dan watak dari daerah atau negara lain tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Disinilah "kearifan" perlu diterapkan.

Upton. et. al (1965) juga mengatakan hal yang hampir sama yaitu: *"The importance of famili welfare : on most small farmers in the tropics no labour is hired, The work is done by farmer, his wives and children. For this reason he may not think of labour as an importance cost"*. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa semua pembangunan, termasuk pembangunan pertanian harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Didalam era globalisasi, memang seolah-olah pertanian Indonesia akan terganggu dan

Semua pembangunan, termasuk pembangunan pertanian harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat



terkuasai oleh pengaruh masuknya teknologi, terutama teknologi sosial ekonomi pasar memang sangat berpengaruh. Tetapi marilah kita menengok kebelakang sejenak yaitu bahwa Indonesia pernah mengalami hal semacam, yaitu pada jaman penjajahan Belanda dengan VOC-nya, yang sangat dirasakan merugikan petani-petani atau usaha-usaha pertanian pribumi, yaitu bahwa perdagangan hasil pertanian tidak memberikan keuntungan pada rakyat atau petani di Indonesia. Disini terlihat, bahwa hasil pertanian pada waktu itu dikuasai dan dinikmati oleh penjajah, karena hasil-hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar Internasional dikuasai oleh penjajah. Memang ada usaha-usaha seperti tersebut dilakukan pada waktu globalisasi. Tetapi kita harus telah memiliki pagar-pagar pembatas, agar globalisasi tidak banyak pengaruhnya *drain* keuntungan keluar Indonesia, melainkan kita harus pandai-pandai memanfaatkan globalisasi itu. Dengan sendirinya harus diperhatikan ciri komoditi yang mempunyai nilai ekonomi lebih untuk pasar di negara lain, dan dapat memanfaatkan modal dari negara lain seefektif, seefisien dan seselektif mungkin (lihat pendapat Kotak, C.PI, 1988 dimuka).

Watak pertanian di Indonesia yang cocok adalah seperti pendapat A.TSCAYANOV, yaitu pertanian yang berwatak kekeluargaan. Pertanian semacam ini dapat berjalan tanpa ada yang saling dirugikan. Untuk di Indonesia telah dilakukan sistem pertanian tersebut, dan dibedakan antara pertanian yang untuk memenuhi kebutuhan pokok

hidup orang banyak; misalnya pertanian bahan makan, diberikan batas-batas pengamanan harga, agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Begitu juga petani, telah semua lapisan terhimpun dalam kelompok tani dan BUUD/KUD, dengan tujuan agar petani berorientasi kerjasama ekonomi. Begitu juga kebijakan untuk komoditas lain, telah tercipta kebijakan pemerataan, kerjasama dan keadilan. Contohnya PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), yang kesemuanya bertujuan agar terjadi kerjasama antara pemilik tanah, pemilik modal dengan pemilik teknologi secara kooperatif dan saling memperoleh keuntungan.

2. Kepemimpinan dan Kelembagaan Petani

Untuk dapat memanfaatkan globalisasi, baik globalisasi teknologi maupun globalisasi ekonomi, maka kepemimpinan dan kelembagaan petani yang sekarang telah ada, perlu disempurnakan, terutama dalam menerima teknologi, maupun penyesuaian teknologi akibat globalisasi tersebut. Batas antar negara untuk perdagangan dan teknologi tidak ada atau tidak jelas lagi. Sehingga diperlukan kemahiran dan kewicaksanaan yang benar-benar *mumpuni*.

Menurut De Vries (1947), bahwa pembangunan pertanian yang bermanfaat bagi masa depan Indonesia, harus memberikan harapan kepada petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus mampu untuk :

- a) Menggerakkan masyarakat petani dan perdesaan secara aktif dengan

- insentif ekonomi, dorongan sosial budaya dan moral.
- b) Membina suatu kebijakan pembangunan nasional yang memberi tempat layak bagi pertanian dan pembangunan desa, dalam kerangka pembangunan nasional.
 - c) Mendorong kerjasama dan kesadaran, dengan negara lain menuju sistem ekonomi liberal menjadi ekonomi kooperatif (karena tidak semua petani mampu sendiri dan mandiri).
 - d) Kesadaran dan kesiapan menuju ekonomi baru. Ini dimaksudkan, agar dalam era globalisasi dan pengembangan agribisnis, harus saling menguntungkan (Ingat jangan sampai terjadi seperti jaman tanam paksa).

Yang perlu diingat adalah, bahwa akan terjadi "Petani musiman", mereka bersaing dengan industri atau pekerjaan lain non pertanian, sehingga petani di desa akan meninggalkan usaha pertanian, mencari pekerjaan diluar usaha pertanian. Apabila melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi pada saat ini, dan mungkin yang akan datang, maka kelembagaan petani masih tetap dipertahankan yaitu kelompok tani. Tetapi yang sangat penting perlu diperhatikan bahwa dengan semakin merebaknya modernisasi akibat globalisasi, maka perlu dibedakan dan pembinaan kearah spesifikasi usaha pertanian, dan

dengan sendirinya pengetahuan dan keterampilan masing-masing anggota kelompok lain, tidak semuanya hanya mempunyai keahlian peningkatan produksi, tetapi juga mempunyai keahlian pasca panen misalnya kelompok tani pengolah hasil dan mungkin kelompok tani komoditi industri. Sehingga dengan terjadinya globalisasi, petani telah mempersiapkan *comodity product* tertentu. Dengan demikian terjadi variasi kepemimpinan kelembagaan tani di daerah pertanian, yaitu kelompok tani penyerap dan penerap teknologi pra panen (seperti yang sekarang telah ada) ada kelompok penyerap dan penerap teknologi pasca panen, baik pengolahan maupun sampai industri hasil pertanian.

Hal ini sangat penting, karena globalisasi yang akan terjadi jangan sampai terjadi globalisasi penjajahan teknologi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan modifikasi dan spesialisasi kepemimpinan dan kelembagaan petani; begitu juga penyuluh pertanian yang membina petani, dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan teknologi tersebut diatas, mulai dari penyuluh lapangan, penyuluh madya dan penyuluh spesialisasinya; meskipun kesemuanya masih dalam lingkup penyuluh pertanian. Demikian sekilas pendapat untuk menyongsong globalisasi pertanian, khususnya globalisasi teknologi.

Menjadi Fasilitator yang Berhasil

Keberhasilan seorang fasilitator akan ditunjukkan dengan sampainya pesan-pesan yang ia sampaikan kepada peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam proses interaksi seorang fasilitator dengan peserta didik, ada beberapa persyaratan bagi seorang fasilitator agar berhasil dalam proses belajar-mengajar antara lain:

1. Mempunyai rasa humor yang tinggi
2. Memakai bahasa yang mudah dimengerti, jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang sulit.
3. Menghadapi peserta didik dengan luwes, tidak kaku sehingga suasana menjadi hangat dan akrab. Untuk menciptakan suasana yang hangat dan akrab juga dapat dibantu dengan permainan-permainan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Penyampaian permainan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan selain akan membuat peserta didik menjadi lebih santai juga memudahkan peserta didik untuk dapat merasakan proses belajar dari pengalaman.
4. Memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk berpikir dan menjawab seandainya fasilitator meminta partisipasi sukarelawan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
5. Mengungkapkan perasaannya sendiri. Dengan mengungkapkan perasaannya diharapkan peserta dapat berempati dan mendorong mereka untuk mengungkapkan juga perasaannya.
6. Memperhatikan apa yang dirasakan oleh tubuhnya sendiri. Bila seseorang fasilitator merasa tegang, gugup, capai, bosan atau santai, hal ini dapat dijadikan pegangan untuk merasakan situasi di dalam kelompok belajarnya. Bila seorang fasilitator merasa ketegangan pada dirinya, biasanya juga terjadi ketegangan pada kelompok belajarnya.
7. Memperhatikan pesan-pesan non verbal para peserta didik yang diungkapkan oleh bahasa tubuh. Bahasa tubuh biasanya lebih jujur daripada pesan-pesan lisan, perhatikan raut muka, cara duduk ataupun gerak-gerik lainnya yang dapat menunjukkan apakah peserta didik merasa tegang, tertutup, bosan atau serius mengikuti materi yang disampaikan oleh fasilitator. (rm)

JENDELA



Ah, anak pantai
 nafasmu seperti debur ombak
 yang tak pernah henti
 kau bentangkan layar
 ketika debur ombak berseru
 memanggil
 sementara tangan mengais
 kaki menyusur
 tepian pantai yang luas tak terukur



JENDELA



Ah, anak pantai
 nafasmu seperti debur ombak
 yang tak pernah henti
 kau bentangkan layar
 ketika debur ombak berseru
 memanggil
 sementara tangan mengais
 kaki menyusur
 tepian pantai yang luas tak terukur



*Hasil jerih keringatmu adalah
keberlimpahan anugerah rizki
yang dinanti perut
berjuta lapar
berjuta mulut ternganga*





Tetapi ikan adalah ikan
 yang lekang diterpa panas
 yang membusuk di ujung waktu
 yang menuntut
 beribu tangan mengolah
 beribu tangan menobur garam
 beribu tangan menyusun





*Memang si kecil,
kerap hanya menatap terpana
hanya menonton terlonong
tatapannya seolah menuntut kita,
kapankah keberlimpahan
jerih keringat anak pantai
dan lezatnya hidangan yang tersaji
menjadi milik mereka*

Tulisan : Andi Sumarga
Photo : Andi Sumarga, El Suherly
Lokasi : Pandeglang, Sukabumi,
Pekalongan, Denpasar



Kearifan dalam Memasyarakatkan suatu Teknologi

Topik 'puting beliung' yang dilontarkan *ekstensia* volume 3, mendapat tanggapan yang meredakan. Aneh! pada pengalaman mereka putaran 'puting beliung' yang memporak-porandakan, yang membuat kontra informasi malah seolah 'disihir' menjadi reda, menjadi tenang dan mewujudkan komunikasi dialogis yang terus mencari, mencipta dalam gairah kerja yang tak pernah berhenti!

Jika ada orang yang berteriak, kontra informasi urea tablet bak 'puting beliung' yang membingungkan! Pengalaman mereka seolah menjawab - 'Lho! Siapa yang bingung? Sama sekali petani tidak

ketiban bingung!' - Wajar! Jika ada petani menumbuk urea tablet, sebab urea tablet yang dikirim sudah mengeras membatu dan menyatu!, Wajar! Jika ada petani yang menabur urea tablet bak menabur urea priil, sebab pinggang mereka dibuat sakit jika harus membungkuk sepanjang hari di sawah yang tak bertepi!

Wajar? Ya wajar sebab mereka dihadapkan pada keharusan memilih dan memutuskan sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, agar usaha tani dapat terus berlangsung, agar mereka memperoleh uang sebagai hasil usahatannya, agar mereka dapat menghidupi anak istrinya untuk bertahan hidup sehari-hari! Yang bingung dan tidak wajar mungkin adalah mereka yang dikejar-kejar target, mereka yang ingin cepat cepat selesai, mereka yang tergesa-gesa tanpa mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi untuk mempercepat pemasyarakat urea itu dan membuat atmosfer 'puting beliung'!

Di bawah ini adalah percikan pengalaman rekan-rekan penyuluh pertanian di lapangan yang pada dasarnya mengajarkan, bahwa atmosfer penyuluhan pertanian menghendaki apapun teknologi yang

Pengalaman yang tak ternilai

Apa yang menjadi tujuan rubrik ini, bukanlah sekedar obrolan santai tanpa arah, bukan pula omong-omong tanpa isi, namun disela-sela canda, tawa dalam keakraban berocengkerama kadang terdengar lontaran ungkapan pengalaman yang layak untuk didengar.

Semata-mata, hanya karena pengalaman yang teramat berharga itulah rubrik ini diturunkan. Sehingga apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami tersebut melalui perjalanan panjang, kerja keras dan perjuangan tanpa henti, sesungguhnya merupakan pancaran inovasi yang berharga, pengalaman yang membenkan nilai tambah pada lingkungan organiknya. Sehingga, pengalaman tersebut hendaknya juga dapat mengalir, berputar makin membesar saling berbagi dan memberi serta menjadi pengalaman milik kita bersama.

Semoga.

akan diperkenalkan kepada masyarakat selayaknya digelar juga pengujian di tingkat petani, oleh petani itu sendiri dan pada situasi dan kondisi petani, tidak *'bermain di sawah sekotak'* yang tidak menggambarkan situasi dan kondisi petani. Hasil pengujian inilah yang nantinya, akan menunjukkan teknologi tersebut diterima atau tidak diterima, berguna atau tidak berguna, suka atau tidak suka, baik atau tidak baik. Yang kemudian penerimaan petani terhadap teknologi tersebut ditindak lanjuti dengan dinamika respon unsur pengaturan dan pelayanan untuk penciptaan dan perekayasa iklim yang lebih kondusif dalam penerapan teknologi yang telah dipilih tersebut! Rekan-rekan penyuluh tersebut adalah :

Ohan Burhanudin, penyuluh pertanian Kabupaten Subang - Jawa Barat. **Aplikator Yang terlupakan.** *Mengungkapkan pengalaman pencarian dan penciptaan berbagai aplikasi yang mengiringi dan memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam Gerakan Masyarakat Urea Tablet di kabupaten Subang. Tanpa aplikasi yang baik, maka penerapan urea tablet pada lahan sawah yang luas, ada kecenderungan terjadi penerapan teknologi yang salah, tidak tepat seperti yang dianjurkan dari aspek penelitian! Malah ketika tenaga kerja menjadi kendala, urea tablet pun ditabur bak urea priil! Akibat penerapan yang salah ini seolah olah urea tablet ini tidak mempunyai guna sama sekali. Setelah pencarian dan penciptaan aplikasi berulang kali, segera lah dirasakan manfaat urea tablet. Kini di kabupaten Subang, masyarakat tani sudah urea tablet minded!*

Sriatin, Penyuluh Pertanian WKPP Bangsal, Kecamatan Bangsal, Mojokerto - Jawa Timur. **Catatan Pengalaman Masyarakat Penerapan Teknologi Urea Tablet.** *Mengungkapkan sebuah catatan pengalaman penerapan teknologi urea tablet di wilayahnya. "Puting beliung" di seputar rumor urea tablet menurut catatan pengalamannya haruslah dikonfrontasikan dengan informasi yang benar. memberikan informasi yang benar pada kondisi puting beliung, memerlukan prasyarat awal yang tak bisa ditawar-tawar lagi, diantaranya kemasan metodologis, kemasan informasi, sarana prasarana dan dukungan kesisteman yang terkoordinasi yang harus dipersiapkan dengan baik.*

Selanjutnya terserah penyuluh itu sendiri untuk secara taat azas menerapkan semua metodologi yang dipunyai sesuai kondisi yang dihadapinya dan harus sekaligus menjadi mitra petani !

Jika mencermati apa yang diungkapkan mereka, dalam atmosfer penyuluhan pertanian, *'tragedi puting beliung'* sebenarnya tak perlu terjadi. Karena apa yang menjadi tujuan penyuluhan pertanian semata mata hanya membangun kemandirian petani nelayan dan selebihnya membiarkan petani nelayan itu memutuskan dan memilih berbagai teknologi yang diperkenalkan/di masyarakatkan. Jadi tidak memaksakan!

Sepercik kearifan yang lebih arif, rasanya memang perlu ditetaskan dalam memperkenalkan dan masyarakatkan suatu teknologi, karena ternyata berbagai respon

gelar dinamika masyarakat itu warnanya tidak hanya sekedar hitam dan putih saja. Seolah diantara warna hitam dan putih itu terbentang pula warna-warna pelangi; merah, jingga, kuning, hijau, biru nila dan ungu yang hadir dalam gradasi warna yang indah dan saling melengkapi. Begitu pun teknologi yang akan dimasyarakatkan, dinamika prosesnya tidak hanya sekedar 'transfer teknologi' semata, tetapi berbagai situasi dan kondisi petani nelayan yang menjadi lingkungan organiknya, ikut pula mewarnai dan mendasari dinamika proses pengambilan keputusan terhadap pilihan berbagai informasi teknologi yang di perkenalkan!

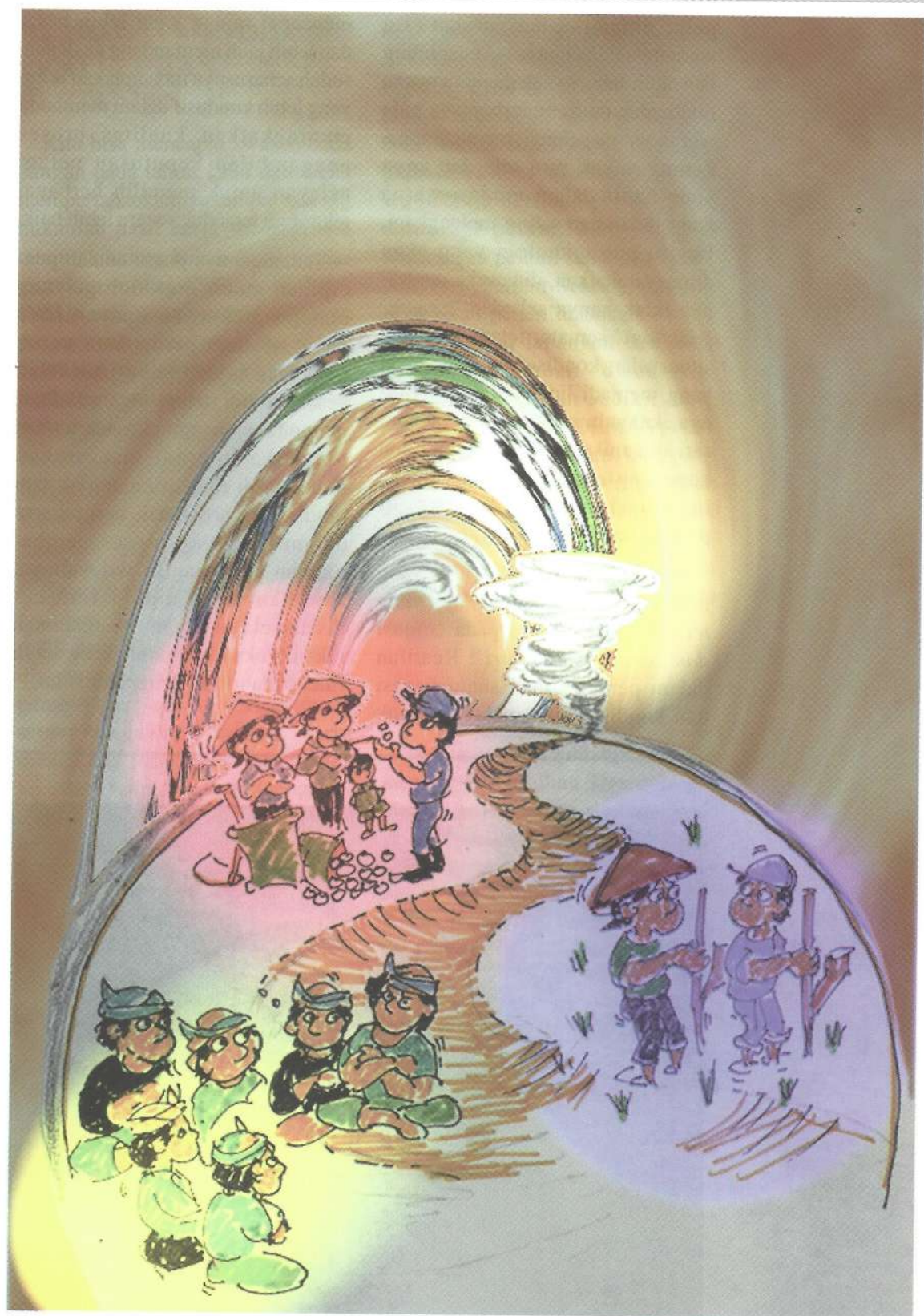
Apapun yang mereka pilih, yang mereka putuskan adalah 'apa yang terbaik' bagi mereka pada 'situasi dan kondisinya sendiri'! Kearifan dalam perekayasaan suatu situasi dan kondisi petani nelayan untuk

mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh memandang ke depan, sudah seharusnya menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memandu meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan petani nelayan untuk memilih berbagai teknologi tersedia, secara lebih baik.

Tantangannya justru adalah penciptaan suatu metodologi yang mampu menjawab upaya-upaya yang sifatnya percepatan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar itu tadi, tetapi juga sekaligus mampu membangun kesadaran dan dinamika internal masyarakat, terutama di tingkat kelompok tani untuk berpartisipasi, berprakarsa dalam dinamika proses pembangunan pertanian di wilayahnya. Jawabannya mungkin tercecer disela-sela ungkapan pengalaman rekan-rekan penyuluh yang lebih rinci pada rubrik cengerama ini.

andi sumarga





Aplikator yang terlupakan

Oleh : *Oban Burhanudin*

Pada awalnya kehadiran benda ini, mungkin memang tidak diperhitungkan atau malah terlupakan. Tetapi kemudian sebelum dan sesudah “Gemarata” (Gerakan Masyarakat Urea Tablet) dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian di Kabupaten Subang, yang mendapat respon dengan berbagai gelar dinamika masyarakat; Ketika itulah terasakan adanya sesuatu yang terlupakan. Sehingga tidak petani, tidak penyuluh dan tidak juga pihak lainnya terus berpikir, terus mencari, terus mencipta benda yang namanya aplikator. Lelahnya ‘puting beliung’ dan kenyangannya “asam garam’ urea tablet telah melahirkan sang aplikator yang kinerjanya memerlukan tenaga kerja hampir sama dengan penggunaan tenaga kerja pada urea priil!

Pinggang sakit, jika terus menerus membungkuk sepanjang hari’ -.

- ‘Tumbuk saja jika sudah membuat, lengket dan menyatu seperti itu’ -.

- ‘Tidak usah di benamkan, taburkan saja! Kok pengaruhnya tidak nyata...!’.

Begitu kira-kira pada awalnya berbagai keluhan seputar penerapan urea tablet yang dikatakan kurang praktis dan kualitas urea tablet yang mudah lengket jika disimpan terlalu lama. Padahal ketika itu dibenak setiap petugas telah terpatri sejumlah informasi tentang nilai tambah urea tablet. *Penghematan pemakaian pupuk N, tenaga kerja dan me-*

ingkatkan produksi padi semua itu demikian hapal di luar kepala! Kondisi kontra informasi demikian memang kadang membuat kepala pusing berputar-putar. Dan jika kita tidak cepat menyadarinya, maka tepat seperti diungkapkan ekstensia, kita akan segera terbawa dalam libatan putaran angin puting beliung yang membuat bingung! Sebab apa pun yang kita teriakkan mengenai sejumlah manfaat urea tablet, jawabannya bagaikan bumerang yang menyerang balik dengan sejumlah keluhan urea tablet tersebut di atas.

Apa yang harus dilakukan ketika kondisi demikian itu terjadi? *Self Corection* (koreksi diri) itu langkah yang pertama dilakukan!, dengan



Oban Burhanudin

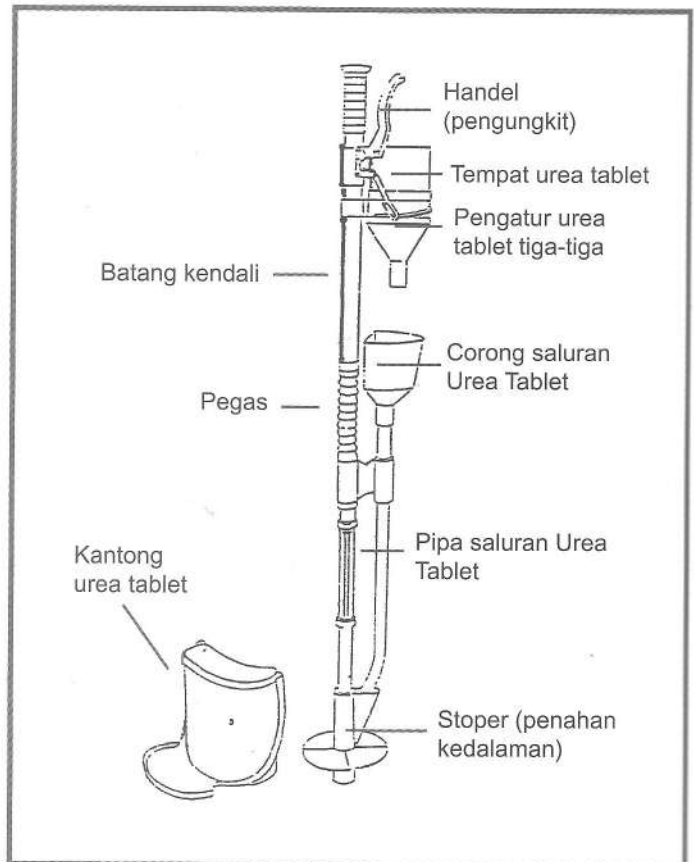
Penyuluh Pertanian
BIPP
Kabupaten Subang
Jawa Barat

prioritas program gerakan pemasyarakatan urea tablet yang telah dicanangkan Bapak Menteri Pertanian tetap menjadi tujuan utama! Karena masih terngiang ucapan bapak menteri pertanian ketika itu, bahwa *masyarakat akan bergerak, jika melihat manfaat, dan menjadi tugas kita untuk membuat masyarakat melihat manfaat itu.* Dalam penjelajahan koreksi diri itulah seolah terlihat kembali apa yang menjadi semua keluhan masyarakat!

Apa yang membuat pinggang masyarakat sakit? Coba kita bayangkan jika seorang petani harus membungkuk dan berdiri berulang ulang sepanjang hari di keluasan sawah berpuluh ribu ha. Tentu saja pinggang menjadi sakit, apalagi belum terbiasa. Ini mungkin tidak tercermati ketika para petugas mengadakan demo atau ketika percobaan urea tablet masih ada dalam lahan penelitian. Ibaratnya kita hanya bermain di sawah sekotak

yang luasnya beberapa ha saja. Sakitnya pinggang seolah tidak terasakan. Sama seperti kejadian di lapangan bagi petani dengan area lahan sempit, penggunaan urea tablet berjalan dengan mulus, tanpa keluhan sakit pinggang! Lain halnya dengan gerakan pemasyarakatan urea tablet yang menyentuh lahan sawah dengan keluasan sekitar 82.000 ha, beragam petani ada disana dengan kepemilikan lahan bervariasi dari lahan yang sangat luas ke lahan yang sangat sempit ada di sana. Karena itulah ketika urea tablet ini harus diterapkan, maka kadang terdengar keluhan pinggang sakit!

Apa yang membuat urea tablet ditumbuk dan kemudian ditabur?



Kembali kita harus membayangkan dan harus mempunyai empati yang tinggi. Apa yang akan kita lakukan jika urea tablet yang diberikan ternyata telah lengket bersatu dan seperti membatu, bagaimana membenamkannya urea tablet yang menjadi demikian besar. Tak ada jalan lain bukan? kecuali membuangnya seperti sampah atau menumbuknya untuk ditaburkan pada lahan sawah. Ternyata yang terakhir itulah yang menjadi pilihan petani, dipikirkannya mungkin ada manfaatnya!

Apa yang membuat pengaruh urea tablet tidak berbeda nyata dengan urea priil. Jawaban ternyata kembali kepada kondisi yang kurang tercermati ketika demo atau pada lahan penelitian. Ketika kita bermain di sawah sekotak pada ajang demo, mungkin kita bisa lebih telaten, bisa lebih hati hati dalam penerapan urea tablet. Kita ingin tepat benar penerapan urea tablet seperti apa yang dianjurkan dari hasil penelitian! Ketika demo itulah terlihat padi yang hijau terus sampai menjelang padi berbunga, gulma yang relatif sedikit dibanding sawah yang memakai urea priil, serta pemakaian pupuk dan tenaga kerja yang lebih efisien. Ini semua dapat dilihat dan dirasakan oleh semua yang terlibat dalam ajang demo tersebut! Tetapi ketika dihadapkan pada tantangan pemasyarakatan urea tablet di keluasan 82.000 ha, baru terasakan berbagai kekurangan dan ketidaksiapan dalam pemasyarakatan urea tablet ini.

Subang bersyukur, dengan adanya penancangan Gemarata di Kabupaten ini, maka seluruh aparat dari

bupati dan jajarannya, hingga para petugas di desa dan lapangan ikut membangun atmosfer dalam gerakan untuk menyukseskan pemasyarakatan urea tablet. Sehingga masalah pengaturan, pelayanan dalam hal distribusi pupuk yang biasanya menjadi masalah, bukan lagi masalah yang tak bisa diselesaikan, karena selalu ada pemecahannya. Tetapi hal yang paling utama dirasakan sebagai kekurangan dan ketidaksiapan oleh para pelaku di kabupaten subang dalam gerakan masyarakat ini adalah, tantangan menerapkan urea tablet tepat seperti apa yang dianjurkan dari lembaga penelitian. Karena ternyata penerapan di lahan yang sangat luas faktor ketrampilan petani masih harus dibangun agar mereka mampu menerapkan teknologi itu sesuai anjuran, kendalanya ternyata pada saat itu belum ada aplikator sebagai sarana mencapai tujuan tersebut.

Kita semua bisa membayangkan, jika urea tablet diterapkan tanpa menggunakan aplikator dibutuhkan tenaga kerja 9 -12 orang/ha/hari. Sedangkan urea priil hanya membutuhkan tenaga kerja 1 - 2 orang/ha/hari (walaupun nantinya ada pengulangan untuk pemupukan ke dua). Dari penerapan 1 ha ini tanpa melihat pengulangan ke dua di urea priil, sudah terlihat kesenjangan tenaga kerja untuk penerapan urea tablet sekitar 2 - 11 orang/ha/hari. Di sisi lain tantangan kabupaten Subang sebagai salah Kabupaten pengemban Supra Insus di wilayah pantai utara Jawa Barat adalah kesempatan waktu tanam berdasarkan golongan air. Dapat dibayang jika kesempakan tanam menjadi prasyarat awal,

**PERBANDINGAN PEMAKAIAN UREA PRIL (TABUR) DENGAN UREA TABLET
TANPA MENGGUNAKAN APLIKATOR DAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKATOR
GENERASI KETIGA SEMI OTOMATIS**

JARAK TANAM 22 X 22 CM

A. PEMUPUKAN MEMAKAI UREA PRIL

1.	Urea Pril 1 Ha	200 Kg
2.	Kebutuhan tenaga kerja 2 x 4 orang	8 orang

Ket :

- Pemupukan Urea Pril dilakukan sebanyak 2x selama musim tanam
- Pupuk Urea Pril yang dibutuhkan sebanyak 200 Kg - 1 Ha dikerjakan oleh 4 orang x 2 kali pemupukan

**B. PEMUPUKAN MEMAKAI UREA TABLET TANPA MENGGUNAKAN APLIKATOR ATAU
DENGAN CARA MEMBUNGKUK**

1.	Urea TABLET UNTUK 1 Ha	152 Kg
2.	Kebutuhan Tenaga Kerja	16 orang

Ket :

- Dengan jarak tanam 22 x 22 cm, 1 m² terdiri dari 4,5 x 4,5 = 20,25 rumpun
- 1 Ha (10.000 m²) = 10.000 X 20,25 rumpun = 202.500 rumpun
- 1 Ha = $\frac{202.500}{4} = 50625$ petak
- Urea Tablet untuk 1 Ha = 50625 petak x 3 tablet = 151.875 butir tablet
- 1 Kg Urea Tablet = 1.000 butir

Jadi kebutuhan Urea Tablet untuk 1 Ha sawah = $\frac{151.875}{1.000} \times 1 \text{ kg} = 152 \text{ Kg}$

**C. PEMUPUKAN MEMAKAI UREA TABLET DENGAN MENGGUNAKAN APLIKATOR GENERASI
KETIGA SEMI OTOMATIS**

1.	Urea Tablet untuk 1 Ha	152 Kg
2.	Biaya Tenaga Kerja memakai Aplikator 6 jam	6 orang

Keuntungan petani menggunakan Urea Tablet dibandingkan dengan Urea Pril untuk setiap 1 Ha sawah:

1.	Urea Pril yang biasa digunakan oleh petani	200 Kg
2.	Urea Tablet dengan petakan 22 x 22 cm	152 Kg

*Peragaan Aplikator Pembenam Urea
Tablet Semiotomatis Generasi III pada
tanggal 27 Agustus 1995,
di Desa Balimbing Kecamatan Pagaden,
Kabupaten Subang Jawa Barat*



kemudian kekurangan tenaga kerja pada lahan seluas 82 000 ha menjadi kendala utama, maka pada situasi dan kondisi seperti ini, pemasyarakatan urea tablet harus diwaspadai!

Subang sangat mewaspadai dan sangat peduli dalam gerakan pemasyarakatan urea tablet ini. Dari Bupati, Camat, Kepala desa dan seluruh jajarannya, pada berbagai kegiatan penting dan pada setiap kesempatan selalu berbicara urea tablet. Sungguh situasi yang sangat menguntungkan di tengah keluhan urea tablet yang kadang masih terdengar. Di sisi lain masyarakat tani dan juga para petugas di lapangan pun, tak henti-hentinya tanpa mengenal putus asa mencari dan menciptakan berbagai kemudahan dalam penjelajahan penerapan urea tablet ini. Sejak awal mereka sudah berpikir bahwa harus ada aplikator yang memudahkan penerapan urea tablet ini. Proses penciptaan aplikator yang memudahkan ini memang melalui proses penjelajahan pengalaman yang cukup panjang, yang ditemukan pada situasi dan kondisi yang ada pada petani.

Penjelajahan pengalaman mereka yang pertama diawali sejak dari penerapan urea tablet oleh satu orang, dengan cara satu tangan mengambil satu tangan yang lain memasukkan dengan gerakan badan harus membungkuk ketika membenamkan urea tablet di antara 4 rumpun tanaman padi. Untuk lahan yang luas penerapan ini membuat pinggang terasa sakit, tangan basah, urea tablet mudah lengket dan membutuhkan 9-12 orang/ha/hari.

Pengalaman ke dua. Penerapan urea tablet dikerjakan oleh dua orang. Satu orang yang ada di depan menjatuhkan urea tablet, sedang orang yang di belakang menginjak dan membenamkannya diantara 4 rumpun tanaman padi. Penerapan seperti ini lebih meringankan dibandingkan dengan pengalaman pada penerapan yang pertama. Tetapi tetap membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak.

Pengalaman ke tiga. Penerapan urea tablet dilakukan rumpun per rumpun, 1 butir urea tablet/rumpun. Ini dilakukan untuk memperbaiki penerapan pada pengalaman pertama dan ke dua yang kurang menunjukkan pengaruh nyata urea tablet (padahal mungkin sebenarnya, ada keteledoran dan kurang telitinya membenaman urea tablet oleh tangan dan injakan kaki pada area yang luas, sehingga 3 butir urea tablet tidak tepat terbenam di antara 4 tanaman padi sesuai anjuran pada kedalaman sekitar 7-15 cm). Penerapan seperti ini tentu saja mengakibatkan terjadinya pemborosan 1 butir urea tablet/ 4 rumpun padi.

Pengalaman keempat. Penerapan urea tablet dengan menggunakan aplikator hasil rekayasa petani dengan menggunakan paralon 0.5 inch dan botol bekas aqua 500 ml, petani dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 500,- untuk mengadakan alat itu, maka tanpa harus membungkuk mereka dapat menerapkan urea tablet dengan lebih praktis. Pinggang mereka memang menjadi tidak sakit, namun tetap memerlukan tenaga kerja yang relatif banyak, selain kedalaman membenaman urea tablet masih kurang terkontrol.

Pengalaman kelima. Diciptakannya aplikator sederhana oleh seorang PPL di kecamatan Binong Subang, aplikator ini juga dipergakan ketika pencaangan Gemarata oleh Bapak Menteri Pertanian dan di pameran bersama sejumlah aplikator lain dalam panen perdana penerapan urea tablet di kabupaten subang. Cara kerja aplikator ini cukup sederhana memasukan 3 butir urea tablet dan membenamkan ujung alat ini ke dalam lumpur diantara 4 rumpun padi. Dengan alat ini kebutuhan tenaga kerja berkurang dari 9 -12 orang/ha/hari menjadi 5 - 6 orang/ha/hari. Dengan kedalaman pembenaman urea tablet yang lebih baik dan terkontrol.

Pengalaman ke enam. Diciptakannya aplikator otomatis, ide dari seorang petani yang juga anggota HKTI dan kemudian bekerjasama dengan pihak swasta PT. Mitra tani Lestari, membuat alat yang disebut Aplikator Mitari Generasi ke 4. Alat ini diciptakan setelah melalui proses uji coba di berbagai lokasi pada situasi dan kondisi petani dan dilakukan oleh petani itu sendiri. prosesnya memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Cara kerjanya otomatis, petani hanya tinggal memijit dan menekan maka akan keluar secara otomatis urea tablet 3 butir (keterangan rinci lihat Box Aplikator). Dengan aplikator ini penerapan urea tablet mendekati tepat seperti apa yang dianjurkan lembaga penelitian, di sisi lain penggunaan alat ini hanya membutuhkan tenaga kerja 2-3 orang/ha/hari. Jadi hampir mendekati ke-

butuhan tenaga kerja dalam penerapan urea priil, yaitu 1-2 orang/ha/hari.

Dengan kekayaan pengalaman seperti ini, ditambah lagi dengan penciptaan kegiatan strategis di setiap moment penting, seperti gelar pameran urea tablet pada ajang pameran kabupaten, parade pawai diorama urea tablet pada ajang 17 agustus, siaran pedesaan dan banyak lagi kegiatan yang mengkampanyekan urea tablet. Maka segala informasi urea tablet ini tidak menjadi lagi kontra informasi, atau jadi bumerang yang menyerang balik, namun kini gelar dinamika masyarakat lahan sawah di kabupaten Subang menjadi *urea tablet minded*. Petani menerima penerapan urea tablet di lahan sawahnya.

Satu pelajaran berharga dalam lelahnya 'puting beliung' dan kenyangnya 'asam garam' urea tablet adalah ibarat kita bermain bola, maka unsur peneliti, pengaturan, pelayanan, penyuluh dan terlebih petani adalah pemain yang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk menggolkan bolanya pada gawang lawan. Kesemuanya adalah satu kesatuan tim yang harus selalu bekerja sama tanpa putus asa. *Bola urea tablet* yang digulirkan tim peneliti, harus disambut dengan penuh *kehangatan dan kegairahan* oleh semua pelaku/pemain, termasuk di dalamnya penyuluh dan petani yang bekerjasama tanpa putus asa *menggiring bola urea tablet* itu dalam kesamaan satu tujuan yang dipancarkan gawang di depan. Tujuan nasional yang lebih besar!

(as)

Catatan Pengalaman PEMASYARAKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI UREA TABLET

Oleh : *Sriatin*

Untuk mengubah pola berpikir dan perilaku yang telah begitu melekat dan membudaya pada keseharian mereka bukanlah hal yang gampang. Diperlukan proses pendekatan yang relatif panjang untuk mengadopsikan suatu teknologi ataupun inovasi baru. Alur pikir sederhana dan wawasan yang dimiliki oleh umumnya petani kita menjadikannya sulit untuk mau menerima begitu saja sesuatu yang dianggap "baru". Ini terjadi pada Urea Tablet. Urea tablet, bagi mereka merupakan sesuatu yang baru, terutama sekali dari sisi penerapannya. Penerapan Urea tablet yang memerlukan ketelitian baik dari sisi jumlah, tempat dan kedalaman, berbeda sekali dengan penerapan urea priil yang jauh lebih mudah, hanya ditabur ! Kecenderungan itu pun akan menjadi semakin "parah" apabila ada informasi lain yang menyiratkan hal-hal yang lebih berkonotasi negatif tentang *sesuatu yang baru* tersebut lebih dahulu diterima mereka lewat jalur-jalur lain.



Sriatin

Penyuluh Pertanian
WKPP Bangsal,
Kecamatan Bangsal,
Mojokerto

Disinilah "puting beliung" yang dimaksud ekstensia terjadi. di satu sisi ada anjuran Urea Tablet yang menjanjikan sejumlah manfaat. Di

sisi lain ada ketidaksiapan dan berbagai informasi yang belum dikemas menjadi rumor, bak "puting beliung" yang menjadikan petani bingung ! dan kadang menolak dengan keras !

Sebagai orang yang lahir dan tumbuh di daerah ini (Mojokerto, Red.), dimana lingkungan keseharian saya sejak kecil hingga saat ini adalah dunia pertanian dan para petani dengan segala pernik peri kehidupannya, menjadikan saya lebih hafal dan maklum dengan sifat dan sikap para petani yang sekarang menjadi mitra saya dalam membangun dunia yang sama-sama kami cintai ini. Mereka, para petani; bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu diuntungkan. Kesan "penolakan" dan keras kepala yang acap kali mereka tampilkan semata-mata dikarenakan sikap kehati-hatian mereka yang terkadang lewat porsis. Sikap itupun sebenarnya bukan pula sesuatu yang luar biasa, apalagi bila mengingat persoalan yang dihadapinya lebih menyangkut hajat hidup yang menjadi sandaran masa depan keluarganya.

Sikap yang jauh lebih "kompromis" tetap masih tersisa pada generasi petani sekarang ini. Mereka

masih lebih mempercayai informasi yang dibawa dan disampaikan oleh petani lainnya atau orang-orang yang dianggap “dekat” dengan lingkungan dunianya, terlebih lagi apabila informasi tersebut didengar mereka dari orang-orang yang memiliki posisi sebagai yang “dituakan” di desanya. Mereka, para tetua yang menjadi pemimpin-pemimpin informal para petani dan warga masyarakat pedesaan pada umumnya sekaligus juga berpredikat sebagai “opinion leader” yang terkadang fatwa-fatwanya akan lebih sakti dibanding para aparat ataupun birokrat yang berpangkat sekalipun.

Bukan tidak mungkin apabila segala issue ataupun kontra-informasi (demikian istilah ekstensia) yang beredar mengenai penerapan teknologi urea tablet pun beredar melalui jalur-jalur seperti tersebut di atas. Kabar burung yang beredar dari mulut ke mulut akan cepat sekali menyebar walau sebenarnya kebenaran yang terkandung pada muatan pesannya terlalu sulit untuk dibuktikan, toh bagi kebanyakan petani “kebenaran” itu bukan semata terletak pada muatan isi pesannya tetapi lebih pada “siapa” yang membawa pesan tersebut.

Kalaupun saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi, tetapi secara pribadi saya mengasumsikan bahwa sumber utama segala desas-desus itu berawal dari mulai menghilangnya urea priil di pasaran. Bukan berarti pupuk urea menghilang sama sekali, pupuk urea masih tetap tersedia tetapi bentuknya berubah menjadi tablet (urea briket yang kemudian berganti wujud lagi menjadi urea tablet). Mungkin saja tidak akan pernah terjadi masalah

yang rumit seandainya kondisi perubahan wujud urea ini diproses secara lebih selaras dan terpadu dari setiap institusi yang berkepentingan dengan menjadikan petani lebih siap dan menerima informasi yang menyeluruh mengenai urea tablet. Tapi yang terjadi tidak demikian adanya, penyebaran informasi yang seharusnya mendahului keadaan pasar/lapangan sehingga para petani - yang dalam hal ini menjadi subyek sentral dari penerapan inovasi tersebut - menjadi lebih siap menerima perubahan, malahan terseok-seok dan terkacau-balaukan dengan segala macam informasi lain, informasi yang belum siap, informasi urea tablet yang sepotong-sepotong, urea tablet yang susah penerapannya, urea tablet yang mudah menggumpal menjadi bongkahan dan informasi lain tanpa melihat sisi positif urea tablet.

Kendala ini merupakan tantangan pertama yang mau tidak mau harus kami hadapi dalam upaya memasyarakatkan penerapan urea tablet di daerah kami. Dilematis memang, di satu sisi sebagai aparat yang berpredikat ujung tombak penyuluhan kita ditugasi untuk mengadopsikan inovasi baru ini ditengah kondisi yang sudah “tercemari”, padahal proses perobahan kebiasaan yang sudah berurat-berakar ini pada kondisi normal sajumpun akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Di sisi lain tuntutan kebijaksanaan yang telah digariskan dari atas ini mengharuskan kita seluruh aparat di garis depan ini untuk melakukan percepatan pemasarannya demi kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan mendesak

sifatnya. Bagi kita para penyuluh tidak ada alternatif lain, kewajiban ini harus ditunaikan, betapapun sulitnya.

Dalam mengawali suatu proses pemasyarakatan teknologi baru, kita akan selalu dituntut untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin terlebih untuk kasus serupa penerapan urea tablet ini. Diperlukan lebih dari sekedar adanya alat dan bahan untuk melaksanakannya. Sarana dan prasarana yang memadai disertai dukungan kesisteman yang terkoordinasi dengan baik merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Hal pertama yang menjadi pemikiran saya sebelum memulai langkah pemasyarakatan penerapan teknologi urea tablet ini adalah bagaimana upaya untuk mengantisipasi berbagai kontra-informasi yang telah terlanjur diterima para petani. Untuk membendung arus informasi tersebut secara langsung dari sumbernya sangatlah tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang menurut hemat saya paling bijaksana adalah dengan mengkonfrontasikan segala macam issue tersebut dengan informasi yang benar. Memberikan *informasi yang benar* pada kondisi seperti ini bukan hal yang gampang sebab kesalahan sekecil apapun baik teknis maupun non teknis akan makin menambah keragu-raguan para petani yang akhirnya akan berdampak pada kegagalan pemasyarakatannya.

Kemasan metodologis yang akan digelar perdana pada satu lokasi harus dipilih dan dipersiapkan lebih matang dan teliti agar mampu memberikan kesan yang baik dengan

resiko kegagalan sekecil mungkin. Pemilihan metodanyapun harus lebih selektif agar pesan yang akan disampaikan kepada para petani itu nantinya mampu memberikan kejelasan serta menampilkan keunggulan-keunggulan teknologi baru itu dengan nyata. Jadi jelas, segala macam metoda dengan pola linier yang hanya membeberkan teknologi ini secara teoritis tidak akan mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan. Disinilah penyuluh dituntut, sebagai mitra yang bersama dengan petani pelaku mencari tahu "informasi yang benar" mengenai urea tablet dengan tanpa keraguan !

Pengalaman saya bergumul dengan urusan urea tablet dimulai pada tahun 1991 ketika urea tersebut mulai diperkenalkan di beberapa daerah, atas prakarsa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Mojokerto bagi para PPL diberikan pelatihan khusus aplikasi urea tablet serta diharuskan melaksanakan pemagangan pada petani yang telah melaksanakan teknologi ini di berbagai daerah di Jawa Timur bahkan di Jawa Tengah.

Pada tahun itu juga ternyata di daerah ini (Mojokerto, red) ada juga petani maju yang telah mencoba menerapkan teknologi urea butiran tersebut dibawah bimbingan penyuluhnya tepatnya di Desa Segunung Kecamatan Delanggu yang memang memiliki kondisi agro-ekosistem yang sesuai bagi penerapannya. Lahan petani ini selanjutnya menjadi semacam model atau demplot terutama bagi para petani lain di sekitarnya. terbukti pada MT berikutnya lebih banyak

lagi petani yang ikut menerapkan aplikasi urea briket tersebut .

Sayapun harus segera mempersiapkan masyarakat di daerah binaan sendiri, dengan menggunakan lahan sawah seluas kurang lebih 1 Ha milik sendiri disiapkanlah semacam areal percontohan (demplot). Bersama 3 orang petani dari Desa Segunung yang sengaja saya minta bantuannya kami mencoba untuk mempraktekan sekaligus memberi contoh pelaksanaan penerapan urea tablet bagi para petani terutama yang berada di sekitar lokasi. Pemilihan ke-tiga petani inipun saya lakukan dengan hati-hati. Dengan catatan setidaknya mereka telah menjadi teladan dan dipercayai oleh banyak warganya, selain itu mereka punya kemampuan untuk penerapan urea tablet ini ! Bagi saya secara pribadi kegiatan ini lebih merupakan upaya pengkajian untuk lebih meyakinkan diri saya sendiri akan keunggulan-keunggulan dari inovasi baru tersebut, untuk itu saya melakukan pencatatan dengan teliti berbagai hal yang dapat diamati selama proses berlangsung, mulai dari aspek teknis dan non teknis sampai pada aspek usahatannya.

Berbagai kata-kata sumbang mulai banyak terdengar dari mulut para petani yang berada di sekitar lokasi dan kebetulan melihat peragaan kami, umumnya komentar mereka pada intinya mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari pemupukan cara baru tersebut dibandingkan dengan cara lama yang telah biasa mereka lakukan selama ini. Disini kemampuan saya diuji, untuk secara bertahap

menunjukkan pada mereka informasi yang benar dan menempatkan urea tablet pada posisinya serta menepis sejumlah kata-kata sumbang yang dulu diperdengarkan.

Kegiatan sesulit apapun apabila dilakukan berulang-ulang berkelanjutan niscaya semakin lama akan terasa semakin gampang, pada akhirnya akan menjelma menjadi kebiasaan baru dengan standar efisiensi dan efektivitas yang baru pula dan mungkin saja menjadi jauh lebih baik dari standar yang lama. Hal ini pulalah yang selalu saya ingatkan kepada para petani di setiap kesempatan. Dengan segala kemampuan saya berusaha untuk meyakinkan petani agar tidak melihat penerapan teknologi urea tablet ini hanya dari satu sisi saja, tetapi mestinya dilihat lebih menyeluruh, termasuk perhitungan untung-rugi dari hasil analisa usahatannya.

Tentu saja untuk pekerjaan *sebesar* masyarakat urea tablet yang menuntut hasil nyata dengan waktu segera tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan tanggungan penyuluh saja. Realisasi proses adopsi ini memerlukan kerjasama dari berbagai institusi yang tertata dalam suatu sistem kerja sinergis dan terpadu dengan membuat perencanaan kegiatan yang realistis lengkap dengan perangkat monitoring dan evaluasinya. Ide inilah yang dilontarkan Ir. Hermijanto yang kemudian lebih lanjut dia mengatakan " Kita harus membuat semacam net work planning, sebab tanpa ini kerja kita cenderung tidak terukur bahkan cenderung kerja tanpa arah !"

Kita harus membuat semacam net work planning, sebab tanpa ini kerja kita cenderung tidak terukur bahkan cenderung kerja tanpa arah

*(Ir. Hermijanto,
PPL Koordinator
Dinas Tanaman
Pangan
Kab. Mojokerto)*



Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mojokerto dalam upaya percepatan pemasyarakatan urea tablet ini adalah dengan melakukan pendekatan personal yang lebih intensif dengan para Kontaktani dan Petani maju yang dinilai lebih tanggap terhadap pembaharuan, kepada mereka diberikan pelatihan khusus penerapan teknologi urea tablet dan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pelatihan ini merupakan kegiatan terpadu dari berbagai institusi seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Satpel Bimas, PT. Pusri, KUD dan Unsur Pemerintahan. Materi kurikulumnya disusun dan diisi oleh berbagai institusi tersebut sesuai fungsinya.

Pada MT berikutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan mulai menggelar plot-plot demonstrasi di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto, Demplot-demplot tersebut kebanyakan ditempatkan pada

lokasi sawah milik para kontaktani yang telah mengikuti latihan. Pada lokasi itu pula dilaksanakan semacam Sekolah Lapang dan atau pemagangan bagi para petani lainnya.

Dukungan lain yang merupakan implementasi dari hubungan serta kerjasama yang baik antara Unsur Pemerintahan dengan Dinas Pertanian dan Satpel Bimas adalah dengan terbitnya kebijakan yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II bagi para perangkat desa, inti dari pada kebijakan tersebut mengharuskan setiap perangkat desa terutama bagi yang memiliki sawah “ganjaran” untuk melaksanakan penerapan teknologi urea tablet di sawahnya masing-masing.

Masih merupakan hasil kerjasama yang baik adalah dengan menciptakan kegiatan yang berdampak cukup positif terhadap percepatan pemasyarakatan urea tablet ini adalah dengan mengadakan perlombaan antar desa dan kecamatan. Lomba Pencapaian Penyerapan Urea Tablet ini selain bermanfaat sebagai alat memotivasi para petani juga merupakan sarana yang efektif bagi terciptanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai institusi terkait pada setiap tingkatan.

Sebagai upaya monitoring dan evaluasi kondisi lapangan serta upaya mengantisipasi setiap kendala yang mungkin timbul, dibuat suatu **instrumentasi pemantauan** yang dapat menampilkan gambaran kondisi lapangan sekaligus mendeteksi pada “pos” mana terjadi permasalahan serta “siapa” yang

lebih bertanggung-jawab untuk membenahinya. Ajang komunikasi dan koordinasi antar unsur terkait diagendakan secara berkala pada tiap jenjang tingkatan (Desa, Kecamatan, Kabupaten) dengan kegiatan rutin pembahasan kondisi lapangan yang dilaporkan oleh masing-masing posnya. Lebih lanjut Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan menegaskan "*Dengan Instrumen pengendali pertemuan yang diagendakan secara berkala akan lebih hidup. Sebab instrumentasi itu akan menghasilkan perencanaan operasional berdasarkan kondisi nyata dan langkah-langkah antisipatif terhadap masalah yang berkembang di lapangan*".

Kesabaran dan kerja keras dalam melakukan pendekatan apapun bentuk dan metodenya, pada akhirnya menjadi suatu faktor yang mutlak diperlukan untuk lebih membukakan mata petani terhadap manfaat dan kegunaan dari hal-hal baru yang akan diadopsikan/dimasyarakatkan kepada mereka. Ketelatenan dan kerjasama dalam melakukan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak terkait pada saatnya akan dapat *melunakkan* petani sehingga mereka menjadi *tahu, mau dan mampu* melaksanakan segala anjuran dengan ketulusan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Begitulah, perlahan namun pasti dari satu MT ke MT selanjutnya semakin terlihat perkembangan yang menggembirakan pada laju pemasyarakatan teknologi ini, Secara bertahap pencapaian target bagi Kabupaten Mojokerto beringsut mendekati angka 100 %, sampai



Instrumentasi itu akan menghasilkan perencanaan operasional berdasarkan kondisi nyata dan langkah-langkah antisipatif terhadap masalah yang berkembang di lapangan

(Ir. M. Oeripto Soemarto, Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Mojokerto)

akhirnya pada MT 1996 dihitung sampai bulan November 1996 penyerapan urea tablet yang tercatat untuk Kabupaten dan Kodya Mojokerto telah berhasil melampaui target sampai 102 %. Suatu bukti nyata segala daya dan upaya yang kami lakukan pada saatnya akan membuahkan hasil sesuai harapan. Berhenti sampai disinikah proses pemasyarakatan urea tablet ini ?

Seperti yang telah kita ketahui kegiatan pemasyarakatan suatu teknologi/inovasi baru belum selesai sampai tahap adopsi tercapai, pembudayaan suatu perilaku akan tercapai apabila kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara lumintu. Untuk mencapai hal itu selama proses pembentukannya perlu adanya pendukung yang maksimal baik teknis maupun non teknis bagi pelaksanaannya, atau dengan kata lain proses pembudayaan akan berjalan cepat dan lancar apabila setiap kendala yang muncul sebagai ekses penerapannya dapat ditekan seminimal mungkin.

Bagi Kabupaten dan Kodya Mojokerto khususnya kendala umum yang dirasakan masih mengganjal ada pada faktor tenaga kerja. Diperhitungkan per satuan usahatani petani penerapan teknologi ini memang membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih kecil dibanding dengan cara lama, tetapi untuk pelaksanaan pemupukan yang membutuhkan keserempakan sebagaimana tuntutan pola tanam wilayah dimana areal yang harus digarap cukup luas sedangkan waktu yang tersedia relatif singkat, pada saat inilah faktor tenaga kerja dirasakan sebagai suatu kendala.

Sebenarnya faktor tenaga kerja tidak mesti menjadi permasalahan, seandainya aplikator yang notabene diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaannya dapat berfungsi dengan baik. Sangat disayangkan memang, sampai saat ini belum ada satu aplikatorpun yang dianggap tepat-guna walau telah banyak perekayasa dilakukan. Pada akhirnya petani lebih "betah" melakukannya dengan menggunakan tangan dan kaki mereka ataupun dengan alat bantu tradisional "gejik" (tugal). Sejauh tidak terlalu menyimpang dari persyaratan teknisnya sampai saat ini kami tidak merasa perlu untuk mempermasalahkannya, toh tindakan rekayasa petani itu timbul sebagai reaksi alami dari kendala yang dihadapinya.

Akhir-akhir ini bahkan terlihat gejala pemanfaatan tenaga anak-

anak setingkat SLTP untuk melakukan pekerjaan ini, para petani menganggap mereka bisa lebih cepat melaksanakan pemupukan dengan teknologi urea tablet ini, mereka sanggup bekerja lebih lama dan mampu melakukan pembenaman pupuk sekaligus menutup tanahnya kembali dengan menggunakan tangan, suatu hal yang dianggap sulit dikerjakan petani dewasa karena cara itu akan berdampak kurang nyaman. Walaupun hal ini oleh sementara petani dianggap sebagai suatu hal yang wajar bahkan cenderung menguntungkan baik bagi si anak sendiri karena mereka akan mendapat upah dari hasil jerih payahnya ataupun bagi para petaninya yang merasa terbantu pekerjaannya, tetapi hati kecil saya masih menganggap kurang bijaksana rasanya mempekerjakan anak-anak usia sekolah ini apapun alasannya.

Kiranya kondisi ini akan terus berlanjut seandainya belum juga terdapat aplikator yang mampu memberikan percepatan dan kenyamanan dalam penggunaannya. Entah siapa yang seharusnya lebih berkewajiban untuk mewujudkan hal itu, tapi yang jelas sebagai aparat pemerintah yang nyata-nyata juga sebagai "agent of change" pada masyarakatan penerapan teknologi urea tablet ini, maka kewajiban itu pada akhirnya terbeban juga pada pundak saya, pundak kami kami; para insan penyuluh pertanian.

(els)

Topik CENGERAMA di volume yang akan datang

PERAHU RETAK.....

Pernah dengar nyanyian "Perahu Retak"-nya Emha Ainun Najib yang dinyanyikan Franky Sahilatua ? Nuansa Nyanyian itu , Nuansa *Perahu retak* yang seharusnya tak boleh terjadi itu ternyata dapat pula menjadi nuansa *retaknya* kelompok tani. Padahal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu kata pepatah.

Pepatah itu pula rasanya yang menjadi rujukan para petani nelayan untuk bersatu dalam satu kesatuan kelompok. Agar mereka teguh tidak mudah runtuh, agar mereka *yang masih kecil dan terpercil itu dapat menjadi besar dan terpusat* dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pergulatan hidup mereka berusaha tani.

Namun kadang kala niat dan tekad petani yang berkehendak untuk bersatu dalam kelompok dapat terancam bubar juga! Mengapa kondisi demikian kadang kala mudah terjadi? Apakah ada yang salah pada pepatah di atas atau memang kondisi itu wajar terjadi karena dapat mengikuti pepatah berikutnya yang berbunyi tiada gading yang tak retak, bahkan sependai-pandainya tupai meloncat, kadang kala jatuh juga.

- *'Akh, jangan berlindung dengan sejumlah alasan, jika hanya sekedar mencari pembenaran!'* - Begitu ada yang berkomentar, lanjutnya -*'Kasus seperti itu kan terjadi pada kelompok-kelompok karbitan! Kelompok yang inginnya cepat-cepat dibentuk untuk menjadi alat proyek semata!'* -

- *'Mana ada kelompok yang memang sejak awalnya berniat, bertekad untuk bersatu dapat dengan mudah terancam bubar! Kelompok seperti ini akan berkembang dan terus berkembang merespon segala perubahan dunia pertanian yang menjadi jalan hidupnya!'* - begitu komentar yang lainnya.

Lepas dari pepatah-pepatah dan komentar-komentar tersebut di atas, pada kenyataannya memang kadang terjadi kelompok yang terbentuk, kemudian tiba-tiba terdengar berita kelompok itu sudah bubar. Muncul dan terbentuknya kelompok itu kadang kadang demikian tiba-tiba, bahkan kelompok itu sempat bersinar terang, menjadi harapan dan teladan bagi lingkungannya, bahkan ada yang sempat mendapat penghargaan. Tetapi secepat dia muncul secepat itu pula dia sirna! Memang sebuah ironi, jika kelompok yang ditumbuhkan dengan tujuan membentuk kekuatan dengan kesatuan, tetapi kemudian bercerai berai tanpa tujuan!

Nah, rekan penyuluh pertanian, bagaimana pun kelompok petani nelayan adalah mitra kita! Menghadapi berbagai kondisi yang terungkap di atas rasanya kita pun mempunyai berjuta penjelajahan pengalaman selama kita berinteraksi dengan mereka. Kiranya pengalaman anda seputar *sosok ideal* kelompok tani ini akan mewarnai dan menjadi pengalaman kita bersama di rubrik cengerama majalah *ekstensia* volume yang akan datang!

andi sumarga

H.Oyon Tahyan Petani Pemimpin Pemimpin Petani

Siapa yang tidak kenal H. Oyon Tahyan, dalam dua dekade terakhir ini sosok pemimpin petani-nelayan bukan hanya dikenal oleh masyarakat pertanian nasional, namun sudah melebar ke lintas sektor di tingkat nasional, malah sejak tahun 1984 ketika Indonesia dicanangkan sebagai negara dunia ketiga yang berhasil mencapai swa sembada beras, nama Oyon Tahyan-pun ikut "go internaional" dikenal di Manca Negara.



Siapakah H. Oyon Tahyan ?

Sekarang ia anggota Komisi IV MPR/DPR-RI 1992-1997 dari daerah pemilihan Jawa Barat. Namun bukan cuma itu, H. Oyon Tahyan telah empat periode atau empat kali pemilihan mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Majelis yang terhormat itu, yakni sejak periode tahun 1977-1982 hingga sekarang. Sungguh suatu prestasi yang "bukan main", terlebih lagi karena H. Oyon Tahyan adalah seorang petani yang hanya tamatan HIS atau setara Sekolah Dasar. Memang sebuah prestasi gemilang yang tidak sembarang orang bisa meraihnya.

H. Oyon Tahyan yang lahir di Rajapolah - Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1924, memang terlahir untuk menjadi petani pemimpin dan menjadi

petani. Menelusuri jejak penelitian kariernya sebagai pemimpin petani, sungguh kita harus angkat topi dan bukan cuma itu, *ekstensia* sengaja menampilkannya dalam Rubrik CERMIN kita ini agar penelitian karier dan perjuangan H. Oyon Tahyan dapat diteladani oleh para pemimpin petani lainnya terutama generasi muda calon-calon penerusnya.

Sejak masa kanak-kanak, Oyon kecil yang masih sekolah di Sekolah Desa yang kemudian pindah ke Ciawi setelah disana berdiri HIS, memang sudah menyukai dan menyenangi bidang pertanian. Ia memelihara ayam, itik, burung merpati dan sangat hobi bercocok tanam menanam segala kacang-kacangan, bawang-bawangan, jagung dan tanaman lainnya. Keinginan untuk mencoba sendiri dan mengamati

hasil-hasil tanaman yang dilakukannya sendiri itu menyebabkan orang-orang didesanya menjulukinya "Tuan Coba". Untuk mengembangkan hobinya itu, "Uyut Sewi" uyut angkat (isteri Kepala Desa) yang membesarkan Oyon kecil ini sengaja menyerahkan sebagian lahan sawah dan pekarangannya ditanam kelapa untuk dikelolanya dan dari hasilnya itu Oyon kecil diharuskan belajar membiayai kebutuhannya sendiri.

Secara kebetulan, lahan yang dikelola Oyon kecil ini berada di pinggir jalan desa, sehingga sangat strategis menjadi "tontonan" bagi para petani disekitarnya. Saat itu tanpa disadari, lokasi penyaluran hobi "Tuan Coba" ini sudah berfungsi seperti Demplot, jadi tempat percontohan bagi para petani sekitarnya. Banyak petani bertanya dan meminta benih atau bibit tanaman yang ditanam oleh "Tuan Coba" itu.

Jaman Jepang, ketika usianya mencapai \pm 18 tahun, Oyon Tahyan mengikuti Kursus Tani Desa dan menjadi peserta paling muda saat itu. Berbekal pengetahuan dan keterampilan hasil kursus itu, Oyon semakin mantap melakukan percobaan dalam aneka usahatani pada lahan yang diberi dari Uyut Sewi, dan mengembangkannya sebagai lahan percontohan dan pada saat tertentu sengaja mengundang para petani ke lahannya untuk melihat hasil dari usahanya. Sekarang pola atau cara seperti itu kita kenal sebagai metoda penyuluhan "temu lapang".

Disamping melakukan kegiatan "percobaan" dan "percontohan/demplot" aneka usahatannya Oyon

remaja aktif pula menjadi pelatih pandu dan di jaman Jepang jaman-nya Seinendan dan Kaibodan, Oyonpun aktif jadi pelatih baris berbaris dan taiko. Karena aktivitasnya itu, camat Uping berkenan memberi peluang kepada Oyon untuk magang di kantor kecamatan. Oyon setuju dengan syarat jangan diangkat menjadi pegawai kecamatan karena yang bersangkutan ingin tetap jadi petani. Dengan kedudukannya sebagai pemagang di kantor kecamatan, Oyon remaja ini semakin berpeluang mengembangkan bakat kemampuannya. Di saat para petani mengalami serangan hama tikus, Oyon remaja itu berprakasa untuk melakukan gerakan pemberantasan tikus dengan metode "setor buntut". Di aspek lainnya, Oyon-pun mengembangkan sistem pengamanan kampung dari gangguan maling dengan sistem ronda yang sekarang dikenal dengan sistem siskamling.

Suatu hari Oyon remaja ini diterima menjadi siswa di Sekolah Perkebunan di Malang, namun keinginannya untuk bersekolah ini





tidak disetujui oleh kakek angkatnya, Aki Yuda Wisastra. Alasannya, buat apa sekolah pertanian tinggi-tinggi dan jauh-jauh sampai ke Malang segala. Kalau ingin pandai bertani tidak usah jauh-jauh, belajarlah langsung kepada petani yang sudah berhasil di sini. Dengan cara itu, tidak usah meninggalkan kampung halaman dan dapat terus mengolah lahan sambil belajar. Dengan petunjuk sang kakek angkat itu, Oyon remaja tidak jadi sekolah, tapi belajar bertani kepada petani yang berhasil di wilayahnya. Ia belajar bertani padi kepada Aki Endi, belajar beternak kepada Abah Aminta dan belajar beternak ikan kepada Aki Udin yang telah berhasil di bidangnya masing-masing dengan cara magang.

Karena kepemimpinannya yang menonjol Oyon Tahyan sempat diangkat sebagai juru penerang disaat waktu kampanye Negara Kesatuan RI. Dari keberhasilannya

itu ia diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Kecamatan Cisayong. Dengan kedudukannya sebagai pegawai penerangan, selain melakukan penerangan politik kepada masyarakat, ia-pun aktif memberikan penerangan pertanian bersama mantri tani di wilayahnya. Karena kecintaannya kepada pertanian di tahun 1955 ia berhenti jadi pegawai dengan permohonan sendiri. Itupun baru dapat dikabulkan setelah Oyon mengajukan permohonan berhenti untuk yang ketiga kalinya.

Setelah kembali jadi petani, Oyon lebih leluasa untuk mengembangkan bakat kemampuannya untuk memimpin para petani di kampung Pukes dengan berbagai kegiatan di antaranya memerangi buta huruf, membangun jalan kampung secara gotong-royong, mengembangkan upaya pemanfaatan pekarangan dengan apotik hidup, dan warung hidupnya. Itu dilakukannya di tahun 60-an sebelum lahirnya program PKK.

Keberhasilannya dalam menggerakkan masyarakat petani dalam pembangunan lingkungannya mengantarkan Oyon Tahyan diangkat sebagai Ketua Pembangunan Wilayah Kecamatan Rajapolah. Salah satu aktivitas yang sangat membekas di hati Oyon Tahyan pada periode ini ialah kegiatan menyelenggarakan pengumpulan dana melalui pemertasan sandiwara dan undian berhadiah untuk pembiayaan pembangunan SMP secara swadaya.

Di tahun 1963 ketika mulai diperkenalkannya varietas padi VUTW PB-5 dan PB-8, Kecamatan Rajapolah-pun seperti daerah lainnya dibebani target luasan areal



tanam tertentu. Oyon Tahyan selaku tokoh tani di wilayahnya diminta oleh Camat untuk merancang gerakan penyuluhan kepada para petani dan kemudian keluarlah ide cemerlangnya. Dengan persetujuan atau legitimasi dari Pak Camat, Oyon Tahyan mewujudkan gagasannya dengan menyelenggarakan kursus tani bagi 5 orang tokoh dari setiap desa. Kursus diselenggarakan langsung di sawah milik Oyon Tahyan setiap 2 kali seminggu (Minggu dan Kamis) selama 10 minggu. Selesai kursus para pesertanya membangun kesepakatan membuat Rencana Tindak Lanjut berupa gerakan lomba penanaman padi varietas unggul tahan wereng PB-8 di setiap RT di wilayahnya. Seluruhnya mencapai 350 RT, se kecamatan Rajapolah. Dengan demikian seluruh peserta kursus merasa terpacu untuk mengadu prestasi dengan jalan membina RT binaannya secara sungguh-sungguh di desanya masing-masing. Lomba ini mendapat tanggapan positif dari Bupati Tasikmalaya yang secara spontan merespons akan

memberi hadiah sepasang kerbau kepada Pemenangnya. Lombapun semakin semarak manakala dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat yang juga berkenan untuk dapat hadir pada saat pembagian hadiah dan pengumuman pemenangnya. Pada waktunya, Gubernur Jawa Barat saat itu membawa hadiah-hadiah bagi para pemenangnya berupa alat-alat pertanian sebanyak satu truk.

Bupati Tasikmalaya sangat berkesan akan gagasan Oyon Tahyan yang telah diwujudkan di Kecamatan Rajapolah ini dan meminta Pak Oyon untuk menyebarluaskan pola gagasannya itu ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Itulah saat pertama kalinya Pendopo Kabupaten digunakan kursus tani bagi kepala desa dan tokoh-tokoh tani di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui gerakan itu, Tasikmalaya merupakan kabupaten yang dinilai sangat berhasil dalam pemasyarakatan padi varietas PB5-PB8 di Jawa Barat. Karena keberhasilannya itu pula maka Solihin GP yang pada

waktu itu menjabat Gubernur Jawa Barat berkenan memanggil Oyon Tahyan ke tingkat propinsi untuk berkampanye bersama Dinas Pertanian ke kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Gejolak semangat kepemimpinannya ternyata tidak berhenti sampai di sini. ditahun 1970 Oyon Tahyan memelopori pembentukan Badan Musyawarah Kontaktani-nelayan (Bamukti) di Kabupaten Tasikmalaya dan terpilih menjadi ketuanya. Kemudian ditahun 1971 ia-pun merupakan pelopor untuk mewujudkan Pekan Nasional Pertemuan Kontaktani-nelayan yang ke I di Cihea yang dihadiri oleh para kontaktani-nelayan se Indonesia. Disaat itu pulalah Oyon Tahyan terpilih menjadi Ketua Bamukti tingkat Nasional.

Ide atau gagasan untuk mengumpulkan para kontaktani se Indonesia ini mencuat dalam pikiran Oyon Tahyan karena menurutnya keterbelakangan yang dialami oleh para petani-nelayan kita terutama disebabkan karena sempit atau tertutupnya wawasan mereka, ibarat katak dalam tempurung. Semangat dan kecintaannya kepada petani inilah yang mendorong Oyon Tahyan untuk senantiasa tampil paling depan dalam setiap upaya memerangi keterbelakangan petani-nelayan, membuang tempurung yang menyesak dan membodohkan para petani-nelayan.

Kepemimpinan Oyon Tahyan yang dilandasi cita-cita untuk memajukan petani ini ternyata memperoleh perhatian dan kepercayaan Menteri Pertanian, Bapak

Thoyib Hadiwijaya yang meresponsnya dengan meminta Pak Oyon untuk membantu Pak Affandi dan Pak Salmon Padmanagara menyukseskan prgram BIMAS. Sejak itulah Oyon Tahyan menjadi duta petani berkeliling ke seluruh pelosok di tanah air untuk menggelorakan semangat para petani guna mencapai swasembada beras. Ketika pada akhirnya Indonesia berhasil meraih prestasi yang mendunia mencapai swasembada beras, ternyata pikir dan rasa tokoh kita yang satu ini tidak berhenti di sini. Empatinya yang tinggi terhadap masyarakat yang ditimpa keseng-saraan dan kelaparan telah menggelitik nuraninya dan menyembulkan sebuah ide atau gagasan untuk mewujudkan rasa syukur para petani Indonesia atas keberhasilan meraih swasembada beras ini dilakukan melalui karya nyata Sumbangan Bantuan Pangan bagi Rakyat Afrika yang tengah dilanda musibah kelaparan akibat kekeringan yang panjang. Inilah salah satu gagasan dan kepeloporan Oyon Tahyan yang "mendunia" dan terus berjalan hingga saat ini melalui pengembangan program Magang bagi para petani Afrika yang mendapat tanggapan dan nilai positif di mata dunia.

Menelusuri jejak langkah penelitian karir kepemimpinan H. Oyon Tahyan menjadi pemimpin yang memimpin petani ini, maka wajarlah apabila yang bersangkutan memperoleh segudang tanda jasa dan penghargaan serta kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting diberbagai organisasi (*lihat box*). Sosok petani pemimpin yang satu ini memang tidak pernah kering

dan kehabisan ide, gagasan dan prakarsa, serta keinginan yang kuat untuk mewujudkannya menjadi karya dan karya yang nyata. Ia senantiasa dinamis, tidak pernah mau berhenti dan puas di saat satu ide telah terwujud, dalam satu karya besar sekalipun, namun terus dan terus maju seolah tak pernah mengenal kata akhir.

Karya-karyanya yang orisinal seperti mengembangkan metoda percontohan dari "Tuan Coba" ini yang dikemudian hari dikenal dengan metoda demplot telah ia lakukan jauh sebelum metoda demplot ini dimasyarakatkan. Demikian pula dengan pola gerakan penanam varietas padi PB-5 dan PB-8nya yang diawali dari kursus tani, magang dan penerapan dalam areal yang lebih luas di tiap RT (sekarang kita kenal dengan metoda Demfarm) serta lomba usahatani, kesemuanya itu muncul secara orisinal dari otak dan jiwa seorang petani yang hanya tamatan HIS ini namun memiliki jiwa yang bebas merdeka dan mandiri serta tampil eksis dengan penuh percaya diri serta subyek dalam bidang yang ditekuninya. Karena ia seorang petani, karya-karya besar yang telah diraihinya itu ternyata senantiasa tampil dalam sebuah kesahajaan yang tampak amat wajar, kesahajaan seorang petani, meski dengan segudang prestasi.

Satu lagi yang rasanya sayang untuk dilewatkan dari pengamatan kita semua, yakni mengenai kondisi

iklim penyuluhan pertanian di masa lalu dijamannya Oyon Tahyan muda, ternyata disaat itu iklim penyuluhan pertanian benar-benar mampu menciptakan iklim dan kondusif untuk muncul dan berkembangnya berbagai ide, gagasan, kepeloporan dan kepemimpinan serta karya-karya yang muncul dari sosok petani. Peranan aparaturnya seperti yang dituturkan oleh Oyon Tahyan dalam penuturan sejarah karirnya itu, ternyata sejak mulai Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur sampai Menteri terkesan sangat akomodatif serta berperan sebagai pemberi respon positif terhadap aspirasi, gagasan, karsa dan karya yang muncul dari bawah, dari petani. Rupanya hal inipun layak untuk melintas dalam CERMIN kali ini. Iklim penyuluhan dimasa lalu ternyata telah melahirkan satu sosok pemimpin petani yang benar-benar petani pemimpin, sosok seorang Oyon tahyan yang hingga kini masih dengan tegar tampil sebagai panutan para petani-nelayan. Rentang waktu yang telah dijalani rasanya telah cukup untuk proses belajar bagi para pemimpin petani generasi berikutnya, keteladanan Oyon Tahyan seyogyanya harus sudah beranak pinak dengan kemunculan Oyon-Oyon yang baru dari generasi penerusnya, tentu, harapannya kelahirannyapun seyogyanya dibarengi dengan kadar dan kualitas yang diteladankan oleh tokoh tani kita ini, H. Oyon Tahyan. (zet)

Pengalaman dalam Organisasi

1. Tahun 1953 – 1955 Ketua Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Anak Cabang Kecamatan Cisayong.
2. Tahun 1963 – 1966 Ketua Anak Cabang PNI Kecamatan Rajapolah.
3. Tahun 1963 membangun kampung–kampung yang sehat, bersih, warung hidup dan apotik hidup. Buta Huruf dan Keluarga Berencana.
4. Tahun 1963 menghimpun dan mengembangkan Kelompok Tani di Kecamatan Rajapolah melalui kursus tani dan perlombaan tanam padi PB 5 dan PB 8.
5. Tahun 1969 – 1973 sebagai Ketua Sekber Golkar Kecamatan Rajapolah.
6. Tahun 1970 menyelenggarakan musyawarah kontaktani di kabupaten dan terpilih menjadi ketua Badan Musyawarah Kontak Tani– Nelayan teladan (Bamukti) Kabupaten Tasikmalaya.
7. Tanggal 22 September 1971 terpilih menjadi ketua Badan Musyawarah Kontak Tani–Nelayan Jawa Barat.
8. September 1971 pelopor dan pelaksana Pekan Nasional Pertemuan Kontak Tani–Nelayan seluruh Indonesia di Cihea Kabupaten Cianjur – Jawa Barat.
9. Tanggal 23 September 1971 terpilih sebagai ketua Bamukti Nasional pada waktu diselenggarakan Penas I di Cihea Cianjur.
10. Tahun 1970 – 1973 Komisaris Gabungan Koperasi Pertanian (Gakoperta) Jawa Barat.
11. Tahun 1973 – 1976 Komisaris di Puskud Jawa Barat.
12. Tahun 1974 – 1977 Asisten Bidang Pertanian DPD Golkar Jawa Barat.
13. Tahun 1974 – 1977 Wakil Sekjen Bidang Pertanian DPD HKTI di Jakarta.
14. Tanggal 1 Juni 1977 Ketua IV DPP HKTI.
15. Tahun 1979 – 1982 anggota pleno DPP HKTI.
16. Tahun 1980 terpilih menjadi ketua Kontak Tani–Nelayan Andalan Nasional pada Penas di Sempidi, Bali sampai tahun 1991.
17. Tahun 1983 – 1985 Wakil Ketua Departemen Pertanian Tanaman Pangan HKTI.
18. Sebagai pelopor dan pendiri Presidium Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam Hutan Tanah dan Air (KPSA) Pusat, sehingga tanggal 28 Oktober 1985 sampai sekarang anggota KPSA Pusat.
19. Tahun 1985 Pelopor dalam mengumpulkan sumbangan pangan ke 22 negara di Afrika dan diteruskan menerima petani–petani Afrika magang di Indonesia.
20. Tahun 1986 sebagai ketua Departemen Pendidikan Latihan Penyuluhan Pertanian, HKTI.

21. Tahun 1990 - 1994 sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH/HKTI) bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
22. Tanggal 12 Juli 1991 terpilih kembali jadi KTNA Nasional sampai dengan tahun 1996.
23. Anggota Pleno Dekopin.
24. Anggota Tim Kerja Departemen Tani-Nelayan DPP Golkar.
25. Tanggal 10 Juli 1991 terpilih menjadi anggota pengurus Masterindo Pusat.
26. Tanggal 15 Desember 1992 sebagai Pelopor dan Pendiri Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dan salah satu wujudnya mendirikan Yayasan Pelatihan Pertanian Terpadu "Karya Nyata" Kampung Cinagara, Desa Cinagara, Kecamatan Ciawi Bogor - Jawa Barat.
27. Tahun 1992/1993 - 1993/1994 sebagai anggota Tim Pembina Pusat Hubungan Melembaga KTN dan KUD dengan tugas pokok melakukan supervisi ke daerah, mempersiapkan dan menyusun program pelatihan terpadu serta melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan hubungan melembaga di daerah-daerah.
28. Tanggal 4 Des. 1993 sebagai Pelopor dan pendiri Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI) dan terpilih sebagai Ketua.
29. Tahun 1993 - 1997 terpilih menjadi ketua V DPP HKTI Bidang Pertanian dan Pedesaan.

Riwayat dalam Keanggotaan DPR-RI

1. Tahun 1977 - 1982 diangkat menjadi anggota Komisi IV MPR/DPR-RI, oleh Presiden RI.
2. Tahun 1982 - 1987 diangkat kembali di Komisi IV DPR-RI
3. Tahun 1987 - 1992 terpilih kembali menjadi anggota Komisi IV MPR/DPR-RI daerah pemilihan Jawa Barat.
4. Tahun 1992 - 1997 terpilih menjadi anggota Komisi IV MPR/DPR-RI dari daerah pemilihan Jawa Barat.

RAPAT PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT NASIONAL

Dalam rangka diseminasi kehadiran SKB Mendagri -Mentan No. 54 tahun 1996 dan 301/Kpts/LP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan rapat penyuluhan pertanian Tingkat Nasional yang dihadiri oleh Kepala Subdinas Penyuluhan dan Penyuluhan Koordinator pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi se Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan di Tawangmangu pada tanggal 9 s/d 12 Desember 1996 ini dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir. Amrin Kahar.

Materi-materi yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain kebijaksanaan Penyuluhan Pertanian oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Peranan Penyuluhan Pertanian dalam mengoperasionalkan konsep dan strategi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta beberapa ungkapan pengalaman dan masukan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh Kepala Subdinas Penyuluhan NTB, Lampung dan koordinator penyuluh Jawa Barat.

Dalam rangkaian rapat tersebut, peserta juga diajak untuk mengunjungi beberapa obyek antara lain

BPP Karang Pandan, OISCA Karang Pandan, Kelompok Tani Tunggul Rejo dll.

Sebagai hasil dari rapat Penyuluhan Pertanian tersebut dirumuskan 23 butir rumusan antara lain :

- ❑ Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pokok pembangunan pertanian dan bukan sebagai pendukung pembangunan pertanian.
- ❑ Dalam rangka mengefektifkan dan mengoperasionalkan SKB Mentan dan Mendagri No. 54 Thn 1996 dan 301/Kpts/LP.120/4/96 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian "perlu mempertimbangkan asas desentralisasi dengan melakukan hubungan yang serasi dan saling mengisi antara BIPP dengan Dinas Tingkat I dalam Pembinaan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian".
- ❑ Dalam rangka mewujudkan penyuluhan yang lebih terarah dan terkoordinasi perlu ada kemauan sikap dalam menyusun rencana yang terpadu dan terkoordinir oleh setiap unit eselon II, hal ini harus tercermin dalam juklak masing-masing eselon II yang secara operasional melibatkan unsur penyuluhan di tingkat I dan II.

rm. chaidirsyah

Visi Pertanian Tahun 2020

DALAM PENATARAN/PENYEGARAN WARTAWAN PWI JAYA KOORDINATORIAT DEPARTEMEN PERTANIAN

Tahun 2003, Tahun 2010 dan Tahun 2020 adalah tahun-tahun yang paling sering disebut. Dan, bagi kita di sektor pertanian, apa pula arti tahun-tahun ini.

Tahun 2003, telah disepakati merupakan saat dimulainya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Tahun ini tepat bersamaan dengan akhir Repelita VII. Jadi Repelita VII, dengan demikian merupakan Repelita persiapan akhir menyongsong perdagangan bebas ASEAN ini.

Tahun 2010 merupakan tahun dimulainya perdagangan bebas bagi perekonomian maju di kawasan Asia Pasifik.

Tahun 2020, kita memasuki era perdagangan bebas (GATT/WTO). Sedang tahun 2018, tahun terakhir PJP II, merupakan persiapan akhir kita memasuki era perdagangan bebas. Bahkan di dalam Putaran Uruguay, bidang pertanian untuk pertama kalinya masuk ke dalam agenda perdagangan bebas.

Tantangan Kita

Menyongsong tahun-tahun ini, kita ingat pesan Presiden Soeharto yang mengatakan "*mau atau tidak mau, suka atau tidak suka*". era ini harus kita masuki. Maka, tidak ada

pilihan lain, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Salah satu implikasi perdagangan bebas ini, menuntut kemampuan sistem pertanian kita untuk bersaing dalam menghadapi perusahaan-perusahaan agribisnis multinasional yang selama ini telah menguasai pasar.

Harus diakui, sementara ini, produk pertanian negara-negara maju lebih unggul. Keunggulan ini tidak lepas dari tingginya proteksi dan subsidi. Dan, kesepakatan Putaran Uruguay mengharuskan pembukaan akses pasar dan penghapusan subsidi. Pasar internasional akan semakin terbuka dan daya saing produk-produk pertanian semakin meningkat.

"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka".
era ini harus kita masuki. Maka, tidak ada pilihan lain, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya





Mempersiapkan dan mengembangkan komoditas-komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global

Menghadapi tantangan ini, ada yang pesimis, seakan-akan pada saatnya Indonesia akan dibanjiri produk pertanian negara asing, karena kita kalah unggul. Mungkin ada benarnya. Tetapi kitapun harus melihat terbukanya pasar negara lain untuk dimasuki oleh produk pertanian Indonesia. Ini adalah peluang.

Jadi persoalan kita sekarang adalah :*"Bagaimana kita mampu memanfaatkan peluang itu"*, dalam arti bahwa bila kita terlambat mempersiapkan dan mengembangkannya komoditas-komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, maka peluang yang bagus tersebut akan segera diambil alih oleh negara-negara berkembang lainnya yang lebih siap.

Visi Pertanian dan Petani 2020

Menghadapi tantangan ini, maka harus ada kesiapan kita. Kesiapan pertanian dan kesiapan pelaku utama pembangunan pertanian. **Dr. Faisal Kasryno**, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa visi pertanian tahun 2020 adalah sektor pertanian yang tangguh, yang modern dan efisien. Rumusan ini dikemukakan kepada para wartawan PWI Jaya Koordinatoriat Departemen Pertanian yang mengikuti penataran/ penyegaran di Perkebunan PTPN VIII Gunung Mas, awal tahun 1997 ini.

Rumusannya memang sederhana, tangguh, modern, efisien ada 4 (empat) isinya:

Pertama, Pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan. Sumberdaya ini terdiri dari lahan dan air, tenaga kerja, modal dan teknologi.

Kedua, Penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif (dimensi horizontal, dimensi vertikal maupun dimensi regional).

Ketiga, Penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis.

Keempat, Peningkatan efisiensi usaha dalam sistem agribisnis dengan menghasilkan produk pertanian berdaya saing dan kandungan IPTEK yang tinggi, serta memberikan peningkatan kesejahteraan dan masyarakat konsumen secara berimbang.

Dengan kata lain, pembangunan pertanian memasuki abad 21 mampu menguasai teknologi tinggi, padat modal dan nilai tambah yang mampu bersaing dengan sektor lain serta mampu menghadapi tekanan dari berbagai lingkungan strategis dalam era liberalisasi perdagangan internasional dan investasi.

Tapi, teknologi maju yang merupakan sumberdaya yang paling efisien harus secara teknis dapat diterapkan, secara ekonomi menguntungkan, secara sosial budaya dapat diterima dan ramah lingkungan.

Pelaku utama pembangunan pertanian itu adalah petani dan nelayan. Visinya-pun perlu dibangun. Kemampuan petani-nelayan harus ditingkatkan dari subsistem menjadi petani progresif dan komersial serta masyarakat petani yang berorientasi bisnis.

Petani harus mampu berkompetisi dengan usaha di sektor lain. Oleh karena itu kemampuan manajerial petani harus ditingkatkan.

Petani Masa Depan

Dengan visi pertanian dan petani tahun 2020 ini, maka pertanian masa depan, harus merupakan suatu sektor ekonomi dengan ciri-ciri sbb :

- a) keterpaduan dalam suatu sistem agribisnis,
- b) penggunaan IPTEK dalam pemanfaatan sumberdaya, sehingga agribisnis,
- c) pengembangan produk pertanian berorientasi pasar,
- d) pengelolaan usaha pertanian secara profesional,
- e) teknologi yang dapat mengurangi ketergantungan pada alam dan ramah lingkungan, serta
- f) kelembagaan dan kemitraan usaha yang didasari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Pertanyaan kita sekarang. Bagaimana visi para penyuluh pada tahun 2020 ?

Godlim Panggabean

*Petani menuju tahun 2020.
Penyuluh ?*



Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ?

Kehadiran Pusat Penyuluhan Pertanian pada saat sekarang ini memang dirasakan memberi angin segar terhadap situasi penyuluhan pertanian yang pada tahun-tahun terakhir ini agak kedodoran.

Terbitnya SKB Mendagri -
Mentan Nomor 54 Tahun 1996
301/Kpts/LP.120/4/1996

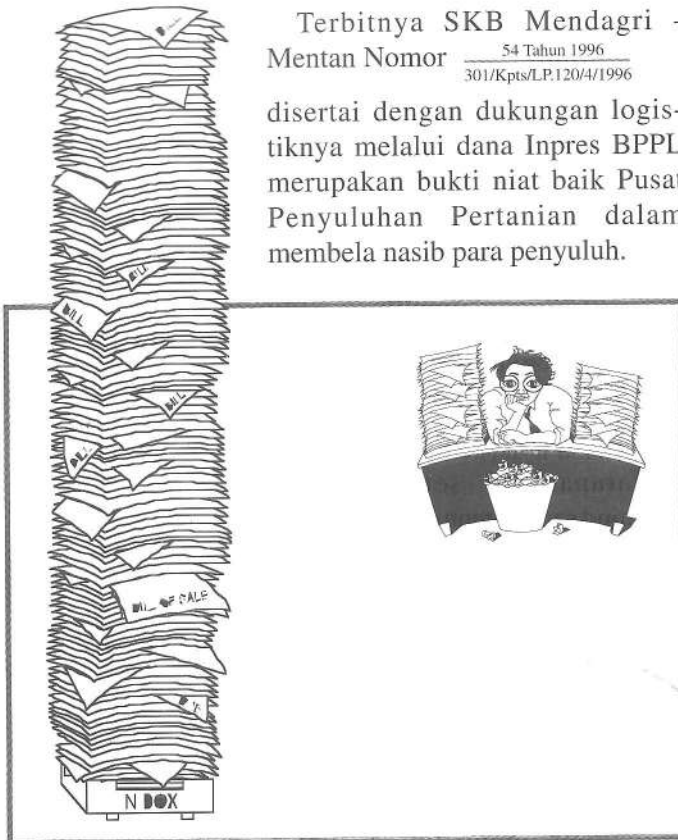
disertai dengan dukungan logistiknya melalui dana Inpres BPPL merupakan bukti niat baik Pusat Penyuluhan Pertanian dalam membela nasib para penyuluh.

Napas baru dengan terbitnya SKB Mendagri - Mentan ini sudah selayaknya ditindaklanjuti dengan terbitnya berbagai pedoman/petunjuk yang mendukung, namun demikian sampai sekarang ini pedoman/petunjuk-petunjuk tersebut belum sepenuhnya kami pahami benar maksud dan tujuannya selain dari butir-butir SKB dan rumusan dalam Juklaknya.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan adanya petunjuk yang lebih jelas tentang bagaimana menyusun Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Khusus, untuk Petunjuk Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian sebaiknya ditambah dengan pelatihannya karena banyak hal-hal baru yang agak berbeda dengan tatacara Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian yang dulu.

Ir. Florentin Watkaat

Penyuluh TP Kodya Ambon
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kodya Ambon, Maluku



Kita berceloteh tentang opini, harapan, kondisi faktual, komentar terhadap kiprah penyuluhan pertanian baik itu yang terjadi di lapangan maupun hal-hal lain yang kiranya perlu untuk diketahui oleh pembaca *ekstensia*, *ekstensia* menerima celoteh para pembaca untuk dapat dimuat dalam rubrik CELOTEH.

Tulisan bersifat ringkas dan dikirimkan ke *ekstensia* dengan dilengkapi identitas penulis (foto copy KTP/SIM/Karpeg dll). *ekstensia* akan memuat tulisan yang lengkap dan berwenang untuk memutuskan tulisan yang akan dimuat.

Selamat bekerja, BIPP !

Tahun 1996 banyak sekali perubahan yang menyangkut penyuluhan pertanian di Indonesia. Diantaranya adalah kepercayaan atau mandat pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BIPP. Ini secara **strategis** adalah sangat penting karena merupakan suatu proses menuju desentralisasi urusan penyuluhan pertanian di Daerah Tingkat II.

Sebagai organisasi baru, BIPP perlu melakukan konsolidasi dalam berbagai hal. Pertama; melengkapi personalia sesuai kebutuhan. Kedua; melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketiga; menyatukan semua penyuluh. Keempat; menata penugasan semua penyuluh agar sesuai dengan strategi dan implementasi penyuluhan pertanian setempat. Kelima; menyusul rencana strategis penyuluhan pertanian diwilayahnya, termasuk menyusun program. Dan Keenam; menerapkan prinsip dan metodologi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kondisi setempat dan pendekatan model penyuluhan yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia dalam memberdayakan petani.

Pada saat ini yang sangat mendesak untuk dilakukan penyesuaian

oleh BIPP (termasuk penyuluh pertanian) adalah kecenderungan menyerahkan urusan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya pelayanan langsung kepada masyarakat/Daerah Tingkat II, dengan kata lain desentralisasi. Kecenderungan lainnya yang mungkin perlu mendapat pertimbangan adalah swastanisasi penyuluhan pertanian.

Banyak pihak yang mengharapkan BIPP berperan dalam mendorong *kemandegan* penyuluhan pertanian di Indonesia dengan jalan berkiprah meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian, menyesuaikan dengan arus desentralisasi, globalisasi, meningkatkan kinerja personel penyuluh pertanian dan merespon kebutuhan dan aspirasi petani.

Harapan ini semoga dapat terwujud segera, tentu saja kepiawai-an personalia BIPP dan dukungan berbagai pihak (Pemda, Penyuluh Pertanian, Petani-nelayan) dituntut untuk mewujudkan semua harapan tersebut.

Terakhir, selamat bekerja BIPP. Semoga hari esok lebih baik (as)

Ir. Yusuf Bunyamin, MBA

Penyuluh Pertanian,
Pusat Penyuluhan Pertanian, Jakarta.

BIPP, APALAGI YANG MASIH KURANG ?

Begitu pertanyaan orang! rasanya memang masih ada yang kurang bagi BIPP ini. coba bayangkan BIPP ini seumpama mobil pelayanan umum.

- + Jika ditanya, sudah ada sopirnya?
- Ya, sudah ada sebab ada Kepala BIPP-nya!
- + Sudah punya izin trayek?
- Ada juga, SKB sudah turun bahkan juklaknya turut melengkapi.
- + Punya penumpang?
- Lho itu kan, adalah kelompok penyuluh yang antre daftar?
- + Punya tujuan?
- Apa memberdayakan dan membangun kemandirian petani

nelayan bukan tujuan! Coba deh, baca lagi 15 fungsi BIPP di SKB itu!

- + Punya bensin buat mobil ?
- Ya... lumayan ada dana Inpres dan BKOPP-nya.
- + Lho, jika begitu mulus dong jalan mobil itu.
- Bukan itu masalahnya!
- + Lantas apa?
- BPP ini kan, mobil rakitan! Biasanya mobil rakitan itu macet disana sini. Tidak standarnya, bangunan, tempat duduk, kapasitas duduk, instrumentasi yang ada di dalamnya. Bahkan sumberdayanya-pun rasanya masih keberatan menanggung beban 15 fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
- + Lho?
- Ada lagi yang lebih parah!
- + Lho?
- Lho lagi, sang sopir ini belum punya SIM!
- + Lho?
- Bukannya lho! mestinya siapa yang peduli begitu!(as)

Ir. Dana Budiman

Kasie Penyuluhan Dinas Perkebunan
Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.



Hidupkan Kembali BPP....!

Saya tidak tahu persis apa isi SKB Mentan-Mendagri 1996 yang baru ini, tetapi dari banyak pembicaraan katanya SKB ini akan menghidupkan kembali BPP, malah di tingkat Kabupaten juga akan ada lembaga yang menangani penyuluhan pertanian.

Sebagai KTNA, saya berterima kasih sekali dengan adanya niat menghidupkan kembali BPP, karena saya pernah mengalami jayanya BPP sebagai tempat bertanya petani dengan pelayanan penyuluhnya yang cukup memuaskan, lalu saya juga pernah mengalami sulitnya mencari informasi di BPP karena BPPnya kosong.

Harapan saya dengan adanya SKB ini BPP akan lebih berkembang

baik fasilitasnya, kegiatannya dan juga penyuluhnya tanpa kecuali untuk kegiatan KTNA ataupun kelompok tani semoga saja ada angin baru sebab sekarang ini sulit atau jarang sekali ada kegiatan yang sifatnya kontinyu walaupun ada hanya sekali-sekali saja itupun kadang hanya kelompok yang dibentuk oleh proyek saja tersentuh.

Dengan adanya upaya untuk menghidupkan kembali BPP ini, maka jangan dilupakan kegiatan untuk kelompok tani atau KTNAny sehingga pesan KTNA sebagai mitra penyuluh akan semakin terasa (rm)

Ny. Atih Ibrahim

KTNA Kab., Tasikmalaya
RT.01 RW. II Desa Bantarkalong
Kec. Cipatujah
Kab. Tasikmalaya-Jabar



EVERETT M ROGERS & F. Floyd Shoemaker

Penyunting : Drs. Abdillah Hanafi

MEMASYARAKATKAN IDE-IDE BARU

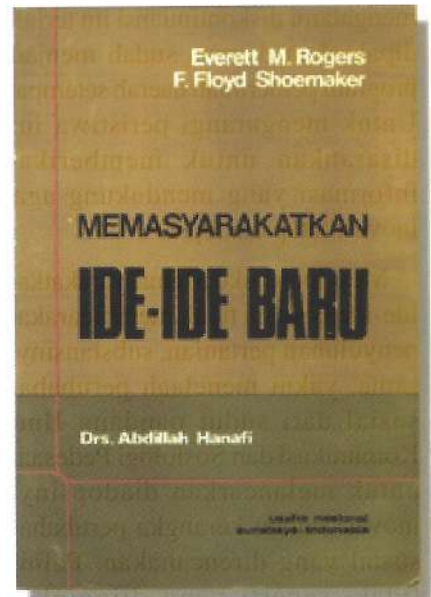
Usaha Nasional, Surabaya, 1987

197 halaman

PENYULUHAN TIDAK SELALU BERAKHIR PADA INOVASI

Memandang proses adopsi selalu berakhir pada tahap penerimaan (adopsi), dimana seseorang menggunakan inovasi secara tetap, merupakan pandangan umum dari banyak orang, termasuk didalamnya penyuluh pertanian. Bagaimana tidak ? Teori itu, yang lengkapnya terdiri dari : tahap Kesadaran, Menaruh minat, Penilaian, percobaan dan penerimaan atau adopsi, sejak dikemukakan oleh ahli-ahli sosiologi pedesaan tahun 1955 telah dipakai dan mendapat pujian. Bahkan, pandangan tersebut sering dikutip dan diajarkan di sekolah-sekolah kejuruan pertanian yang banyak melahirkan penyuluh lapangan. Sekarangpun, tidak jarang masih menjadi acuan utama dalam kursus atau pelatihan bagi penyuluh.

Benarkah proses adopsi tersebut selalu berakhir pada tahap penerimaan (adopsi)?



Pandangan tradisional ini dikritik oleh Everett M Rogers dan F. Floyd Shoemaker dalam buku ini. Menurut mereka, pandangan terhadap proses adopsi itu terlalu sederhana. Didalamnya terdapat kekurangan, yaitu : (1) hasilnya bisa berupa penolakan terhadap inovasi, (2) proses itu tidak selalu dilewati secara berurutan, (3) proses perubahan mental ini masih berlanjut pada mencari informasi untuk memperkuat keputusan yang telah diambil. Bagian yang terakhir ini cukup menarik untuk dicermati. Ternyata seseorang yang telah mengadopsi suatu inovasi bisa menghentikan yang telah menjadi keputusannya. Peristiwa ini disebut dengan diskontinuitansi. Penyebabnya adalah karena mengganti dengan inovasi baru yang lebih baik menurut dia atau disebabkan kecewa atas hasil inovasi itu. Peristiwa ini sering terjadi di lapangan dan biasanya dianggap sebagai kegagalan sang pembawa inovasi, penyuluh pertanian, misalnya. Padahal bisa saja terjadi, inovasi yang

mengalami diskontinuansi itu terlalu dipaksakan, karena sudah menjadi program pemerintah daerah setempat. Untuk mengurangi peristiwa ini, disarankan untuk memberikan informasi yang mendukung agar inovasi tetap diadopsi.

Meskipun buku *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru* ini tidak membicarakan penyuluhan pertanian, substansinya sama, yakni menelaah perubahan sosial dari sudut pandang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi Pedesaan untuk melancarkan diadopsinya inovasi dalam kerangka perubahan sosial yang direncanakan. Paling tidak, seperti yang diinginkan penyunting buku ini, akan memberi bekal pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana ide-ide baru itu tersebar dalam suatu sistem sosial.

Dikemas dengan bahasa yang komunikatif, membuat buku ini lebih mudah dicerna oleh pembaca. Ini menunjukkan kepiawaian pen-”sari” dan penyusun buku ini yang semula dalam bentuk buku ilmiah. Selain itu, penyajiannya yang sering mengemukakan beberapa kasus, seperti kegagalan kampanye masak air di Los Molinos, peristiwa kapak baja, Soil Bank dan lain-lain memberi kemudahan pembaca untuk memahami tanpa banyak mengeluarkan energi tambahan. Selain itu, setiap bab, pada halaman pertamanya dilengkapi dengan intisari pembahasan.

Sehingga mampu menggiring pembaca untuk memahami pembahasan pada bab yang bersangkutan.

Memang, sebagian materi yang dibicarakan sering dijumpai pada buku-buku penyuluhan maupun komunikasi yang sudah ada. Ini bukan merupakan kekurangan, karena bagian tersebut memiliki relevansi dengan seluruh pokok pembicaraan. Sayangnya, buku yang berbobot ini tidak didukung dengan penampilan fisiknya, yang dibuat sangat sederhana, baik kualitas kertas maupun disain halaman sampul yang seharusnya mampu menarik orang untuk membelinya.

Buku ini layak untuk dimiliki oleh penyuluh pertanian dan siapa saja yang mengemban tugas pembaharuan. Bahkan, cocok pula untuk pejabat yang menentukan kebijaksanaan, agar lebih memahami kesulitan yang dimiliki oleh para petugas lapangan. Khususnya bagi penyuluh pertanian, buku ini penting untuk dimiliki sebagai pelengkap buku-buku yang seharusnya sudah dipelajari, seperti Sosiologi Pedesaan, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Orang Dewasa dan lain-lain disamping buku-buku teknologi pertanian, tentunya.

Sentot B.I

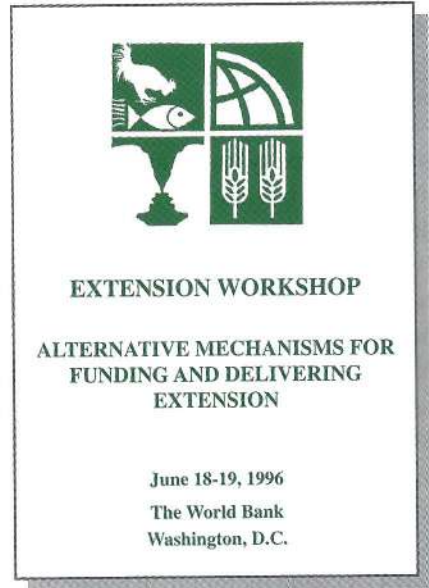
PPL Kecamatan Sleman,
Kab.Sleman, DI Yogyakarta

EXTENSION WORKSHOP

ALTERNATIVE MECHANISMS FOR FUNDING AND DELIVERING EXTENSION

The World Bank Washington, D.C.
June 18-19, 1996

Petani menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan produktivitas usahanya secara lebih menguntungkan, ramah lingkungan, dan lumintu, sehingga diperlukan berbagai inovasi teknologi dan non teknologi. Inovasi ini ternyata tidak seragam melainkan beragam sesuai dengan lingkungan fisik dan non fisik setempat. Keragaman atau *plurality* di tingkat petani ini menuntut keragaman pula dalam mengantarkan penyuluhan lewat suatu proses belajar, proses komunikasi, serta pendanaannya. Walaupun disadari diperlukan adanya perbedaan kebutuhan penyuluhan, namun terdapat hal umum yang disepakati, yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan memerlukan kaidah desentralisasi, perencanaan dari bawah, melibatkan petani sebagai subyek, fokus merespon kebutuhan petani, urun dana untuk keterlanjutan pembiayaan, serta sasaran petani yang bertambah luas sehingga memerlukan kemasan penyuluhan yang tepat pula. Begitulah kesimpulan suatu lokakarya tentang berbagai



alternatif mekanisme pembiayaan dan pelayanan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Juni 1996 di Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan peserta dari praktisi dan teoritis dalam penyuluhan pertanian yang berasal dari berbagai negara di benua Asia, Amerika, Afrika, Asia, Eropa dan Australia.

Kegiatan lokakarya tersebut di atas dikemas dalam suatu laporan oleh Willem Zipp, terdiri atas laporan ringkas, program penyelenggaraan, dan kumpulan makalah dari berbagai kalangan yang berisi studi kasus dari berbagai negara serta landasan teori yang berkembang dalam kebijaksanaan penyuluhan pertanian. Terdapat 9 studi kasus yang dipresentasikan, 19 tambahan studi kasus, 3 makalah mengenai kerangka pemikiran, 4 makalah mengenai kebijaksanaan Bank Dunia dalam bidang penyuluhan pertanian, 3 makalah rujukan, 4 terbitan bank dunia, serta peta markas Bank Dunia dan Daftar peserta lokakarya.

BEBERAPA PENGALAMAN NEGARA LAIN

Dalam lokakarya ini disajikan studi kasus penyelenggaraan penyuluhan di berbagai negara, baik yang dibiayai oleh negara maupun oleh swasta. Columbia, misalnya, mende-sentralisasikan urusan penyuluhan pertanian ke tingkat yang lebih bawah (setingkat kabupaten) dengan jalan menerbitkan berbagai peraturan, di antaranya dengan membentuk suatu lembaga penyuluhan (*Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria, UMATA*) yang mempunyai tanggung jawab dalam pembimbingan teknis untuk petani dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup, sosial dan gender. Pada masa sebelumnya penyuluhan pertanian di Columbia ditangani oleh berbagai lembaga atau unit pemerintahan di Pusat. Setelah berjalan sekitar dua tahun (dibentuk sekitar tahun 1993), terdapat pelajaran yang dapat ditarik tersediaan dana untuk membiayai kegiatan penyuluhan pertanian.

Pengalaman yang menarik lainnya adalah dari negara Belanda. Pemerintah Belanda mulai tahun 1993 mengadakan program swastanisasi penyuluhan pertanian. Pada saat sebelumnya penyuluhan pertanian di negara Belanda dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya, tetapi mulai tahun 1993 diadakan suatu program swastanisasi yang direncanakan setelah berjalan sepuluh tahun pelayanan unit penyuluhan pertanian dapat membiayai kegiatannya dari *penjualan jasa yang dibeli petani* sebanyak 50 persen. Beberapa ciri atau perkembangan dari proses

swastanisasi ini, menurut **Wim Tacken** dalam makalahnya, adalah sebagai berikut :

a) *Sebelum swastanisasi*

- lebih banyak usaha penyediaan bimbingan teknis/ekonomis dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah;
- diselenggarakan dan dibiayai 100 oleh pemerintah melalui Kementrian Pertanian;
- semua petugas adalah pegawai negeri;
- biaya tinggi, hasil rendah;
- rendah motivasi, kepuasan kerja dan insentif pegawai sehingga yang berkualitas mencari pekerjaan lain;
- muatan dan metodologi penyuluhan bersifat umum, tidak spesifik kebutuhan petani

b) *Setelah swastanisasi dimulai*

- subsidi berkurang;
- petani membayar sebagian biaya jasa penyuluhan;
- pengurangan jumlah pegawai dari 1120 menjadi 700, mereka menjadi pegawai yayasan, bukan pegawai negeri. Sisanya tetap menjadi pegawai negeri;
- prioritas kegiatan untuk memenuhi kebutuhan petani;
- peningkatan partisipasi petani;
- yayasan membentuk tiga anak perusahaan;
- program penyuluhan digantikan dengan rencana perusahaan (*bussiness plan*);
- peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyuluhan;

- peningkatan kepuasan kerja penyuluh pertanian;
- peningkatan interaksi antara petani dan penyuluh.

Selain dari dua makalah tersebut, masih banyak yang lainnya yang membahas studi kasus dari berbagai negara. Dari Australia, misalnya, membahas management partisipatif untuk memecahkan berbagai masalah di tingkat peternak.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN Rujukan

Beberapa kerangka pemikiran mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikemukakan dalam beberapa makalah, di antaranya adalah mengenai penyuluhan oleh sektor pemerintah dan swasta, pengintegrasian proses dan muatan dalam pembaharuan kelembagaan, serta perlunya memperhatikan keragaman kebutuhan muatan dan metoda penyuluhan.

Tiga makalah rujukan juga dimuat dalam laporan lokakarya. Yang pertama adalah mengenai alasan yang perlu dipertimbangkan dalam program penyuluhan yang dibiayai negara. Yang kedua mengenai penyampaian teknologi pertanian. Dan yang ketiga, hal-hal yang perlu direnungkan mengenai penyuluhan

serta perbandingan di antara tiga model penyuluhan pertanian. Yang terakhir ini ditulis oleh **Niels Rolling** dari Wageningen Agricultural University. Ia adalah ahli penyuluhan pertanian yang sangat dikenal di Indonesia.

BAHAN PERBANDINGAN

Bagi Indonesia laporan lokakarya ini sangat bermanfaat sebagai gambaran pengalaman dari berbagai negara sehingga patut dibaca oleh para penyelenggara penyuluhan pertanian di kalangan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh pertanian serta para pengajar di Perguruan Tinggi. Untuk kalangan pemerintah, laporan ini berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan desentralisasi urusan penyuluhan pertanian, privatisasi lembaga pelayanan penyuluhan, serta kebijaksanaan pemberian kesempatan swasta dan LSM. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1996 ini terdapat suatu penyempurnaan dari proses desentralisasi penyuluhan pertanian kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Yusuf Bunyamin

ekstensia menerima resensi buku yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, pengembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ditulis pembaca untuk dimuat dalam rubrik WACANA.

Tulisan ditik dalam 2 spasi maksimal 3 halaman A 4/kwarto (dengan mesin tik biasa atau elektrik) atau ditik menggunakan berbagai program pengolah kata (MS Word, WP, WS dsb.) dan dikirimkan ke *ekstensia* dalam disket atau *print out*-nya.

ekstensia akan menentukan tulisan yang akan dimuat dan bagi yang tidak dimuat naskah akan dikirimkan kembali.

- peningkatan kepuasan kerja penyuluh pertanian;
- peningkatan interaksi antara petani dan penyuluh.

Selain dari dua makalah tersebut, masih banyak yang lainnya yang membahas studi kasus dari berbagai negara. Dari Australia, misalnya, membahas management partisipatif untuk memecahkan berbagai masalah di tingkat peternak.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN Rujukan

Beberapa kerangka pemikiran mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikemukakan dalam beberapa makalah, di antaranya adalah mengenai penyuluhan oleh sektor pemerintah dan swasta, pengintegrasian proses dan muatan dalam pembaharuan kelembagaan, serta perlunya memperhatikan keragaman kebutuhan muatan dan metoda penyuluhan.

Tiga makalah rujukan juga dimuat dalam laporan lokakarya. Yang pertama adalah mengenai alasan yang perlu dipertimbangkan dalam program penyuluhan yang dibiayai negara. Yang kedua mengenai penyampaian teknologi pertanian. Dan yang ketiga, hal-hal yang perlu direnungkan mengenai penyuluhan

serta perbandingan di antara tiga model penyuluhan pertanian. Yang terakhir ini ditulis oleh **Niels Rolling** dari Wageningen Agricultural University. Ia adalah ahli penyuluhan pertanian yang sangat dikenal di Indonesia.

BAHAN PERBANDINGAN

Bagi Indonesia laporan lokakarya ini sangat bermanfaat sebagai gambaran pengalaman dari berbagai negara sehingga patut dibaca oleh para penyelenggara penyuluhan pertanian di kalangan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh pertanian serta para pengajar di Perguruan Tinggi. Untuk kalangan pemerintah, laporan ini berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan desentralisasi urusan penyuluhan pertanian, privatisasi lembaga pelayanan penyuluhan, serta kebijaksanaan pemberian kesempatan swasta dan LSM. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1996 ini terdapat suatu penyempurnaan dari proses desentralisasi penyuluhan pertanian kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Yusuf Bunyamin

ekstensia menerima resensi buku yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, pengembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ditulis pembaca untuk dimuat dalam rubrik WACANA.

Tulisan ditik dalam 2 spasi maksimal 3 halaman A 4/kwarto (dengan mesin tik biasa atau elektrik) atau ditik menggunakan berbagai program pengolah kata (MS Word, WP, WS dsb.) dan dikirimkan ke *ekstensia* dalam disket atau *print out-nya*.

ekstensia akan menentukan tulisan yang akan dimuat dan bagi yang tidak dimuat naskah akan dikirimkan kembali

Meningkatkan Produktivitas

Apakah anda sering :

- Merasa resah kehilangan waktu kerja produktif?
- Salah mengerti instruksi?
- Memperpanjang waktu istirahat?
- Terlambat menyerahkan tugas?
- Melamun berada di tempat lain dan bukan di tempat kerja?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menyiratkan suatu gambaran umum seseorang yang tidak produktif, Tentu saja kita pernah mengalami hal-hal itu, tetapi bila hal ini terjadi tiap hari, maka kita harus melakukan sesuatu agar kita tidak terjebak dalam bencana apatisisme atau masuk dalam golongan orang-orang yang merugi.

Produktivitas disini berarti dapat mengerjakan apa yang diharapkan serta menyelesaikannya dengan baik. Selain berpengaruh terhadap prestasi kerja, produktivitas merupakan unsur utama dalam kepuasan kerja.

Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita?

1. Telaah kembali kebutuhan kerja, apakah yang sekarang kita kerjakan merupakan kebutuhan kita dalam arti memuaskan, menyenangkan, sesuai dengan bakat atau hal-hal lain yang secara psikologis memberi dorongan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
2. Bekerja menurut rencana yang telah disusun, menyelesaikan pekerjaan pada waktunya dan mencari cara yang memungkinkan secara produktif waktu yang semula tidak terpakai
3. Ambil peranan aktif dan mintalah tanggung jawab yang lebih besar.
4. Carilah tantangan baru dan ancangan baru yang realistis serta mengerjakannya dengan penuh rasa antusias.
5. Bersikaplah inovatif dan perbaharui keterampilan kerja kita. Carilah cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dan kalitas pekerjaan kita.
6. Berbicaralah dengan orang yang berpengalaman dalam bidang kerja tersebut dan cobalah strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka.
7. Bersikaplah luwes, bisa menyesuaikan diri serta memelihara hubungan akrab dengan teman kerja.
8. Sadarilah keterbatasan kita. Bila kita ragu mengenai kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan, mintalah bantuan dan berkonsultasi agar kita dapat mengukur kualitas pekerjaan yang kita kerjakan.

Dengan memaksimalkan produktivitas kerja, kita lebih mungkin memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar dari pekerjaan itu sendiri. Mudah-mudahan tempat kita bekerjapun akan member penghargaan dan pengakuan yang adil untuk sumbangan positif kita. (rm)

RESEP MAJUDI MENGATASI KEBINGUNGAN

Mendung menggantung di angkasa. Tapi hujan tak kunjung tiba. Malah angin yang datang mēmbadai, menggoyang segala yang ada di permukaan. Batang-batang bambu meliuk-liuk. Ranting-ranting dan dedaunan kering berhamburan. Porak poranda di hempas angin.

Dalam suasana rada mengkhawatirkan seperti itu, Majudi jadi teringat ucapan Jumadi beberapa saat lalu. Kala itu keduanya baru keluar dari ruang pertemuan, dimana soal-soal penyuluhan mutakhir dibahas nyaris seharian, kendati tanpa titik temu yang jelas. Salah satu topik yang merangsang baku pendapat ialah ihwal sistem kerja. Soal ini pula yang mengungkit Majudi melontarkan pernyataan, "Saya malah bingung, Jum", ketika keduanya menjejakkan kaki di pelataran tempat motor *plat merah* Jumadi diparkir. Sontak pula Jumadi-pun menimpali. "Kalau bingung pegangan, Jum !"

Tapi bukan Majudi kalau tidak jadi panjang.

"Pegangan bagaimana?" lanjutnya ketika keduanya berboncengan motor melaju di jalanan kecamatan.

"Ya pegangan saja," balas Jumadi.

"Orang bingung 'kan ibarat limbung. Tidak pasti, tidak jelas antara ini ataukah itu. Nah supaya tidak jatuh terjerembab, ya peganganlah !" tandas Jumadi lebih lanjut.

Jidat Majudi berkerut. Ada lima baris kerutan di situ.

"Tapi jangan khawatir, Jud. Orang bingung itu tandanya mau maju".

"Kamu juga bingung, Jum ?"

"Heeh-lah. Saya 'kan pengen maju juga. Jadi saya rela membingungi diri sendiri".

Bukan Majudi pula kalau harus berhenti hanya sebatas pernyataan saja. Maka iapun berusaha menangkap sesuatu yang lebih bermakna filosofis dari ketimbang arti harfiah 'berpegangan'. Untuk itu ia perlu hening cipta. Maka tergambarlah suatu pemahaman di benak Majudi bahwa 'berpegangan' berarti ia harus memegang sesuatu yang bisa membuat ia merasa yakin, pasti dan mantap. Langkah pertama ke arah itu ialah dengan berpegangan pada rujukan, referensi, tentang soal yang membuatnya bingung. Sontak-lah Majudi merujuk sana rujuk sini, kebet sana kebet sini, baca sana baca sini. Setelah dipandang cukup, barulah Majudi menerapkan langkah

kedua, yaitu mengendapkan semuanya, membedah, menganalisis dan kontemplasi. Merenung.

Soal reseponya ini Majudi punya keyakinan bahwa membicarakan segala sesuatu bila cuma pada tataran kepala, benak, dengan kekuatan yang selalu dibangga-banggakannya: logika, amat mungkin akan diwarnai oleh banyak kepentingan, sehingga seringkali tidak murni lagi. Karena itu, menurut Majudi, dari kepala perlu turun ke hati. Artinya, kita membicarakan sesuatu itu tidak cukup pada tataran kepala saja, perlu diteruskan pada tataran kalbu, dengan gaung yang tidak gemerontang, tapi terasa ada dan lebih bersifat 'suara dalam'. Itulah yang disebut suara nurani, kata hati, hati nurani dan sederet istilah lainnya. Tapi yang pasti, dia bisa dan sangat bisa menyuarakan kejujuran, kebenaran yang bebas dari segala intrik dan persekongkolan kepentingan.

Gerimis rinai mengiringi langkah Majudi. Ia menerabas pekat malam yang nyaris mengaburkan pandangannya. Beberapa saat kemudian sampailah ia di teras rumah Jumadi. Tiga kali diketuknya daun pintu. Sejenak pintu terbuka. Senyum Jumadi menyapa kedatangan Majudi.

"Saya punya firasat kamu akan datang", ujarinya sambil mengajak Majudi duduk di teras.

"Kamu punya bakat jadi paranormal barangkali." sungut Majudi.

"Bukan begitu. Cuma kebiasaan saja. Setiap kali ada yang memusingkan benakmu, kita selalu membica-

rakannya berdua. Jadi saat inipun saya mengharapkan kamu datang. Ternyata betul 'kan?'"

"Aku sudah mengikuti saranmu, Jum", Majudi malah langsung ke pokok persoalan.

"Soal yang tadi sore?'"

Majudi mengangguk.

"Lantas?'" tanya Jumadi

"Sebaiknya kita kembali ke filosofi dasar penyuluhan kita".

"Sebegitu jauhnya?'"

"Maksudku kita perlu mengapresiasi kembali, menyegarkan kembali soal filosofi dasar penyuluhan. Dari situlah kita berpijak untuk membicarakan soal sistem kerja yang jadi bahan perbincangan".

"Konkretnya bagaimana, Jud?'"

"Baik. Ringkasnya, sistem kerja itukan yang mempola kerja kita kelak. Padahal kerja kita untuk petani. 'Kan tidak lengkap bila kita membicarakan soal sistem kerja dari sudut pandang kita saja".

Jumadi mulai tanggap.

"Jadi maksudmu kita perlu membicarakannya dengan berbagai pihak yang terkait dengan kerja kita. Begitu?'"

"Persis, dan dengan satu syarat", tukas Majudi.

"Syaratnya apa?'"

"Syarat bahwa membicarakannya tidak cuma dalam tataran kepala, benak, tetapi juga dalam tataran kalbu".

Keduanya tersenyum ceria. Mendadak gerimis reda. Gemintang muncul di angkasa. Angin sepoi membawa kesejukan. Meresap ke dalam palung kalbu.

basuki setiabudi

